



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014 - 2019 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 - 2029 ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014 - 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070); 8

9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 78);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

dan

BUPATI MANGGARAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2014 - 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur. ✂

BAB II
ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Daerah disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan *Stake Holder* dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyusunan RPJM Daerah adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Swasta dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan Penyusunan RPJM Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
 - b. menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
 - c. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Daerah;
 - d. memberikan gambaran umum kondisi Daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional;

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJM Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI PROGRAM DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI : PENUTUP ☺

BAB V

RPJM DAERAH

Pasal 5

RPJM Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembagunan Daerah, Kebijakan Umum, Program SKPD, Program Lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPJM Daerah menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 8

RKPD dan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 9

Bupati wajib melakukan pengendalian atas RPJM Daerah.

Pasal 10

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi pengendalian terhadap :

- a. Kebijakan Perencanaan Pembagunan Daerah; dan
- b. Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah.

Pasal 11

(1) Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. §

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah kepada Bupati.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

Bupati melakukan evaluasi atas RPJM Daerah.

Pasal 13

- (1) Evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati dan menjadi bahan bagi penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode berikutnya.

Pasal 14

Tata cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJM Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ✓

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 20 Agustus 2014

BUPATI MANGGARAI TIMUR,



YOSEPH TOTE

Diundangkan di Borong
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,



MATHEUS OLA BEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 001/TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu Kabupaten daerah otonom baru di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Manggarai yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2007 tentang pembentukan daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi NTT. Secara defakto, Kabupaten Manggarai Timur secara resmi menjadi salah satu daerah otonom baru pada tanggal 23 Nopmeber 2007 yaitu sejak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik Penjabat Bupati Manggarai Timur. Dalam perjalanan selanjutnya, Roda Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dikendalikan oleh seorang Penjabat Bupati Manggarai Timur, dengan memanfaatkan sumber pembiayaan pembangunan yang sangat terbatas yaitu bersumber dari hibah pemerintah provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai sebagai kabupaten induk. Dengan keterbatasan akses pembiayaan pembangunan dan aktifitas pemerintahan tersebut, tentunya semua aspek pembangunan dan pelayanan tugas pemerintahan tidak berjalan maksimal, sehingga fokus utama yang menjadi tugas pokok Penjabat Bupati Manggarai Timur sejak tahun 2007 – 2008 adalah persiapan perangkat daerah otonom termasuk Lembaga Lesilatif (DPRD), persiapan dan fasilitasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Sejak tahun anggaran 2009, Kabupaten Manggarai Timur baru memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara otonom, dan pada tahun bersamaan juga baru memiliki Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) secara definitive. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan, sesuai dengan amant Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya.

Dalam batas-batas kemampuan dan keunikannya Kabupaten Manggarai Timur sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pernah bebas dari proses dinamika perubahan nasional baik yang disebabkan oleh interaksi dan dinamika internal maupun yang dikarenakan oleh interaksi dengan faktor eksternal. Meskipun demikian secara provincial, kabupaten Manggarai Timur berdinamika secara kontekstual menurut kemampuannya. Secara filosofis, “perubahan” itu mengandaikan adanya gerak dan dinamika terus menerus. Kaidah dari “perubahan” menyatakan bahwa tak ada yang tetap dalam perubahan kecuali perubahan itu sendiri, karena itu setiap sistem sebagai organisme untuk dapat tetap eksis dalam perubahan apabila memiliki mekanisme perubahan internal yang baik.

Kabupaten Manggarai Timur sebagai satu “**organisme**”, selalu berdinamika dalam perubahan mengikuti kaidah dan realita perubahan sosial.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur perlu memperdayagunakan secara optimal semua potensi perubahan internal dan kontribusi kekuatan perubahan eksternal melalui interaksi – networking - wilayah dalam skala nasional dan global, sehingga terciptanya ruang perubahan yang berdampak positif demi mencapai jbaran-jabaran visi dan misi dalam target program pembangunan skala menengah melalui Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 – 2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun dan pembangunan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai perwujudan dari amanat tersebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur disusun berpedoman kepada pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJMD Provinsi NTT tahun 2013 - 2018.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2009-2029 yang disinergikan dengan visi, misi dan agenda pembangunan dari **Drs. Yoseph Tote, MSi** dan **Agas Andreas, SH.M.Hum** yang dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 Pebruari Tahun 2014 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur periode tahun 2014-2019 pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Sesuai pasal 150 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan Dokumen perencanaan lainnya yang bersifat glonal. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk kebijakan kewilayahan mengacu pada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011-2031. Dalam rangka sinergi, RPJMD Kabupaten Manggarai Timur disinergikan juga dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013 - 2018.

RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019 merupakan RPJMD tahap Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 yaitu tahun 2014-2019 dengan prioritas pembangunan yang ditujukan pada terwujudnya Manggarai Timur yang mandiri dalam ekonomi, adil dalam budaya dan demokratis dalam politik, yang diorientasikan kepada penguatan perekonomian masyarakat dalam kerangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan akseibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah dengan didukung oleh pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju masyarakat yang madani. RPJMD Kabupaten

Manggarai Timur Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019 masa bhakti 2014-2019 dan juga merupakan kesinambungan dari pembangunan lima tahun sebelumnya (2009-2014).

Untuk mewujudkan harapan tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur menggunakan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Sebagai dokumen perencanaan pembanguna daerah, RPJMD 2014-2019 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun selama lima tahun kedepan, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2014 – 2019 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) setiap tahun selama lima tahun kedepan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD memuat Visi dan Misi Kepala Daerah, yang disusun berdasarkan analisis permasalahan, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator sasaran dan target pencapaian pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Manggarai Timur memuat kebijakan terkait dengan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bidang penyelenggaraan pemerintah daerah.

RPJMD sebagai acuan pembangunan daerah dilaksanakan melalui strategi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur social dasar, ekonomi dan perhubungan, optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan local dan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan public, Kemitraan dan keterpaduan lintas sektor. Secara operasional strategi tersebut akan menjadi landasan pelaksanaan agenda dan program pembangunan yang target dan indikatornya terukur sehingga dapat dijabarkan dalam RKPD dan Renstra SKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJM Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
13. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Timur
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 , Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
25. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 – 2031.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 – 2029.

1.3. Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lain (sesuaikan judul)

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur khususnya dalam menjalankan visi dan misi pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

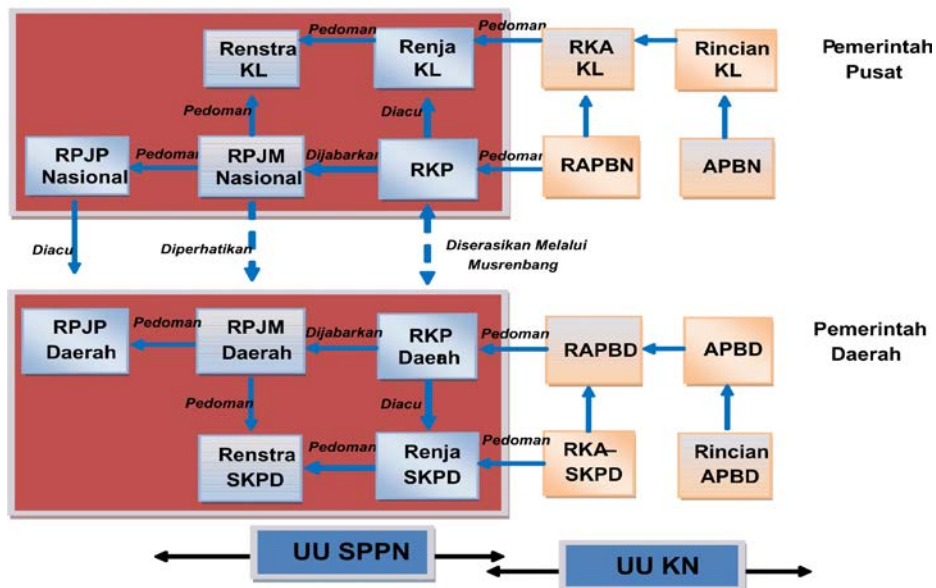
1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029
RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Manggarai Timur periode 2014-2019, juga berpedoman pada visi dan misi jangka panjang Kabupaten Manggarai Timur 2009 – 2029 beserta arah pembangunannya. RPJPD Kabupaten Manggarai Timur 2009 – 2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.

2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Manggarai Timur
Penyusunan RPJM memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur ruang RTRW Kabupaten Manggarai Timur sebagai dasar menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Manggarai Timur. Kedudukan dan peran RTRW dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan adalah penting dan strategis, maka pemerintah memandang perlu untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW. Hal ini bertujuan agar Dokumen RTRW yang telah ada menjadi pedoman, arahan, dan rujukan dari semua proses perencanaan sekarang dan di masa mendatang di Kabupaten Manggarai Timur. Dengan demikian, penyusunan RPJM memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur ruang RTRW Kabupaten Manggarai Timur sebagai dasar menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Manggarai Timur.
3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
4. RPJM dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pelaksanaan RPJM setiap tahun dijabarkan dalam ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Manggarai Timur Tahun yang dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, Kabupaten hingga provinsi.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



5. Hubungan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur dengan RPJMD Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada

Sebagai bagian dari wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentunya dalam merencanakan pembangunan harus bersinergi dengan kabupaten lainnya khususnya yang ada disekitar Manggarai Timur yaitu Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada. Posisi Kabupaten Manggarai Timur yang terletak diantara 2 Kabupaten yang masing memiliki keunggulan dan kelemahan masing – masing yaitu Kabupaten Manggarai dan Ngada, akan memiliki peluang dan posisi strategis dalam penataan dan pengelolaan pembangunan daerah pada kurun waktu lima tahun kedepan. Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu jangka menengah 2010 – 2015 memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan fokus pada perubahan struktur perekonomian daerah, dari struktur primer yang menjadi dominan secara perlahan – lahan berkurang dengan mengangkat sektor tersier terutama sektor jasa dan perdagangan, hotel dan restoran. Kondisi ini akan menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Manggarai Timur yang memiliki keunggulan local dalam bidang komoditi perkebunan yaitu kopi, cengkeh dan kakao, untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah guna meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Ngada dengan program unggulannya adalah “PERAK” (Pengembangan Ekonomi Rakyat) melalui pengembangan ternak berbasis pedesaan, memberikan peluang bagi Kabupaten Manggarai Timur dalam pengembangan berbagai komoditi tanaman pangan yang berperan ganda baik sebagai pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat juga sebagai pakan ternak.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN**
Bab ini memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bagian yang termuat dalam bab ini yaitu tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur
- BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum Kondisi Daerah selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.
- BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**
Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.
- BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**
Bab ini Memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar.
- BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**
Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.
- BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam jangka menengah.
- BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.
- BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**
Dalam Bab ini memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
- BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**
Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.
- BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**
Bab ini menguraikan tentang RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan pedoman bagi setiap kepala SKPD dalam menyusun

Renstra SKPD dan RKPD. Serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku kepentingan.

BAB XI. PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk :

1. Menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur dengan memperhatikan arahan Visi dan Misi Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
2. Menjadi acuan dan pedoman resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan seluruh perangkat kelebagaannya dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Rencana Kerja Tahunan. Selanjutnya menjadi landasan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Manggarai Timur secara berjenjang.
3. Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan

1.5.2. Tujuan

Berdasarkan maksud di atas, penyusunan RPJM Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019 ini bertujuan untuk :

1. Menjabarkan visi, misi, program strategis/agenda pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur ke dalam strategi pembangunan, arah kebijakan yang fokus, dan program pembangunan yang rinci, terukur, dan integratif, sehingga dapat diimplementasikan sejak 2014 sampai 2019.
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
3. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur.
4. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang RPJMD.
5. Menyediakan satu-satunya acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Manggarai Timur dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut dengan sumber dana APBD.
6. Menjamin terwujudnya sinergi dan integrasi dalam proses penyusunan dan penetapan,

serta implementasi program dan kegiatan pembangunan antar-SKPD.

7. Menyediakan tolok ukur sebagai landasan penetapan indikator kinerja dalam rangka mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Kabupaten Manggarai Timur baik secara administratif maupun sosial.
8. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang sehat yang mendorong peningkatan partisipasi, kerjasama, dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten, Sektor Swasta, dan Organisasi Masyarakat dalam pembangunan Kabupaten.
9. Menjamin terwujudnya tata-kelola pemerintahan yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan wilayah

1. Luas dan Batas Administrasi

Luas Wilayah Kabupaten Manggarai timur secara keseluruhan baik daratan dan laut 2.643,93 Km² atau 264.393 ha secara administrasi wilayah kabupaten manggarai Timur di bagi menjadi 9 Kecamatan 17 kelurahan 156 desa dimana pusat pemerintahan ada di Borong Kecamatan Borong, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013

NO	KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS WILAYAH DARATAN (HA)	LUAS WILAYAH LAUT (HA)	TOTAL LUAS WILAYAH (HA)
1	Borong	Borong	28.202	2.180	30.382
2	Ranamese	GoloMongkok	20.824	2.000	22.824
3	Poco Ranaka	Mano	10.423	-	10.423
4	Poco Ranaka Timur	Lawir	10.423	-	10.423
5	Lamda Leda	Benteng Jawa	35.943	2.680	38.623
6	Sambil Rampas	Pota	40.009	2.390	42.399
7	Elar	Lengko Elar	32.825	1.300	34.125
8	Elar Selatan	Wukir	23.934	-	23.934
9	Kota Komba	Wae Lengga	49.194	2.090	51.284
Manggarai Timur		Borong	251.855	12.538	264.393

Sumber: Bappeda Kabupaten Manggarai Timur, 2014.

Kabupaten Manggarai Timur terletak di bagian barat pulau Flores dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan dengan Laut Sawu
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Ngada
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Manggarai.

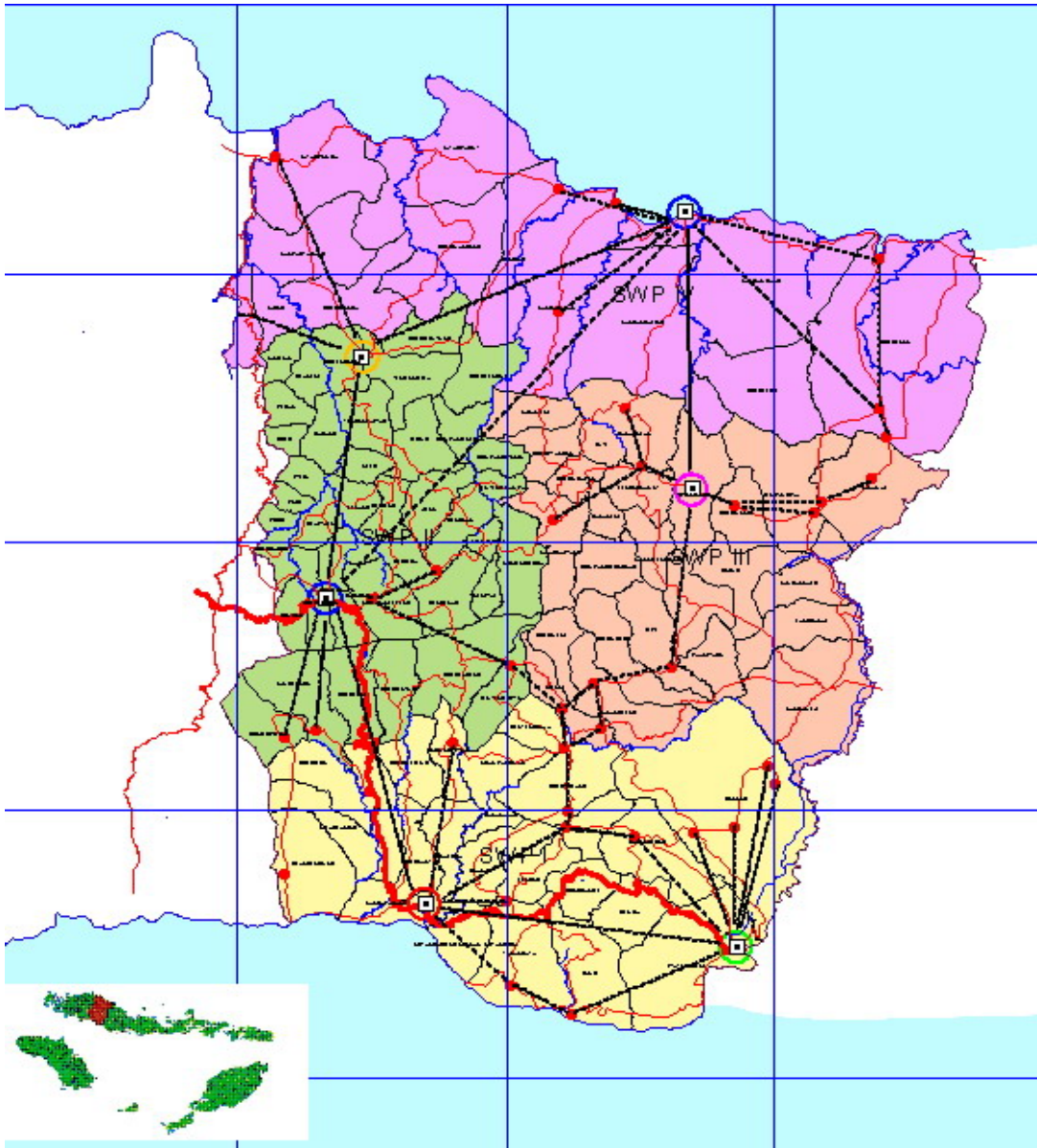
2. Letak Dan Kondisi Geografis

a) Posisi Astronomis

Secara astronomis wilayah Kabupaten Manggarai Timur terletak diantara 08° 14' Lintang Selatan - 09°00' Lintang Selatan dan 120°20' Bujur Timur - 120°55' Bujur Timur.

b) Posisi Geostrategis

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai pada tahun 2007.



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Manggarai Timur

c) Kondisi Kawasan

1) Pedalaman

Terdapat kawasan pedalaman yang masih sulit diakses baik dari aspek komunikasi maupun transportasi. Wilayah pedalaman tersebut menyebar di Kecamatan Lambaleda bagian tengah, Sambi Rampas bagian tengah, Elar dan Elar Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Ngada, serta Kecamatan Ranamese berbatasan dengan Kabupaten Manggarai.

2) Terpencil

Daerah terpencil di Kabupaten Manggarai Timur identik dengan daerah pedalaman yang disebabkan oleh keterbatasan aksesibilitas. Daerah terpencil tersebut menyebar di Kecamatan Lambaleda bagian tengah, Sambi Rampas bagian tengah, Elar dan Elar Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Ngada serta Kecamatan Ranamese berbatasan dengan Kabupaten Manggarai.

- 3) Pesisir
Daerah pesisir menyebar di Kecamatan Sambu Rampas (Desa Nampar Sepang, Nanga Mbaur, Kelurahan Pota dan Kelurahan Nanga Baras), Kecamatan Lamba Leda (Desa Satar Padut, Satar Kampas, Nampar Tabang, Satar Punda dan Satar Punda Barat), Kecamatan Ranamese (Desa Lidi, Bea Ngencung), Kecamatan Borong (Desa Compang Ndejing, Nanga Labang, Kelurahan Kotandora, Kelurahan Ranaloba) dan Kecamatan Kota Komba (Kelurahan Tanah Rata, Bamo dan Watu Nggene). Luas daerah pesisir di Kabupaten Manggarai Timur ±609,78 km².
- 4) Pegunungan
Secara geografis, Wilayah Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari pegunungan bagian dari Pegunungan Mandosawu yang membentang dari timur ke barat. Wilayah pegunungan ini melewati Kecamatan Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, Lamba Leda, Sambu Rampas Bagian Selatan, Elar, Elar Selatan, Kota Komba Bagian Utara, Borong Bagian Utara dan Kecamatan Ramamese.

3. Kondisi Topografi

a) Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebagian besar berada pada kemiringan 15% - 40%. Untuk lebih jelasnya kondisi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Luas Wilayah Daratan dan Persentase Menurut Kemiringan Tanah Per Kecamatan

KECAMATAN	LERENG								TOTAL LUAS (HA)
	0-2 % (ha)	%	2-15 % (ha)	%	15-40 % (ha)	%	> 40 % (ha)	%	
01. Borong	207	1,92	2.577	39,18	4.632	13,59	20.786	10,37	28.202
02. Rana Mese	281	2,61	1.902	28,92	3.421	10,04	15.220	7,59	20.824
03. Poco Ranaka	--	-	285	4,33	2.827	8,29	7.389	3,69	10.501
04. P.Ranaka Timur	--	-	282	4,29	2.807	8,24	7.334	3,66	10.423
05. Lamba Leda	996	9,24	384	5,84	3.832	11,24	30.731	15,33	35.943
06. Sambu Rampas	8.344	77,42	-	-	943	2,77	30.722	15,33	40.009
07. Elar	411	3,81	-	-	-	-	32.414	16,17	32.824
08. Elar Selatan	300	2,78	-	-	-	-	23.624	11,79	23.934
09. Kota Komba	238	2,21	1.147	17,44	15.624	45,84	32.185	16,06	49.193
	10.777	100	6.577	100	34.086	100	200.415	100	251.855

Sumber : Bappeda Manggarai Timur, 2013

b) Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebagian besar berada di atas 100 meter dpl. Untuk lebih jelasnya kondisi ketinggian lahan wilayah Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Luas Wilayah dan Persentase Menurut Ketinggian Diatas Permukaan Laut Per Kecamatan

KECAMATAN	Ketinggian Dari Muka Laut								TOTAL LUAS (HA)
	0-100 (m)	%	100-500 (m)	%	500- 100 (m)	%	> 1000 (m)	%	
01. Borong	4.211	14,93	9.310	33,01	6.590	23,37	8.091	28,69	28.202
02. Rana Mese	1.130	5,43	7.321	35,16	5.143	24,70	7.230	34,72	20.824
03. Poco Ranaka	0	0,00	402	3,83	6.475	61,66	3.624	34,51	10.501
04. P.Ranaka Timur	0	0,00	384	3,68	5.838	56,01	4.201	40,31	10.423
05. Lamba Leda	4.887	13,60	18.867	52,49	11.269	31,35	920	2,56	35.943
06. Sambu Rampas	8.452	21,13	19.971	49,92	8.926	22,31	2.660	6,65	40.009
07. Elar	4.550	13,86	12.440	37,90	12.421	37,84	3.413	10,40	32.824
08. Elar Selatan	0	0,00	10.528	43,99	11.103	46,39	2.303	9,62	23.934
09. Kota Komba	7589	15,43	18293	37,19	12975	26,38	10336	21,01	49193
Jumlah	30.819	12,24	97.516	38,72	80.740	32,06	42.778	16,99	251.853

Sumber : Bappeda Manggarai Timur, 2013

4. Geologi

a) Struktur dan Karakteristik

Keadaan geologi Kabupaten Manggarai Timur mempunyai kondisi geologi yang cukup kompleks. Satuan geologi yang dijumpai dalam wilayah ini dibagi dalam 4 jenis yaitu :

1. Intermediate basic (basa menengah)
2. Neogen
3. Alluvium terrace deposite and coral reefs (alluvium undak dan terumbu coral)
4. Silific efusives (efisiva berasam kersik)

Wilayah Manggarai Timur bagian selatan sepanjang arah Barat – Timur banyak ditemukan jenis Intermediate Basic (basa menengah). Sedangkan pada bagian utara banyak ditemukan batuan kapur pada formasi neogen. Jenis tanah di Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari :

- Latosol
Tanah latosol semula tergolong tanah mineral yang sudah mempunyai perkembangan profil dalam horizon terselubung merah hingga kuning, liat, lemah hingga gumpal. Jenis tanah ini meliputi 3 golongan yaitu : latosol coklat, latosol coklat merah dan latosol merah kuning.
- Mediterian
Tanah mempunyai lapisan solum yang tebal. Kadar unsur basa yang terkandung umumnya tinggi, daya menahan airnya sedang, sehingga kepekaan terhadap erosi juga sedang.
- Litosol
Merupakan tanah mineral dengan sedikit perkembangan diatas batuan kukuh, dengan kedalaman profil kurang dari 50 cm.

b) Potensi Geologi

Dari jenis tanah di atas, potensi geologi di Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

- **Latosol**
Golongan latosol coklat memiliki kemampuan dan potensi yang baik, karena kadar NPK cukup tersedia. Jenis latosol coklat merah dan latosol merah kuning memiliki kemampuan untuk pertanian sangat kecil, karena terdapat indikasi kekurangan sulfur.
- **Mediterian**
Sifat-sifat fisik dan kimianya baik sehingga nilai produksinya cukup tinggi dan apabila persediaan air cukup untuk pengolahan/tumbuh tanam, maka jenis tanah ini dapat dimanfaatkan untuk persawahan.
- **Litosol**
Jenis tanah ini mempunyai hambatan kedangkalan profil disertai kadang-kadang kurangnya air, kemungkinan digunakan sebagai lahan pertanian sangat terbatas. Penyebaran untuk jenis tanah litosol banyak dijumpai di Kecamatan Poco Ranaka dan Kecamatan Borong. Jenis tanah mediterian banyak dijumpai menyebar, khususnya banyak dijumpai di kawasan bagian utara.

Selain potensi diatas, terdapat juga potensi geologi berupa kawasan rawan bencana alam dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan rawan bencana alam gunung berapi merupakan wilayah sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap luncuran gas beracun, lahar panas dan dingin, luncuran awan panas dan semburan api, dan tempat lalunya tumpahan benda-benda lain akibat letusan gunung berapi yang terletak di Kecamatan Poco Ranaka.

5. **Kondisi Hidrologi**

a) **Daerah Aliran Sungai**

Daerah aliran sungai di Kabupaten Manggarai Timur menyebar di beberapa kecamatan. Penggunaan Daerah Aliran Sungai mayoritas sebagai kawasan lindung dan pertanian. Beberapa Daerah Aliran Sungai yang ada di Kabupaten Manggarai Timur yaitu :

- DAS Wae Bobo diwilayah perbatasan Kecamatan Borong dan Kota komba;
- DAS Wae Mokel berada diwilayah perbatasan bagian selatan antara Kabupaten Manggarai Timur dan Ngada;
- DAS Wae Pesi berada diwilayah perbatasan bagian utara antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai;
- DAS Wae Togong di perbatasan bagian utara Kecamatan Lamba Leda dan Sambu Rampas;
- DAS Wae Mbaling di Kecamatan Sambu Rampas.
- DAS Wae Laku di Kecamatan Borong
- DAS Wae Musur di Kecamatan Ranamese

b) **Sungai, Danau dan Rawa – Rawa**

Beberapa sungai besar yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur yaitu:

- Kecamatan Borong: Wae Reka, Wae Nampe, Wae Laku, Wae Musur, Wae Lur, Wae Bobo, Wae Mao, Wae Nangis, Wae Boko, Wae Mau;

- Kecamatan Sambu Rampas: Wae Wera, Wae Tiwu Roang, Wae Tiwu Sengit, Wae Mbaling, Wae Wau, Wae Lenge, Wae Reno, Wae Larik;
- Kecamatan Kota Komba: Wae Nawu, Wae Ghera, Wae Lengga, Wae Mangu, Wae Munting, Wae Mokel, Satar Beleng, Wae Neka, Wae Mobos Hulu Kanan, Wae Rana, Wae Sik, Wae Rungen, Wae Tija, Wae Mokel;
- Kecamatan Poco Ranaka: Wae Kambung, Wae Wina, Wae Nunung, Wae Lamba;
- Kecamatan Elar: Wae Gising, Wae Muli, Wae Watu, Wae Rebus, Wae Wuang, Wae Buntal;
- Kecamatan Lamba Leda: Wae Satar Teu, Wae Molot, Wae Loe, Wae Dampek, Wae Waso.

Danau yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur yaitu :

- Danau Rana Mese di Kecamatan Ranamese
- Danau Rana Kulan di Kecamatan Elar
- Danau Rana Tonjong di Kecamatan Sambu Rampas

c) Debit Air

Debit air bawah tanah yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur yaitu:

- Debit mata air sangat beragam setempat mencapai 10 liter/detik yang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Borong, Kecamatan Kota Komba (kecuali Desa Komba dan Bambo bagian barat) dan Elar bagian timur;
- Akuifer dengan produksi sedang meliputi wilayah utara yaitu Kecamatan Elar (kecuali Buntal), Kecamatan Sambu Rampas (kecuali Pota dan Nanga Rema), Kecamatan Lamba Leda bagian timur; dan
- Akuifer dengan produksi kecil setempat berarti meliputi Kecamatan Lamba Leda bagian barat, Poco Ranaka dan Sambu Rampas bagian selatan.

6. Kondisi Klimatologi

a) Tipe Iklim

Tipe Kabupaten Manggarai Timur memiliki tipe “moonsonal” atau memiliki satu puncak hujan. Tipe ini dipengaruhi oleh angin kering dari Australia menyebabkan konvergensi awan tidak seintens. Tipe ini bercirikan musim kemarau berlangsung cukup lama hingga 8 (delapan) bulan, sementara rata-rata musim hujan hanya berlangsung 4 (empat) bulan.

b) Curah Hujan

Wilayah Kabupaten Manggarai Timur pada umumnya mempunyai iklim dan curah hujan yang tidak merata. Curah hujan pada daerah-daerah lain relatif rendah. Perolehan mengenai iklim/curah hujan erat kaitannya dengan pengadaan air, terutama dalam penentuan musim tanam dan pemilihan usaha tani di wilayah tersebut. Sedangkan keadaan hidrologinya berperan dalam hal distribusi air yang dimungkinkan pada wilayah itu. Wilayah Kabupaten Manggarai Timur pada umumnya mempunyai iklim dan curah hujan yang tidak merata. Besarnya curah hujan tahunan rata-rata 716.3 mm / tahun dan hari hujan 34,5 hari hujan. Curah hujan yang tertinggi terdapat di daratan yang mempunyai ketinggian diatas 1.000 meter di atas permukaan air laut, sedangkan curah hujan pada daerah-daerah lain relatif rendah.

Tabel 2.4. Curah Hujan Menurut Jumlah dan Kecamatan Tahun 2012

Bulan	Curah Hujan (mma)					
	Borong (+Ranamese)	Kota Komba	Elar (+ Elar Selatan)	Sambi Rampas	Poco Ranaka (+ Poranti)	Lambaleda
Januari	43,5	500,50	0	68,00	387	478,40
Februari	46,3	263,50	3	770,00	438	533,46
Maret	30,3	415,00	606	310,00	532	432,10
April	135,6	179,90	362	0,00	490	45,70
Mei	22,2	343,20	34	0,00	114	138,05
Juni	6,7	0,00	0	0,00	24	0,00
Juli	1,2	0,00	0	0,00	0	0,00
Agustus	0,3	0,00	0	0,00	0	0,00
September	36,1	0,00	29	0,00	10	0,00
Oktober	125,0	77,50	129	0,00	159	639,00
November	111,4	212,2	410,5	0	164	161,4
Desember	144,5	301,5	260	230	200	442

Sumber : BPS Manggarai Timur, 2013

c) Suhu

Suhu di Kabupaten Manggarai Timur berkisar antara 24^o-32^oC pada daerah pesisir (Kecamatan Borong, Kota Komba, Sambi Rampas dan Lamba Leda) dan 16^o-28^oC pada pegunungan (Kecamatan Poco Ranaka, Poco Ranak Timur, Elar dan Elar Selatan).

d) Kelembaban

Menurut LR. Oldeman yang membagi wilayah dalam zona-zona agroklimatik yaitu berdasarkan kriteria bulan basah (lebih dari 200 mm / bulan) dan bulan kering (kurang dari 100 mm / bulan) menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur cenderung termasuk dalam wilayah basah. Pada daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m di atas permukaan laut, bulan basah antara bulan Oktober – Mei (8 bulan), sedangkan pada daerah pantai, bulan basah antara bulan Desember – Maret (4 bulan).

7. Penggunaan Lahan

a) Kawasan Budidaya

Kontribusi terbesar penggunaan lahan kawasan budi daya di Kabupaten Manggarai Timur merupakan perkampungan, sawah, tegalan/ladang dan perkebunan. Kebanyakan lahan yang digunakan di Kabupaten Manggarai Timur adalah lahan tegalan/ladang. Sedangkan lahan yang jarang digunakan adalah lahan perkebunan. Tabel II. 5 memperlihatkan kondisi penggunaan Lahan di Kabupaten Manggarai Timur.

b) Kawasan Lindung

- Kawasan Hutan Lindung: Kawasan yang termasuk dalam kategori kawasan hutan lindung di Kabupaten Manggarai Timur tersebar pada :
 - 1) kawasan hutan Puntu II RTK 19 Kecamatan Lamba Leda;
 - 2) kawasan hutan Pota RTK 101 Kecamatan Sambi Rampas;

- 3) kawasan hutan Ndeki Komba RTK 115 Kecamatan Kota Komba;
 - 4) kawasan hutan Sawe Sange RTK 141 Kecamatan Elar;
 - 5) kawasan hutan Ngada Wolo Merah RTK 142 Kecamatan Elar.
- Daerah Resapan Air
Kawasan resapan air di Kabupaten Manggarai Timur terletak di Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam RTK 118 di kecamatan Poco Ranaka, Elar, Sambi Rampas, Borong dan Kota Komba.
 - Kawasan Sempadan Pantai
Sempadan pantai di Kabupaten Manggarai Timur berada di sepanjang pantai Kecamatan Borong, Kecamatan Kota Komba, Kecamatan Elar, Kecamatan Sambi Rampas, dan Kecamatan Lamba Leda.

Tabel 2.5. Penggunaan Lahan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013

KECAMATAN	LUAS WILAYAH		PERKAMPUNGAN	SAWAH		TEGALAN	PERKEBUNGAN	KEBUN CAMPURAN	HUTAN			SEMAK/PADANG RUMPUT	DANAU	LAIN NYA	
	Luas	%		2 X	1 X				Lebat	Belukar	Sejenis				
01.	Borong	28.202	11,20	97	114	292	2.872	43	3.357	6.810	4.167	694	9.612	144	0
02.	Rana Mese	20.824	8,27	72	84	216	2.121	31	2.355	5.029	3.077	513	7.220	106	-
03.	Poco Ranaka	10.501	4,17	46	179	697	984	376	1.308	2.113	706	252	3.797	38	5
04.	P. R Timur	10.423	4,14	46	177	692	977	374	1.298	2.097	700	251	3.769	37	5
05.	Lamba Leda	35.943	14,27	261	150	492	3.255	75	2.467	9.351	2.848	145	16.864	35	0
06.	S. Rampas	40.009	15,89	107	72	482	5.144	75	3.581	11.655	16.157	125	2.561	50	0
07.	Elar	32.825	13,03	126	150	68,0	1.520	20,0	2.105	483,0	16.139	141,0	11.937	136	0
08.	Elar Selatan	23.9343	9,50	92	110	49,0	1.108	15	1.535	352	11.767	103	8.704	99	0
09.	Kota Komba	49.194	19,52	72	0	2.754	3.847	1.198	1.196	980	8.993	245	31.092	15	0
Jumlah		251.855	100	919	1.036	5.742	21.828	1.009	19.202	38.870	64.554	2.469	95.556	660	10

Sumber: Manggarai Timur Dalam Angka Tahun 2013.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah potensial untuk kepentingan pengembangan wilayah, khususnya kawasan budidaya menyebarkan di beberapa kawasan strategis yaitu:

- a. **Kawasan Buntal**, sebagai daerah yang berpotensi dalam menampung kegiatan yang berskala regional yang sudah merupakan strategi atau kebijakan regional berupa pengembangan wilayah transmigrasi dan kegiatan pertanian.
- b. **Kawasan Perkotaan Borong**, sebagai kawasan yang memegang peran penting di bagian selatan dengan sektor pertanian, industri dan perdagangan, jasa-jasa. Memiliki fasilitas yang berskala regional seperti pendidikan, kawasan pariwisata, dan menjadi titik penting pertumbuhan kawasan serta penghubung transportasi Ruteng-Ende melalui wilayah selatan.
- c. **Kawasan Mano dan sekitarnya**, sebagai kawasan di bagian barat yang secara lokasi berperan strategis sebagai simpul distribusi, mempunyai wilayah belakang cukup luas juga, selain itu bila kawasan ini berkembang akan dapat mempersempit perbedaan perkembangan jalur utara dan selatan. Sektor-sektor yang cukup berkembang adalah agroindustri di samping pertanian dan pariwisata .

- d. **Kawasan Pengembangan Terpadu Pota dan Dampek**, memiliki kekuatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa serta perikanan. Mempunyai fasilitas pelabuhan, dan berada pada koridor jalur Pantura sehingga mempunyai kesempatan aglomerasi sebagai akibat dari faktor pendorong dari dalam wilayah dan faktor penarik dari wilayah di sekitarnya. Pengembangan kawasan pengembangan terpadu Pota dan Dampek dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan kelautan yang terdapat di wilayah utara yang pemanfaatannya relatif tertinggal.
- e. **Kawasan Pengembangan Terpadu Kota Komba**, upaya pengembangan kawasan bahari terpadu di Kabupaten Manggarai Timur dilatarbelakangi oleh keberadaan potensi pertanian, pariwisata, perikanan laut yang cukup besar, potensi wisata pantai serta letak kawasan di sekitar jalur distribusi/transportasi utama, namun potensi-potensi tersebut belum dikelola secara baik akibat belum memadainya/tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- f. **Kawasan Strategis Perbatasan**
Kawasan strategis perbatasan yang dimaksud pada Kabupaten Manggarai Timur adalah kawasan strategis antar kabupaten. Perbatasan ini terletak pada batas wilayah antara Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterpaduan dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan pemanfaatan potensi-potensi pembangunan yang terletak di wilayah perbatasan.

Sektor-sektor unggulan yang kembangkan dalam kegiatan kerjasama pengembangan kawasan perbatasan terutama adalah sektor wisata, industri, perikanan dan pertanian. Kawasan-kawasan prioritas pengembangan wilayah perbatasan antara lain adalah:

- Elar-Riung antara Kabupaten Mangarai Timur dengan Kabupaten Ngada
- Gising–Kalang Mahit antara Kabupaten Mangarai Timur dengan Kabupaten Ngada
- Wae Wole-Aimere antara Kabupaten Mangarai Timur dengan Kabupaten Ngada
- Dampek-Reok antara Kabupaten Mangarai Timur dengan Kabupaten Manggarai
- Benteng Jawa-Cibal antara Kabupaten Mangarai Timur dengan Kabupaten Manggarai
- Mano-Ruteng antara Kabupaten Mangarai Timur dengan Kabupaten Manggarai
- Iteng-Borong antara Kabupaten Mangarai Timur dengan Kabupaten Manggarai.

Selain kawasan strategis diatas, berdasarkan RTRW Kabupaten Manggarai Timur ditetapkan Wilayah Pembangunan (WP). Ini dilakukan dengan mempertimbangkan pola keterkaitan dan kesamaan (homogenitas) setiap kawasan. Pembagian WP dalam kerangka pengembangan wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut :

a. **Wilayah Pembangunan Selatan (I)**

Pusat pengembangan dan pelayanan WP selatan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah di Kecamatan Borong dengan daerah pelayanannya meliputi wilayah Kecamatan Rana Mese Kecamatan dan sebagian Kecamatan Kota Komba. WP selatan mempunyai sektor prioritas di bidang sektor listrik, gas dan air bersih, sektor angkutan/komunikasi dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor penggalan, sektor industri dan sektor perdagangan.

b. Wilayah Pembangunan Tengah-Barat (II)

Pusat pengembangan dan pelayanan WP Barat di wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah di Mano dengan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Poco Ranaka dan Kecamatan Poco Ranaka Timur dan beberapa desa di Kecamatan Lambaleda. WP Barat mempunyai sektor prioritas di bidang penggalian, sektor industri dan sektor perdagangan. Sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor angkutan/komunikasi.

c. Wilayah Pembangunan Tengah-Timur (III)

Pusat pengembangan dan pelayanan WP Timur di wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah di Langko Elar dengan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Elar Selatan dan sebagian desa di Kecamatan Sambi rampas. WP Timur mempunyai sektor prioritas di bidang penggalian dan sektor perdagangan. Sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor industri, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor angkutan/komunikasi.

d. Wilayah Pembangunan Utara (IV)

Pusat pengembangan dan pelayanan WP Utara di wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah di Pota dengan daerah pelayanannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Lambaleda. WP Utara mempunyai sektor prioritas di bidang pertanian, sektor penggalian, sektor industri dan sektor perdagangan. Sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor angkutan/komunikasi.

Pembagian wilayah pengembangan tersebut bertujuan agar mampu mempengaruhi perkembangan daerah disekitarnya baik perkembangan secara ekonomi, sosial maupun budaya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan berupa penambahan akses maupun fasilitas-fasilitas pendukung sehingga dalam kedudukannya sebagai ibu kota kabupaten Manggarai Timur yaitu Kecamatan Borong mampu melayani kebutuhan masyarakat dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya di wilayah itu sendiri maupun wilayah disekitarnya.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Manggarai Timur mempunyai potensi bencana alam, yang mencakup tanah longsor, banjir, gelombang pasang, kebakaran. Kejadian bencana alam dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 2.6. Jenis Bencana Alam di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2010-2012

NO	JENIS BENCANA	TAHUN		
		2010	2011	2012
1	Tanah longsor	2	1	2
2	Angir Topan	1	2	0
3	Banjir	7	6	8
4	Kekeringan	8	12	10
5	Kebakaran	21	20	18

Sumber Data: BPBD Kab. Manggarai Timur, 2013

Kejadian bencana alam yang sangat parah terjadi di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2007 adalah bencana tanah longsor yang melanda seluruh enam kecamatan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya curah hujan tinggi dan intensitas hujan yang cukup tinggi serta bentangan

alam sebagian besar berlereng (> 40%). Selain itu perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan melalui pembalakan hutan secara besar – besaran merupakan salah satu faktor terjadinya bencana alam tanah longsor. Berikut adalah beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Manggarai Timur.

1. Untuk bencana alam banjir, seringkali terdapat di daerah pinggir pantai tepatnya di Kecamatan Borong dan Ranamese (bagian wilayah selatan Kabupaten Manggarai Timur).
2. Untuk kawasan rawan bencana gunung berapi terletak di Kecamatan Poco Ranaka dan Ranamese.
3. Kawasan rawan bencana pergerakan tanah terdapat di Kecamatan Lamba Leda, Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, Elar dan Lear Selatan
4. Kawasan Rawan bencana angin topan terdapat di Kecamatan Ranamese, Borong, Kota Komba, Elar dan Elar Selatan.
5. Kawasan Rawan bencana kebakaran menyebar diseluruh wilayah kecamatan.

2.1.4. Demografi

1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Kabupaten Manggarai Timur memiliki luas wilayah 2.518,55 Km² dengan jumlah penduduk 263.142 jiwa pada tahun 2013, terdiri laki-laki berjumlah 132.542 jiwa, perempuan 130.600 jiwa. Secara umum distribusi penduduk dan tingkat kepadatannya relative tidak merata jika dilihat dari kepadatan penduduk. Di beberapa kecamatan distribusinya cenderung meningkat. Distribusi penduduk Kabupaten Manggarai Timur terfokus di Kota Borong sebagai pusat pertumbuhan Kabupaten dengan jumlah penduduk sebesar 48.702 jiwa dan jumlah penduduk paling rendah dimiliki oleh kecamatan Elar yaitu 15.006 jiwa.

Berdasarkan data kependudukan dan catatan Sipil Tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur sebesar 248 655 jiwa. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk tahun 2013 meningkat setiap tahun mengikuti fungsi eksponensial, seperti dijelaskan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Penduduk di Kabupaten Manggarai Timur Periode 2009 - 2013

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (ORANG)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Borong	57 659	59 876	61 959	36.076	41.516
Kota Komba	46 254	46 898	47 678	48 702	54.773
Elar	30 066	31 937	31 248	15 006	15.882
Sambi Rampas	25 595	27 226	26 795	26 265	29.386
Poco Ranaka	57 448	59 193	32 274	32 547	34.875
Lambaleda	31 633	31 801	58 230	33 818	35.750

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (ORANG)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Rana Mese	.*	.*	.*	27 081	30.114
Poco Ranaka Timur	.*	.*	.*	26 582	28.085
Elar Selatan	.*	.*	.*	17 065	18767
Jumlah	248 655	258 931	260 184	263 142	289.148

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan data tahun 2012, penduduk Kabupaten Manggarai Timur mayoritas memeluk agama Katolik yaitu sebesar 91,12%, kemudian penduduk yang memeluk agama islam yaitu sebesar 8,37%, penduduk yang memeluk agam protestan 0,48% dan yang memeluk agama hindu 0,03%. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut agama.

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Penduduk di Kabupaten Manggarai Timur Periode 2009 - 2012

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Jumlah
	Katolik	Protestan	Islam	Hindu	Budha	
01. Borong (+Ranamese)	56.353	908	5.862	34	0	63.157
03. Poco Ranaka (+Poranti)	59.035	17	77	0	0	59.129
05. Lamba Leda	31.484	16	2.318	0	0	33.818
06. Sambu Rampas	17.800	6	8.459	0	0	26.265
07. Elar (+Elar Selatan)	27.334	119	4.594	24	0	32.071
09. Kota Komba	47.768	207	713	14	0	48.702
Jumlah	239.774	1.273	22.023	72	0	263.142

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Kabupaten Manggarai Timur periode tahun 2008–2013 mengalami peningkatan, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB pada tahun 2013 mencapai 1.305,553.61 Juta atau mengalami kenaikan sebesar 623.528,63 juta atau naik 91 % dari tahun 2008. Sedangkan PDRB ADHK tahun 2013 sebesar Rp 449,827.69 mengalami peningkatan sebesar 98,895.50 juta atau mengalami kenaikan 28,2 % dibandingkan pada tahun 2008, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9. PDRB Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000, Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2013 (Juta Rupiah)

SEKTOR	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
Pertanian	230.837,77	240.575,83	247.317,71	254.422.66	265,144.07	275,475.98
Pertambangan danPenggalian	6.917,53	7.270,85	7.728,23	8,317.85	8,987.46	9,617.08
Industri Pengolahan	2.185,04	2.265,16	2.322,54	2,380.67	2,443.99	2,507.75
Listrik, Gas, dan Air bersih	153,55	163,69	177,35	192.49	209.92	226.42
Bangunan	23.157,77	25.129,17	26.763,07	28,712.03	31,255.91	33,447.34
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	43.321,01	46.545,91	50.628,43	54,771.13	59,164.89	64,479.80
Pengangkutan dan Komunikasi	4.351,99	4.508,21	4.687,59	4,876.62	5,085.69	5,269.26
Keuangan,Persewaan & Jasa Perusahaan	5.592,65	5.911,26	6.235,96	6,593.20	6,998.91	7,339.88
Jasa-Jasa	34.416,88	36.912,38	39.920,60	43,490.51	47,344.62	51,464.18
PDRB DNG MIGAS	350.932,19	369.280,46	385.779,49	403,757.15	426,635.46	449,827.69
PDRB TANPA MIGAS	350.932,19	369.280,46	385.779,49	403,757.15	426,635.46	449,827.69

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur. Keterangan **) angka sangat sementara

*) angka sementara

Tabel 2.10. Produk Domestik Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 – 2013 (Juta Rupiah)

SEKTOR	2008	2009*	2010**	2011*	2012**	2013**
Pertanian	438.970,42	489.469,25	541.002,13	607,012.93	689,997.63	783,008.47
Pertambangan danPenggalian	13.422,22	15.180,40	17.553,33	20,538.58	24,012.66	27,991.74
Industri Pengolahan	4.606,38	4.967,81	5.576,25	6,156.01	6,875.99	7,670.09
Listrik, Gas, dan Air bersih	320,25	343,30	381,46	426.71	489.49	556.00
Bangunan	36.834,69	43.913,19	51.077,51	59,856.48	71,276.30	83,247.95
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	83.306,26	96.243,22	115.105,66	136,295.85	161,382.14	193,362.46
Pengangkutan dan Komunikasi	7.818,96	8.222,55	8.769,73	9,368.29	10,094.69	10,872.76
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	10.350,58	11.557,52	13.125,82	14,895.31	16,987.07	19,201.97
Jasa-Jasa	86.395,23	97.124,29	113.694,80	132,477.53	154,246.35	179,642.17
PDRB DNG MIGAS	682.024,98	767.021,54	866.286,71	987,027.70	1,135,362.33	1,305,553.61
PDRB TANPA MIGAS	682.024,98	767.021,54	866.286,71	987,027.70	1,135,362.33	1,305,553.61

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur.

Keterangan **) angka sangat sementara. *) angka sementara

Manggarai Timur dapat dikatakan mengalami pertumbuhan dengan indikasi peningkatan PDRB dari tahun 2008-2013, dapat diketahui bahwa pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2012 dengan angka 462.692,73. Sektor paling tinggi dalam menyumbang PDRB tersebut adalah Sektor Pertanian dengan rata-rata sumbangan sebesar 243.120,37 tiap tahunnya. Berdasarkan penggunaannya, PDRB Kabupaten Manggarai Timur didominasi oleh konsumsi rumah tangga lebih dari 50 persen, sedangkan pembentukan modal tetap bruto tidak lebih dari 15.42 persen.

**Tabel 2.11. PDRB Kab. Manggarai Timur Menurut Penggunaan Tahun 2010 – 2012
(Juta rupiah)**

Rincian	2010	2011*	2012**
Atas Dasar Harga Berlaku			
Konsumsi Rumah Tangga	90,178.41	37,147.26	584,821.00
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	16,018.04	18,113.38	20,198.69
Konsumsi Pemerintah	156,030.62	183,253.81	238,553.90
Pembentukan Modal Tetap Bruto	112,388.77	126,919.12	152,154.07
Perubahan Stok	60,804.70	67,665.02	72,364.75
Ekspor Barang dan Jasa	166,702.69	182,686.99	197,219.44
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	235,101.69	249,498.88	278,284.13
PDRB	767,021.54	866,286.71	987,027.70
Atas Dasar Harga Konstan			
Konsumsi Rumah Tangga	286,547.89	297,925.57	311,747.01
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	8,739.78	9,423.66	10,154.81
Konsumsi Pemerintah	81,368.78	81,826.38	87,805.80
Pembentukan Modal Tetap Bruto	56,040.62	64,480.08	71,075.43
Perubahan Stok	21,117.53	22,797.94	24,010.97
Ekspor Barang dan Jasa	90,556.09	96,812.33	103,558.13
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	175,090.22	187,486.47	204,595.00
PDRB	369,280.46	385,779.49	403,757.15

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur Keterangan **) angka sangat sementara *) angka sementara

**Tabel 2.12. PDRB Kab. Manggarai Timur Menurut Penggunaan Tahun 2010 – 2012
(persen)**

RINCIAN	2010	2011*	2012**
Atas Dasar Harga Berlaku			
Konsumsi Rumah Tangga	63.91	62.01	59.25
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2.09	2.09	2.05
Konsumsi Pemerintah	20.34	21.15	24.17
Pembentukan Modal Tetap Bruto	14.65	14.65	15.42
Perubahan Stok	7.93	7.81	7.33
Ekspor Barang dan Jasa	21.73	21.09	19.98
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	30.65	28.8	28.19
PDRB	100	100	100
Atas Dasar Harga Konstan			
Konsumsi Rumah Tangga	77.6	77.23	77.21

RINCIAN	2010	2011*	2012**
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2.37	2.44	2.52
Konsumsi Pemerintah	22.03	21.21	21.75
Pembentukan Modal Tetap Bruto	15.18	16.71	17.6
Perubahan Stok	5.72	5.91	5.95
Ekspor Barang dan Jasa	24.52	25.1	25.65
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	47.41	48.6	50.67
PDRB	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur Keterangan **) angka sangat sementara *) angka sementara

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2012 mencapai 5,68 persen atau tertinggi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. Jika dilihat dari pertumbuhan tiap-tiap sektor ekonomi terlihat bahwa pada tahun 2012 semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif walaupun terdapat beberapa sektor yang tumbuh tidak sebesar tahun sebelumnya. Sektor pertanian kembali tumbuh setelah tumbuh kecil pada tahun 2010. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tercatat laju pertumbuhan sektor ini meningkat dari 3,70 persen di tahun 2008 menjadi 10,32 persen tahun 2010. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 2,66 persen. Sektor pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Manggarai Timur hanya mampu tumbuh sebesar 3,63 persen pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 0,92.

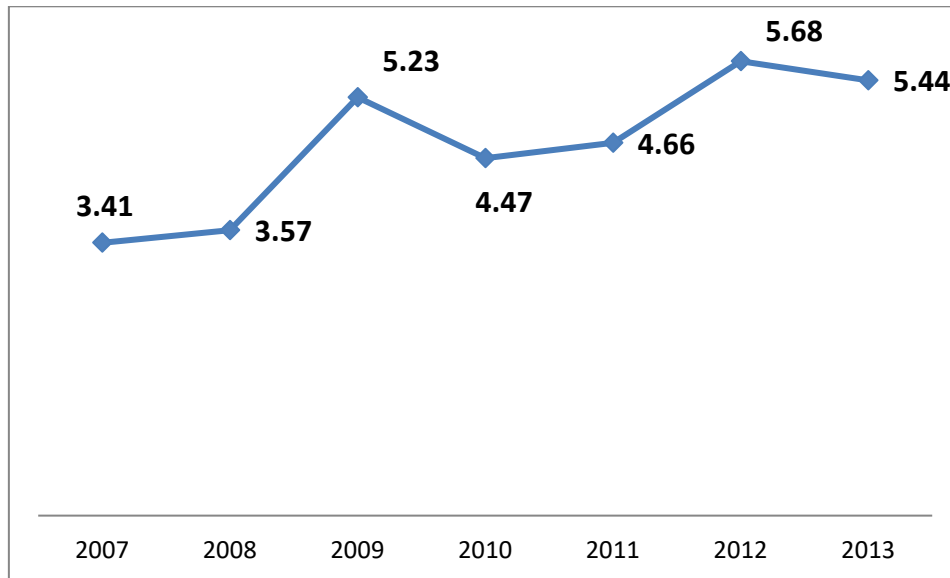
Tabel 2.13. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007 – 2010 (Persen)

Sektor	2008	2009	2010	2011*	2012**	2013**
Pertanian	3.64	4.22	2.80	2.71	4.21	3.90
Pertambangan & penggalian	3.85	5.11	6.31	7.63	8.05	7.01
Industri pengolahan	3.10	3.67	2.49	2.55	2.66	2.61
Listrik, gas & air bersih	2.41	0.00	8.35	8.53	9.06	7.86
Bangunan	1.75	0.00	6.50	7.28	8.86	7.01
Perdag., hotel & restoran	3.70	8.38	8.77	8.97	8.02	8.98
Pengangkutan & komunikasi	3.04	14.44	3.98	4.03	4.29	3.61
Keu. Persewaan, & jasa perusahaan	3.70	5.70	5.49	5.73	6.15	4.7
Jasa-jasa	4.23	7.25	8.15	8.94	8.86	8.70

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur

Keterangan **) angka sangat sementara

*) angka sementara

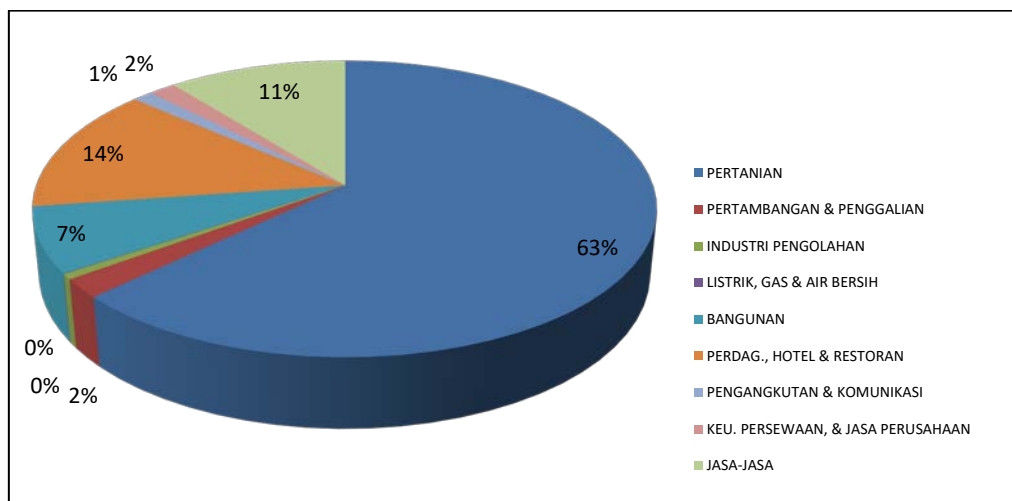


Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2007 – 2013 (Persen)

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur

3. Struktur Ekonomi

Selama tahun 2010 – 2013 terdapat sektor-sektor yang secara kontinyu memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Manggarai Timur. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa-jasa, dan sektor bangunan. Sektor pertanian memberikan kontribusi paling besar diantara keempatnya dan diantara seluruh sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Sementara itu, sektor yang memberikan kontribusi paling kecil dalam perekonomian Kabupaten Manggarai Timur adalah sektor listrik, gas, dan air bersih.



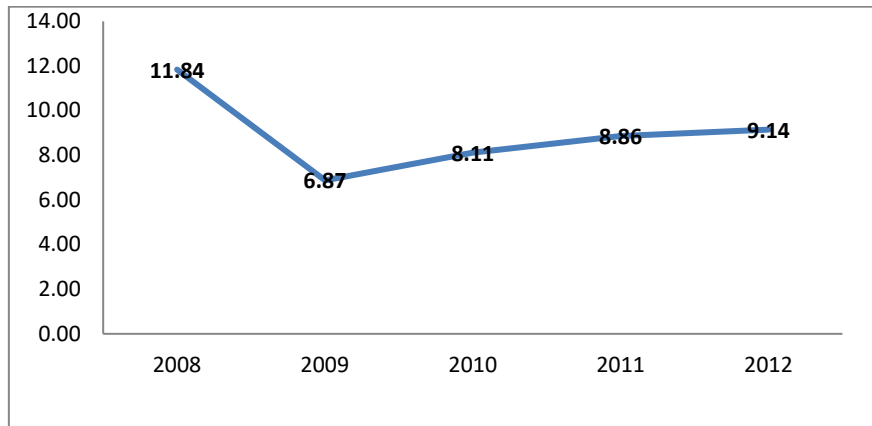
Gambar 2.3 Rata-rata Distribusi PDRB Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2010 – 2012

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur

a) Inflasi

Laju inflasi sebagai ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli

masyarakat dengan mengambil Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan perkembangan sebagaimana gambar II.4 berikut.



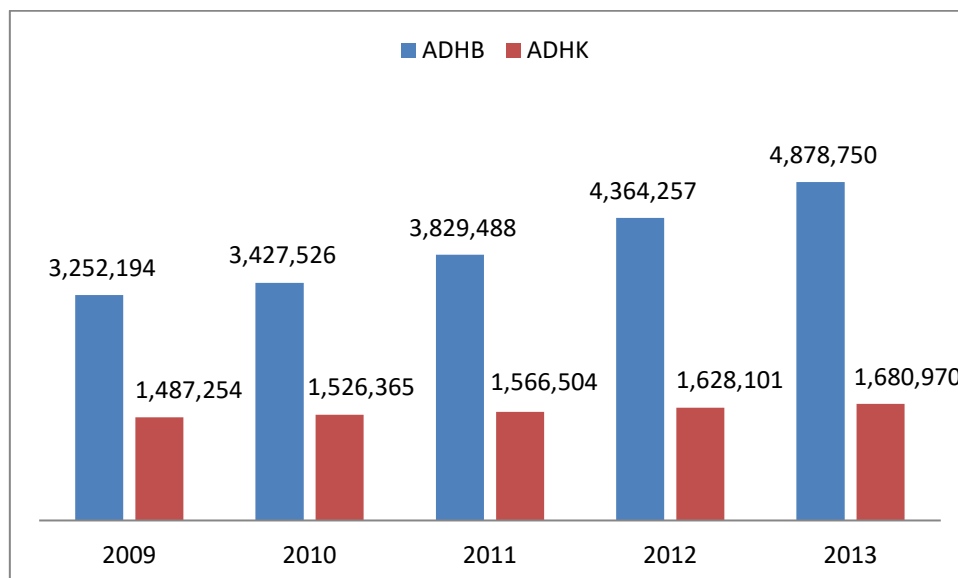
Gambar 2.4 Tingkat Inflasi PDRB di Kab. Manggarai Timur Tahun 2008 – 2012 (Persen)

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, diolah.

Pada tahun 2012 terjadi inflasi PDRB Kabupaten Manggarai Timur sebesar 9,14 persen naik dari inflasi PDRB tahun sebelumnya sebesar 8,86 persen. Walaupun meningkat dengan selisih 0,28 nilai ini masih digolongkan sebagai inflasi ringan (di bawah 10 % per tahun). Berdasarkan kelompok sektor pada tahun 2012 inflasi tertinggi terjadi pada sektor pertanian mencapai 9,24 persen sedangkan inflasi terendah terdapat pada sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 5,62 persen.

b) PDRB Perkapita

PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan harga konstan yang menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal mampu meningkat menjadi Rp 1.680.970 per tahun di tahun 2013.



Gambar 2.5 PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 – 2013 (Rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur

c) **Tingkat Kemiskinan**

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan. Persentase dan jumlah penduduk miskin serta garis kemiskinan, Kabupaten Manggarai Timur berada pada peringkat 19 dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tabel 2.14. Jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan Tahun 2009 – 2012 di Kabupaten Manggarai Timur

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rupiah)
2009	25,51	74,49	161.358
2010	25,94	74,06	182.641
2011	24,52	75,48	205.486
2012	24,59	75,41	231.188

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

a) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Manggarai Timur Selama periode 2008-2013, capaian angka melek huruf (AMH) cukup mengalami peningkatan cukup signifikan. Peringkat AMH pada tahun 2013 berada di posisi 91,04%, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang berada di tingkat 77,54%. Walaupun demikian di tahun 2013 masyarakat Kabupaten Manggarai Timur masih ada yang buta huruf (8, 06%). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia.

b) Rata-Rata Lama Sekolah

Berdasarkan data survey pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2008 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 6,01 tahun. Ini berarti bahwa sebagian besar penduduk usia produktif di Kabupaten Manggarai Timur hanya berpendidikan SD. Kondisi ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2010 telah mengalami peningkatan sebesar 0,48 tahun menjadi 6,49 tahun.

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tahun 2010 sebesar 65,92, meningkat dari 64,58 pada tahun 2008. Berdasarkan peringkat regional, indeks pembangunan manusia Kabupaten Manggarai Timur berada pada peringkat 15 dari 22 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada di urutan 450 dalam skala nasional, sehingga

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Manggarai Timur masih tergolong rendah namun ada kecenderungan IPM meningkat.

Tabel 2.15. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Manggarai Timur 2009 -2012

URAIAN	SATUAN	2008	2009	2010	2011	2012
IPM		64,58	65,02	65,92	66,55	67,06
AHH	Th	67,00	67,30	67,57	67,84	68,12
Rata-rata Lama Sekolah	Th	6,01	6,20	6,49	6,49	6,53
AMH	%	90,89	91,7	91,09	92,39	95,71
Pengeluaran Perkapita disesuaikan	Rp		581.850	583.650	584.950	589.320
Peringkat provinsi		15	15	15	-	-
Peringkat Nasional		450	450	450	-	-

Sumber, BPS Provinsi NTT, 2013

2. Kesehatan

a) Angka Harapan Hidup (AHH)

Kualitas sumber daya manusia secara utuh dapat dilihat dari aspek fisik dan aspek non fisik. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan yaitu Angka kematian Bayi, Angka Kesakitan, Angka Harapan Hidup. Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Manggarai Timur tahun 2007 berada diposisi 66,1 tahun. Dibandingkan Angka harapan hidup orang Nusa Tenggara Timur (NTT) hasil sensus 2010, merujuk pada keadaan tahun 2006, mencapai 67,37 tahun. Sedangkan angka harapan hidup nasional adalah 70,7 persen. Dengan demikian angka harapan hidup orang NTT lebih rendah. Ini berarti secara rata-rata penduduk yang lahir pada periode rujukan akan bertahan hidup sampai umur 67,37 tahun.

Tabel 2.16. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Manggarai Timur 2008 -2013

TAHUN	ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)
2007	66,1
2008	67
2009	67,30
2010	67,57
2011	67,84
2012	68,12

Sumber : DDA 2013

b) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2008 sebesar 12.63 per 1000 kelahiran hidup. Di tahun 2013 angka kematian bayi mengalami penurunan menjadi 10.81 per 1000 kelahiran hidup. Jika dilihat dalam waktu yang relatif panjang, yaitu dari tahun 2008 ke 2013, AKB Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Tabel 2.17. Banyaknya Bayi yang lahir Hidup dan Lahir Mati di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013

KECAMATAN	LAHIR HIDUP	LAHIR MATI
Borong	1357	23
Kota Komba	1020	26
Elar	547	16
Sambi Rampas	434	13
Poco Ranaka	1191	28
Lamba Leda	670	4
Jumlah / Total	5219	110

Sumber: Manggarai Timur Dalam Angka, 2013

c) Persentase Balita Gizi Buruk

Pada Tahun 2010 kecamatan Pocoranaka merupakan kecamatan dengan jumlah tertinggi untuk kasus ditemukannya gizi buruk sebesar 84 jumlah balita, diikuti oleh kecamatan Borong sebesar 70 jumlah balita. Dibandingkan tahun 2009 terjadi penurunan jumlah balita gizi buruk dari 441 jumlah balita gizi buruk menjadi 367 jumlah balita gizi buruk. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 75 % dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2013. Untuk kinerja cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Manggarai Timur sudah mencapai tingkat yang optimal, dimana dari periode 2008 hingga 2013 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya.

Tabel 2.18. Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA KESEHATAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	12.63	13.51	11.55	15.16	11.64	10.81
Angka kematian balita per 1.000 KH	1.60	2.25	1.01	1.18	0.83	0.67
Angka kematian ibu per 1.000 KH	3.01	3.07	3.44	2.75	2.00	2.00
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	75	75	100	100	100	100

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

3. Ketenagakerjaan

Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Manggarai Timur dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

a) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu

daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar jumlah tenaga suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut. Analisis terhadap indikator ini belum dapat dilaksanakan karena belum adanya investasi PMA/PMDN di Kabupaten Manggarai Timur.

b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan publikasi ILO (Internasional Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia penduduk usia 15 tahun atau lebih , seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Penduduk Kabupaten Manggarai Timur yang termasuk kategori penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) tercatat sebanyak 120.803 jiwa pada tahun 2010, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007 sebesar 125.966 jiwa. Pada tahun 2010 TPAK laki-laki di Kabupaten Manggarai Timur mencapai 88,78 % dan perempuan mencapai 70,65 dari total 120 238 angkatan kerja, sisanya adalah pengangguran sebesar 565 jiwa. Penurunan ini bukan disebabkan menurunnya jumlah pekerja namun lebih dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk bukan angkatan kerja seperti anak sekolah, ibu rumah tangga dan lainnya. Sementara meningkatnya angka pengangguran di tahun 2010 di karenakan lamanya hari hujan yang berlangsung sepanjang tahun 2010 sehingga menyebabkan berkurangnya usaha pertanian, industri dan transportasi akibatnya banyak tenaga kerja yang berusaha pada sector tersebut kehilangan lapangan kerja. Pada tahun 2012 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun dibandingkan tahun 2010 sebesar 2.4%. Hal ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja di sejumlah sektor perekonomian.

Tabel 2.19. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Manggarai Timur, 2010

Jenis Kegiatan Utama	2010	2011	2012
I. Angkatan Kerja	120 803	120 990	124 672
1. Bekerja	120 238	117 587	122 100
2. Penganggur	565	3 403	2572
II. Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, dan Lainnya)	31 257	39 197	37 151
Jumlah	152 060	160 187	161 823
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	79.44	75.53	77.04
Tingkat Pengangguran Terbuka	0.47	2.81	2.06

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2012

c) Kesempatan Kerja

Menurut lapangan usaha, penduduk Kabupaten Manggarai Timur masih menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian yang tercatat sekitar 103 611 jiwa dari 120 238 jiwa penduduk yang bekerja. Dengan demikian sektor pertanian menyerap tenaga kerja sekitar 86,17 persen pada tahun 2010. Masih tingginya penduduk yang berusaha di sektor pertanian secara langsung dapat digambarkan bahwa pengembangan ekonomi kabupaten Manggarai Timur masih berorientasi kuat pada sektor pertanian. Disamping itu, tuntutan keterampilan yang kurang tinggi di sektor ini menjadikan sektor pertanian merupakan tempat berusaha bagi tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor lainnya. Hal ini dapat mendorong produktivitas pekerja di sektor pertanian lebih rendah dengan sektor lainnya. Berikut ini disajikan Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapanganusaha Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Manggarai Timur, 2012.

Tabel 2.20. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Dan Jenis Kelamin 2012

JENISKEGIATANUTAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pertanian (1)	51 943	47 691	99 634
Industri (2, 3, 4, dan 5)	8 061	5 903	13 964
Jasa-jasa (6, 7, 8, dan 9)	6 014	2 488	8 502
Jumlah	66 018	56 082	122 100

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2012 (diolah)

4. Standar Pelayanan Minimal

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang harus di peroleh setiap warga negara secara minimal. sesuai dengan amanat undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 11 ayat 4, pasal 14 ayat 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan Pelayanan dasar, baik Daerah propinsi maupaun daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/ indikator Kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang telah di ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu Sederhana, konkrit, terukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pada kurun waktu rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah fase 1 (satu) pemerintah kabupaten manggarai Timur telah berupaya seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan tuntutan regulasi yang berlaku. Dalam kebijakan anggaran kabupaten Manggarai Timur telah mengalokasikan anggaran demi tercapainya indikator –indikator SPM yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Nasional maupun daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Untuk itu, pada tabel berikut ini dibawah ini akan di gambarkan realisasi pencapaian target kinerja 15 (lima

belas bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Manggarai Timur tahun 2009 – 2013 sebagai berikut :

Tabel 2.21. Realisasi Pencapaian Target Kinerja 15 (lima belas) Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2013

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pemerintahan Dalam Negeri	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	2011	5847	5261	7879	89349	24836
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	100%	2011	7006	5584	11507	24986	2007
2.	Kesehatan								
2.1	Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	80%	2015	64,3	50,1	60,6	82,6	71,5
		Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani	98%	2015	95,5	20,1	57,8	23,9	100,0
		Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80%	2015	65,9	67,9	70,1	76,9	83,1
		Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90%	2015	83,6	76,0	98,8	90,9	90,4
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditanganl	90%	2010	89,52	93,33	90	19,75	7,4
		Cakupan kunjungan bayi	90%	2010	99,8%	79,5%	61,2	94,0	91,6
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization	70%	2010	42,1	25,6	25,6	24,4	68,2
		Cakupan pelayanan anak balita	90%	2010	48,9	66,6	76,8	82,2	88,3
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	2010	0,0	40,0	16,1	17,9	19,2
		Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2010	10,7	16,0	90,1	100,0	100,0
		Cakupan penjangingan kesehatan siswa SD dan setingkat	60%	2010	0,0	52,6	49,8	55,5	38,0
		Cakupan peserta KB Aktif	65%	2010	67,6	60,9	62,3	60,2	35,0

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit:							
		a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate/100.000 penduduk <15 Tahun	100%	2010	0,0	0,0	-	0,0	0,0
		b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100%	2010	5,9	22,0	2,2	22,8	100,0
		c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	75%	2010	10,6	14,8	2,4	20,2	12,2
		d. Penderita DBD yang di tandatangi	100%	2010	-	0,0	-	100,0	100,0
		e. Penemuan Penderita Diare	100%	2010	2,7	55,0	20,1	100,0	100,0
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	90,0	2015	73,1	67,0	42,8	63,0	56,7
2.2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	50%	2015	0,4	0,0	0,3	0,5	0,4
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	-	2015	-	0,0	-	0,0	0,0
2.3	Penyelidikan epidemiologi penanggulangan KLB	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	2015	-	0,0	-	100,0	0,0
2.4	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	100%	2015	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Sosial								
3.1	1 Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		2015					

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		2015					
3.2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		2015					
3.3	Penanggulangan korban bencana a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal Darurat Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		2015					

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				2015					
3.4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial - Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	Presentase (%) penyandang cacat fi sik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social		2015					
4.	Lingkungan Hidup								
4.1	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	2013	20%	40%	60%	80%	100%
4.2	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak bergerak	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	0%	2013	0%	0%	0%	0%	0%
4.3	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi	Prosentase luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	0%	2013	0%	0%	0%	0%	0%
4.4	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	2013	20%	40%	60%	80%	100%

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	Perumahan Rakyat								
5.1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	50	2009-2025					9,70%
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	50	2009-2025					9,70%
5.2	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	50	2009-2025					82,95
6.	Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan dan Layanan Terpadu Bagi Perempuan korban kekerasan								
6.1	Penanganan Pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100%	2014	-	100 %	100 %	100 %	100 %
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	50 %	2014	0	0	0	0	0
7.	Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera								
7.1	komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5%	3,5 %	2014	-,	2,8 %	6,7%	4,2%	3,5%

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	sejahtera (KIE KB dan KS)								
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur Peserta Kb Aktif 65 %	65 %	2014	-	83,3	79,9	80,0	67,0
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB Tidak terpenuhi (UNMET NEED)5 %	13 %	2014	-	8,1	10,6	9,2	14,4
		Cakupan anggota bina keluarga Balita (BKB) ber KB 70 %	70 %	2014	-	-	-	-	78 %
		Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87 %	-	2014	-	-	-	-	-
		Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan	2 desa/ petugas	2014	-	2 desa/ petugas	2 desa/ petugas	2 desa/ petugas	2 desa/ petugas
		rasio pembantu pembina keluarga berencana (ppkbd) 1 petugas disetiap desa/kelurahan	1 petugas per desa/kelurahan	2014	-	1 petugas per desa/ kelurahan	1 petugas per desa/ kelurahan	1 petugas per desa/ kelurahan	1 petugas per desa/ kelurahan
7.2	Penyediaan alat dan obat kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100 %	2014	-	100 %	100 %	100 %	100 %
7.3.	Penyediaan informasi data mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro KB disetiap desa/kelurahan 100% tiap tahun	100%	2014	-	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Pendidikan								

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.1	Pelayanan Pendidikan dasar oleh Kabupaten / kota	Tersedia Satuan Pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTS dari kelompok pemukiman permanen daerah terpenci	100%	2014	89,30 %	96,13 %	97,19 %	100%	100%
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTS Tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia satu ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	100%	2014	25,52 %	27,52 %	29,93 %	80,52%	57,54%
		Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik an minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100 %	2014	C	100%	100%	100%	100%
		Disetiap SD/MI dan SMP/MTS tersedia satu ruang Guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, disetiap SMP/MTS tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruangan guru	100 %	2014	10,7 %	12,2 %	11,52 %	60,64%	26,46%
		Disetiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan	100%	2014	C %	0%	0%	0%	6,25 %

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		untuk daerah khusus 4 orang guru setiap satuan pelajaran							
		Disetiap SMP/MTS tersedia satu orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100%	2014	0%	0%	0%	0%	22,92%
		Disetiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan	100%	2014	4,51%	11,28 %	11,44 %	21,24%	37,5%
		Disetiap smp/mts tersedia guru dengan kualifikasi akademiik s1 dan d4 sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 % dan 20%	100%	2014	89,47 %	91,53 %	100 %	89,52%	100%
		Disetiap SMP/MTS tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 orang untuk masing-masing 1 orang untuk mata pelajaran matematika, ipa, bahasa indonesia dan bahasa inggris	100 %	2014	7,02%	13,56 %	12,77 %	17,14%	37,5%
		Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolah SD/MI berkualifikasi akademik S1 dan D4 dan telah memiliki sertifikasi pendidik	100 %	2014	0%	0%	0%	0%	0%
		Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTS memiliki kualifikasi akademik	100 %	2014	0%	0%	0%	0%	0%

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		S1/D4 telah memiliki sertifikasi guru							
		Disetiap Kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan telah memiliki sertifikasi pendidik	100 %	2014	0%	0%	0%	0%	0%
		Pemerintah kabupaten/kota memliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, dan efisien	100 %	2014	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilaksanakan 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100 %	2014	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.2.	Pelayanan Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran bahasa indonesia, matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan 1 set untuk setiap peserta didik	100%	2014	3,76%	7,52%	19,61 %	26,14%	37,5%
		Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 set untuk setiap peserta didik	100 %	2014	7,02%	10,17 %	12,77 %	19,5%	22,92%
		Setiap SD/MI menyediakan 1 set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia	100 %	2014	0%	0%	19,61 %	39,22%	93,75%

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(globe) contoh peralatan optik, KIT IPA untuk elspereimen dasar dan poster / Carta IPA							
		setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	100%	2014	0%	0%	13,07 %	49,02%	100%
		Setiap gurusetap bekerja 37,5 jam/minggu disatuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	100 %	2014	8,7%	10,3%	17,29 %	18,6%	20,4%
		Satuan pendidikan meyenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun denga kegiatan tatap muka sebagai berikut : a. Kelas I – II : 18 Jam/perminggu b. Kelas III: 24 jam/minggu c. Kelas IV/VI: 27 Jam/minggu d. Kelas VII/IX: 27 Jam/minggu	100 %	2014	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Satuan pendidikan merapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	2014	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Setiap guru menerapkan rencana pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang dia punya	100 %	2014	82,06 %	84,5 9%	64,23 %	100 %	100 %
		Setiap guru megembangkan dan	100 %	2014	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik							
		Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 kali dalam setiap semester	100 %	2014	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Setiap Guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100 %	2014	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Kepala sekolah/madrasah melaporkan laporan hasil akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas pendidikan Kabupaten/Kota atau kantor kementerian Agama dikabupaten/kota pada setiap akhir semester	100 %	2014	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Setiap Satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100 %	2014	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Ketenaga Kerjaan								
9.1	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016					
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	60%	2016					

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		berbasis masyarakat							
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihankewirausahaan	60%	2016					
9.2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016					
9.3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016					
9.4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	2016					
9.5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016					
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	2016					
10.	Komunikasi dan infomasi								
10.1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi NasionalMelalui:							
		Media massa seperti majalah, radio, dan televise	12 Kali/Tahun	2014					
		Media baru seperti website (media online)	Setiap Hari	2014					
		Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 Kali/Tahun	2014					
		Media interpersonal seperti sarasehan,ceramah/diskusi, dan lokakarya	12 Kali/Tahun di setiap Kecamatan	2014					
		Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	12 Kali/Tahun	2014					

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.2	pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Cakupan mata	50%	2014					
11	Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang								
11.1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat								
		1.persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	2019					
		2..persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70%	2019					
11.2	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat								
		3.persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	60%	2019					
		4.Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	100%	2019					
11.3	Penyerdiaan Air Minum	5. Presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81,77%	2019					
11.4	Penyediaan Sanitasi	6. Presentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memamdai	60%	2019					
		7. Presentase pengurangan sampah perkotaan	20%	2019					

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		8. presentase pengangkutan sampah	70%	2019					
		9. Presentase pengolahan TPA	70%	2019					
		10. Presentase penduduk yang terlayani sisten jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam lebih dari 2 kali setahun	50%	2019					
11.5	Penataan Bangunan dan Lingkungan	11. Presentase jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan	60%	2019					
11.6	Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan	12. Presentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%	2019					
11.7	Pengembangan Sistem Informasi Jasa Kontruksi	13. Presentase tersediannya 7 (tujuh) layanan informasi jasa kontruksi tingkat kabupaten/kota pada sistem informasi pembina jasa kontruksi (SIPJAKI)	60%	2019					
		14. Presentase tersedianya layanan ijin usaha jasa kontruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100%	2019					
11.8	Informasi Penataan Ruang	15. Presentase tersediannya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	2019					
11.9	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Presentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	50%	2019					

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Keseniaan (BUDPAR)								
12.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Keseniaan	1. Cakupan Kajian Seni 50%	100%	2014					
		2. Cakupan Fasilitas Seni 30%	100%	2014					
		3. Cakupan Gelar Seni 75%	100%	2014					
		4. Misi Keseniaan 100%	100%	2014					
12.2	Sarana Dan Prasarana	5. Cakupan Sumber Daya Manusia Keseniaan 25%	100%	2014					
		6. Cakupan Tempat 100%	100%	2014					
		7. Cakupan Organisasi 34%	100%	2014					
13	Ketahanan Pangan								
13.1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	100%	2015	84%	85%	86%	80%	76%
		2. Penguatan cadangan pangan	100%	2015	43%	45%	48%	52%	41%
13.2	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100%	2015	0%	0%	0%	0%	0%
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.	100%	2015	0%	0%	0%	0%	0%
12.3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100%	2015	84%	88%	88%	88%	88%
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan		2015	0%	0%	0%	0%	0%
13.4	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	100%	2015	0%	0%	0%	0%	0%
14	Perhubungan								
14.1	Angkutan Jalan								
		Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	2014					

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	60%	2014					
	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal pada setiap Kabupaten/Kota untuk melayani angkutan umum	40%	2014					
	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kabupaten/Kota	60%	2014					
	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	60%	2014					
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota	50%						
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota	100%						
	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota tersebut	75%						
14.2	Angkutan Sungai dan Danau								
	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia	75%	2014					

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		alur sungai dan danau yang dapat dilayari.							
		Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	40%	2014					
	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau	60%	2014					
	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota	50%	2014					
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai keahlian di bidang ASDP	50%	2014					
14.3	Angkutan Penyeberangan								
	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	60%	2014					
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan	100%	2014					

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran							
	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan atau trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	60%	2014					
	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	60%	2014					
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai keahlian di bidang ASDP	50%	2014					
14.4	Angkutan Laut								
	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	60%	2014					
	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal laut yang beroperasi pada lintas laut dalam Kabupaten/Kota.	100%	2014					
15	Penanaman Modal								

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2013)				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15.1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	3 sektor/bdang gush/tahun	2014	0%	0%	0%	0%	3%
15.2	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan :	-	-	-	-	-	-	-
		Antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 Kali/Tahun	2014	0%	0%	0%	0%	0%
15.3	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	1 Kali/Tahun	2014	0%	0%	0%	0%	0%
15.4	Pelayanan Penanaman Modal	Pendaftaran penanaman modal daerah dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP) surat ijin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja di satu kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota	33%	2014	0%	0%	33%	33%	33%
15.5	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	0%	2014	0%	0%	0%	0%	0%
15.6	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik (SPIPISE)	0%	2014					
15.7	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	9 Kali/Tahun	2014	0	0	0	6 Kali	3 Kali

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

1. Seni dan Budaya

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Jenis sanggar seni dan lingkung seni yang ada di Kabupaten Manggarai Timur juga cukup beragam. Namun hingga kini, Kabupaten Manggarai Timur masih memerlukan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif. Selain itu, apresiasi generasi muda terhadap seni dan budaya daerah dirasa masih relatif minim.

Tabel 2.22. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2008 s.d 2013

INDIKATOR SENI, BUDAYA DAN OLAH RAGA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Seni dan Kebudayaan						
Cakupan pemberian bantuan kepada sanggar seni	-	0	12	14	18	20
Jumlah Situs budaya yang diidentifikasi	-	0	1	2	3	4
Olah Raga						
Olah Raga Berprestasi	-	1	2	3	3	2
Penjaringan Atlit Olah Raga Secara Berjenjang	-	0	0	0	0	3
Meningkatkan Kualitas Olah Raga Berprestasi	-	0	0	0	0	1
Pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional (Bola Voley, Badminton, Basket)	-	0	0	0	0	10
Penyelenggaraan Kompetisi olahraga	-	0	0	0	0	1

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

2. Olah Raga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional (Bola Voley, Badminton, Basket) sangat minim, tercatat sampai tahun 2013 hanya terdapat 2 sarana.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**2.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib****1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan asset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Secara mendasar aspek pelayanan Pendidikan di

Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan peningkatan yang baik pada tahun 2013. Hal ini terlihat dari capaian kinerja pelayanan minimal pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur. Namun perlu peningkatan untuk mengejar target sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 yang mengatur standar pelayanan minimal. Perlunya pengembangan kapasitas dengan upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personal, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM pendidikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut adalah capaian kinerja pelayanan minimal.

**Tabel 2.23. Perkembangan Kinerja Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
Periode 2008-2013**

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kualitas Tenaga Pendidik						
Pelaksanaan Sertifikasi Guru	70	157	253	540	704	904
Pendidikan Dasar						
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	4	12	30	35	65	120
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	48	51	54	94	94	94
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	2	4	8	12	18	36
Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan	276	282	301	342	381	410

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :						
a) Kelas I - II : 18 jam per minggu	336	340	357	383	396	411
b) Kelas III : 24 jam per minggu						
c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu						
d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu						
Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	285	292	292	323	346	360
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	365	445	517	565	860	1028
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) orang peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru untuk setiap satuan pendidikan	-	-	-	-	-	20
Pendidika Menengah						
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	2	4	6	12	20	22
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	-	-	-	-	-	40
Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran	2	4	6	12	20	22

dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta pendidik.						
Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA.	-	-	-	60	120	300
Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	-	-	-	40	150	320

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

Pada level pendidikan pra sekolah, perkembangan angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2009-2013 mengalami kenaikan, pada tahun 2009 angka partisipasi PAUD sebesar 0,88 % sedangkan tahun 2013 menjadi 1,46 %.

a) Angka Partisipasi Sekolah

Salah indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan murid diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia formal terhadap penduduk usia sekolah. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai APS di Kabupaten Manggarai Timur selama kurun waktu 2007-2010.

Berdasarkan tabel II.19 dibawah ini menunjukkan APS usia 7-18 tahun di Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, APS kelompok usia 7-18 tahun baru mencapai 62 persen, sampai 2010 meningkat menjadi 65,35 persen. Kondisi ini masih jauh di atas provinsi sebesar 96,49 % pada tahun 2010 untuk kelompok usia 7 -12 tahun. Kenyataan tersebut menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam hal memanfaatkan fasilitas pendidikan di Manggarai Timur. Namun disisi lain harus disadari bahwa di Manggarai Timur masih ada ditemukan anak yang putus sekolah sehingga mengakibatkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun belum tuntas meskipun telah berjalan selama 16 tahun sejak dimulainya program wajib 9 tahun pada tahun 1994.

Tabel 2.24. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 tahun Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2008-2012 (Persen)

Usia Sekolah	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 tahun	63,09	63,39	65,35	68,18	70,43

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

b) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK untuk untuk jenjang pendidikan SD/MI sudah mencapai target, sedangkan SMP/MTS dan SMA/MA/MK masih dibawah 100%.

c) Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS serta SMA/MA/MK belum mencapai target 100% untuk Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2013. Bahkan untuk tingkat SD/MI mengalami penurunan pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan dari tingkat menengah ke tingkat atas.

Tabel 2.25 Hasil Kinerja Urusan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PENDIDIKAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prosentase Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH)	77.54	78.94	83.22	86.68	89.54	91.04
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	95.56	96.65	97.50	98.75	99.00	100.00
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	52.72	51.74	56.96	56.97	65.63	81.26
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA (%)	9.61	24.56	32.00	40.22	32.48	34.03
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/paket A (%)	90.78	88.55	87.90	81.17	80.91	79.96
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/paket B (%)	36.59	38.31%	42.72%	43.30%	51.55%	65.65%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA / paket C (%)	29.76	33.93	35.55	39.95	51.36	66.03

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

d) Angka Putus Sekolah (APS)

Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) dalam rentang waktu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2008 APS SD/MI berada di posisi 2.08 %, maka pada tahun 2013 menjadi hanya sebesar

0,66% atau dapat dikatakan hampir 95 % APS di tingkat SD/MI. Angka Putus Sekolah SMP/MTs juga mengalami penurunan yang berarti selama periode 2009-2013. Jika pada tahun 2009, tingkat APS SMP Manggarai Timur ada di tingkat 2.77%, maka pada tahun 2013 mengalami penurunan hanya menjadi 0,61%. Selama periode 2009-2013, Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA di Manggarai Timur juga mengalami tren penurunan, pada tahun 2008, tingkat APS SMA/ MA di Manggarai Timur ada di tingkat 1.99 %, maka pada tahun 2012 mengalami penurunan hanya menjadi 0.97 %.

Tabel 2.26 Angka Putus Sekolah (APS) Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur 2008-2013

ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	2.08	1.77	1.43	1.42	1.06	0.66
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/(%)	2.77	2.12	1.27	1.28	0.87	0.61
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA (%)	1.99	2.17	3.67	1.57	1.40	0.97

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

e) Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan (AL), diketahui bahwa angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Manggarai Timur dari mulai tahun 2009 hingga 2013 telah mencapai 100%. Untuk angka kelulusan (AL) SMP/MTs tahun 2008 sudah mencapai 89,83 % dan mengalami peningkatan menjadi 100 % di tahun 2013. Di tingkat sekolah menengah, angka kelulusan (AL) SMA/MA Manggarai Timur pada tahun 2008 mencapai 78.41% dan mengalami peningkatan menjadi 100% di tahun 2013. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua SMA/MA lulus pada Tahun 2013.

Tabel 2.27. Angka Kelulusan (AL) Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur 2008-2013

ANGKA KELULUSAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99.96	99.98	99.93	99.98	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	89.83	89.14	80.86	97.34	97,57	97,57
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	78.41	80.77	65.50	99.77	94,98	94,98

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

f) Ketersediaan Sekolah

Ketersediaan sekolah mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua usia sekolah. Selama kurun waktu 2009- 2013 jumlah ketersediaan gedung sekolah berdasarkan jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan jumlah sekolah SMP/MTs. Berbeda dengan SMA/MA, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu meningkatnya jumlah sekolah SMA/MA dan tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs.

Berikut disajikan data mengenai kondisi ketersediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah di Kabupaten Manggarai Timur per jenjang pendidikan selama kurun waktu 2009- 2013.

Tabel 2.28. Perkembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur 2008-2013

ANGKA KELULUSAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	70	170	246	298
Pembangunan Sarana kesehatan UKS	-	-	-	-	-	20
Jumlah Ruang Kelas SD/MI Layak Pakai	423	521	600	662	1122	1312
Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs Layak Pakai	186	221	262	279	312	402
Jumlah Sekolah SMP/MTs	56	58	70	90	93	96
Pendidikan Menengah						
Jumlah sekolah SMA/MA	15	17	21	27	30	34
Jumlah Ruang Kelas SMA / MA	12	15	30	52	92	120
Penyediaan Alat Peraga	-	17	0	66	106	117
Pendidikan Anak Usia Dini						
Angka Partisipasi Kasar TK/RA	0.88	1.20	1.32	1.39	1.43	1.46

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

- g) Rasio Jumlah Tenaga Pengajar dan Jumlah Murid
Rasio Jumlah Guru dan Murid kondisi saat ini secara rata rata belum memenuhi kondisi ideal. Begitu pula halnya dengan penyebaran guru juga belum merata dengan kondisi diperkotaan rasionya lebih baik daripada dipedesaan.

Tabel 2.29. Jumlah Guru PNS dan Murid Tahun 2013

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Guru PNS	Jumlah Murid	Rasio saat ini	Rasio seharusnya
1.	SD	1.403	40.593	1:29	1:15-20
2.	SMP	425	15.200	1:36	1:10-15
3.	SMA/SMK	199	6.540	1:33	1:10-15

2. Kesehatan

- a) Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk
Sejak pembentukan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2007 hingga sekarang, kabupaten ini belum memiliki rumah sakit umum daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur saat ini masih berencana untuk membuka rumah sakit. Prasarana kesehatan masih sebatas puskesmas maupun pustu yang tersebar di setiap kecamatan.

b) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu merupakan salah satu penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau kesehatan masyarakat. Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2008 mencapai 1 : 15.231. ini artinya bahwa 1 puskesmas harus melayani jumlah penduduk sebanyak 15.231 jiwa.

Demikian juga selanjutnya untuk pustu dan prasarana kesehatan lainnya, berikut adalah data secara lengkap mengenai jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten manggarai Timur selama tahun 2008. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah puskesmas dengan total 20 puskesmas dengan demikian rasio puskesmas per satuan penduduk menjadi 1:13157.

Tabel 2.30. Banyaknya Prasarana Kesehatan Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur, 2012

Kecamatan	Rs	Puskesmas	Pustu	Polindes	Poskesdes
Borong	-	4	11	2	8
Kota Komba	-	3	8	2	9
Elar	-	3	7	1	12
Sambi Rampas	-	3	7	1	6
Poco Ranaka	-	4	10	2	15
Lamba Leda	-	3	4	2	10
Jumlah / Total	-	20	47	10	60
Rasio Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes Persatuan Penduduk		1:13157	1:5598	1:36314	1:4385

Sumber : Manggarai Timur Dalam Angka, 2013

Persentase ketersediaan posyandu persatuan balita pada tahun 2009 di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 47% dan pada tahun 2013 menjadi 84.29% posyandu, berarti terjadi penambahan unit posyandu atau terdapat peningkatan . Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah antara 75 – 100 balita. Apabila 1 unit posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit posyandu.

Tabel 2.31. Hasil Kinerja urusan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase Ketersediaa	-	-	13.89	63.89	57.64	62.50

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
n Obat Sesuai Dengan Kebutuhan						
Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	6.73	6.73	6.73	7.91	7.91	7.91
Rasio puskesmas pembantu per 100.000 penduduk	18.99	18.99	18.99	18.20	18.20	18.20
Rasio dokter per jumlah penduduk (Per 100.000 Penduduk)	1.98	1.97	11.08	2.76	7.91	7.91
Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	-	-	-	7.91	7.91	7.91
Cakupan desa siaga aktif (%)	13.33	100	100	100	100	100
Cakupan Posyandu Purnama + Mandiri (%)	28.74	47.27	49.16	58.81	72.8	84.29
Rasio posyandu persatuan balita (%)	50.00	54.58	63.96	16.63	13.02	13.65
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	75	75	100	100	100	100
Cakupan bayi BGM dan KK miskin yang mendapat MP-ASI (%)	10	0	12.26	90.85	92.31	95.07
Cakupan	25	0	44.02	52.52	59.2	62.32

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sumber Air Bersih (%)						
Cakupan jamban sehat yang memenuhi syarat (%)	-	0	10.06	46.49	15.31	18.92
Cakupan pengelolaan sampah (%)	-	20.21	47.09	49.15	52.71	57.63
Cakupan SPAL yang memenuhi syarat (%)	-	10.61	61.09	46.19	59.67	79.55
Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%)	-	34.79	62.2	72.59	77.88	88.27
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	-	0.36	0.44	0.35	0.39	0.41
Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan (%)	-	21.24	21.24	69.1	80	90
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)	51.10	64	50.06	60.62	71.8	74.93
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	54.05	65.95	67.9	71.48	76.09	81.07

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cakupan pelayanan nifas (%)	75	84	93.95	98.83	100	100
Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	12.63	13.51	11.55	15.16	11.64	10.81
Angka kematian balita per 1.000 KH	1.60	2.25	1.01	1.18	0.83	0.67
Angka kematian ibu per 1.000 KH	3.01	3.07	3.44	2.75	2.00	2.00

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

Periode 2009 ke tahun 2013 rasio puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Manggarai Timur mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, di Kabupaten Manggarai Timur 1 puskesmas melayani 13157 orang penduduk. Belum tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mengindikasikan masih terbatasnya fasilitas kesehatan di Kabupaten ini. Hal ini berdampak pada sulitnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sementara dilihat dari ketersediaan SDM kesehatan, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Pada Tahun 2013, rasio dokter per satuan penduduk sudah mencapai 7,91 (per 100.000 penduduk) meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya sebesar 1,97 per 100.000 penduduk.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2009-2013 mengalami peningkatan yang cukup baik namun belum mencapai angka 100%. Jika tahun 2009 cakupannya baru mencapai 65,95%, maka pada tahun 2012 sudah mencapai 81,07%. Selanjutnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin selama 3 tahun terakhir (2011-2013) masih sangat rendah. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin belum seluruhnya mampu mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Capaian indikator SPM di urusan Kesehatan diketahui bahwa tahun 2013 sudah tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan. Namun masih banyak terdapat beberapa indikator kinerja saja yang capaiannya masih di bawah target. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

3. Pekerjaan Umum

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Berikut ini diuraikan hasil kinerja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2009-2013.

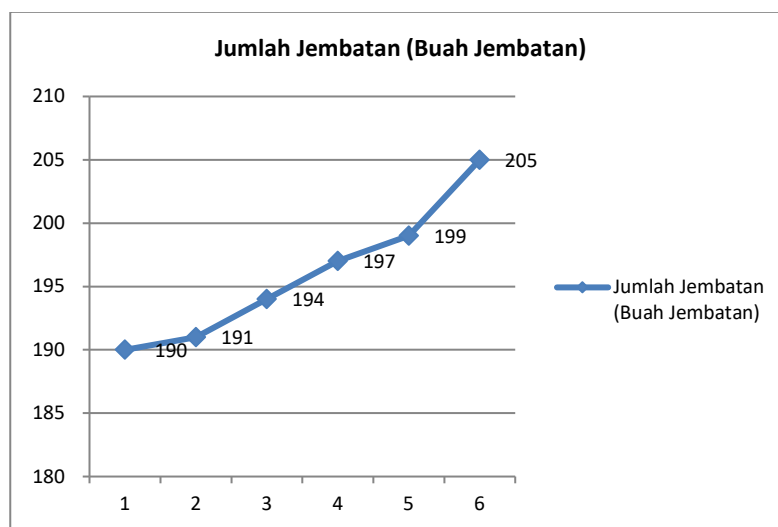
Tabel 2.32. Perkembangan Kondisi Jalan Berdasarkan Permukaan Jalan Periode Tahun 2009 -2013

INDIKATOR KINERJA PEKERJAAN UMUM	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Peningkatan kualitas permukaan jalan dan jembatan (km):						
· Panjang Jalan HRS	130.60	145.60	166.60	191.60	211.60	216.60
· Panjang Jalan Lapen	350.70	359.78	428.27	577.86	677.86	727.86
· Panjang Jalan Telford	241.35	235.27	204.62	112.80	113.80	113.06
· Panjang Jalan Tanah	506.70	505.70	475.86	429.74	333.74	284.48
· Jumlah Jembatan	190	191	194	197	199	205
Ratio Perbandingan luas lahan sawah terhadap panjang saluran irigasi permanen untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	1/10,6	1/11,4	1/12,0	1/13,0	1/14,0	1/16,0
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipahanan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	25,373	28,950	31,579	37,621	42,751	48,007
Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun (M3)	-	0	1,500	5,016	5,016	5,016
Kawasan Permukiman / Sentra Produksi Yang Memiliki MCK Komunal	1	3	5	7	13	15

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

Peningkatan kualitas permukaan jalan dan jembatan di Kabupaten Manggarai Timur, cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, guna mendukung pergerakan orang dan barang. Tercatat peningkatan jalan HRS tahun 2008 (awal perencanaan) sebesar 130,60 km, pada tahun 2013 meningkat menjadi 216,60 km. Demikian juga untuk panjang jalan Lapen, telford, jalan tanah. Sementara untuk pembangunan jembatan di Kabupaten Manggarai Timur cenderung mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada

awal perencanaan tahun 2008 jumlah jembatan hanya 190 buah jembatan. Pada tahun 2013 terdapat penambahan jumlah jembatan 205 buah.



Gambar 2.6. Grafik Perkembangan Jumlah Jembatan

4. Perumahan

Persentase rumah layak huni di Kabupaten Manggarai Timur, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Manggarai Timur senantiasa berupaya untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat. Namun demikian meskipun kinerja urusan ini meningkat, kebutuhan akan rumah yang layak huni bagi masyarakat masih sangat tinggi, mengingat pada tahun 2013 masih ada 31,75 % lagi yang belum memiliki aspek dasar yang dibutuhkan.

Tabel 2.33 Perkembangan Rumah layak Huni Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PERUMAHAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase Rumah layak huni (%)	65.15	66.01	68.77	68.70	67.42	68.25

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

5. Penataan Ruang

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD periode 2009 sampai 2013 menunjukkan bahwa persentase penggunaan lahan sesuai peruntukannya sudah mencapai 100%. Ini artinya bahwa penggunaan lahan dan mekanisme pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur sudah sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2.34 Perkembangan Urusan Tata Ruang Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PENATAAN RUANG	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio penggunaan lahan sesuai peruntukannya	100	100	92	100	100	100

Jumlah dokumen perencanaan tata ruang wilayah	1	2	6	7	9	14
---	---	---	---	---	---	----

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

6. Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tetap sasaran. Dokumen perencanaan daerah antara lain: Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan terhadap dokumen perencanaan yang diwajibkan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA, PPAS) pada tahun 2013 mencapai 100% dibandingkan pada awal perencanaan pembangunan sebesar 100%.

Tabel 2.35. Perkembangan Kinerja Perencanaan Pembangunan Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan terhadap dokumen perencanaan yang diwajibkan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA, PPAS) (%)		80	80	80	100	100
Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu (KUA, RKPD, PPAS)	2	3	3	3	3	3
Persentase kegiatan yang dianggarkan dibandingkan dokumen perencanaan (PPAS)	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

7. Perhubungan

Kondisi daerah Kabupaten Manggarai Timur terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja berikut :

a) Jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki ijin trayek (unit)

Seluruh angkutan umum yang ada di Manggarai Timur wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir trayek illegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Pada tahun 2009 tercatat jumlah jaringan trayek yang melayani angkutan penumpang baik menggunakan mobil bus umum maupun mobil barang (Bustong) sebanyak : 259 buah dengan rincian PA : 136 buah dan PO : 123 buah. Walaupun demikian realita menunjukkan bahwa tidak semua kendaraan yang melayani angkutan penumpang tersebut melaksanakan kewajiban untuk memperoleh izin trayek sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaan lainnya. Izin

trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2013 sebanyak 220 izin trayek.

Tabel 2.36. Perkembangan Kinerja Perhubungan Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PERHUBUNGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah pelabuhan udara/terminal bis/tambatan perahu:						
1. Terminal (unit)	1	1	1	2	2	3
2. Bandara (dokumen studi kelayakan, studi AMDAL dan Master Plan)	-	-	-	1	2	2
3. Tambatan Perahu (unit)	-	-	-	1	2	3
Jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki ijin trayek (unit)	83	83	93	158	180	220
Jumlah Kendaraan yang Layak Jalan (unit)	-	127	138	350	415	435
Prosentase pengendalian angkutan umum di jalan raya	-	100	100	100	100	100
Jumlah rambu-rambu yang terpasang	-	-	57	57	66	93
Panjang Pagar Pengaman Jalan (meter)	-	-	0	250	350	425

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

b) Jumlah rambu-rambu yang terpasang

Pemasangan rambu-rambu lalin bertujuan untuk mengatur lalin kendaraan bermotor, sehingga meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi, pada tahun 2010, jumlah rambu-rambu lalin yang dipasang adalah 57 buah sedangkan tahun 2013 terjadi peningkatan menjadi 93 buah.

8. Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah padat perkotaan, perbaikan akses terhadap sumber air bersih dan pengelolaan air limbah. Perlindungan kawasan konservasi dan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.

Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Timur, harus mendapat perhatian khusus. Periode tahun 2008-2013 Jumlah kelurahan dengan kawasan permukiman yang bebas sampah berserakan menunjukkan perkembangan yang baik. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersama-sama kelompok masyarakat peduli sampah mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*). Persentase desa yang bebas pencemaran lingkungan (desa kelurahan) di Kabupaten ini masih sangat minin dibandingkan dengan jumlah seluruh desa.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah kabupaten yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung adan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH tersebut. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (ekologis, social, ekonomi dan srsitektural) dan nilai estetika dan kelangsungan kehidupan tetapi dapat jugan menjadi nilai kebanggaan dan identitas kabupaten. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) diperlihatkan oleh Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah Kota. Tercatat pada tahun 2008 - 2013 sebesar 34.92%. ini menunjukkan tidak ada penambahan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tabel 2.37. Perkembangan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN HIDUP	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah kota (%)	34.92	34.92	34.92	34.92	34.92	34.92
Jumlah kelurahan dengan kawasan permukiman yang bebas sampah berserakan.	-	4	4	4	5	9
Luas Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mata air (ha)	-	0	10	60	100	250
Penurunan luas lahan kritis terhadap luas wilayah kabupaten (ha)	32,345	31,815	31,815	28,381.9	24,533	19,595
Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya (titik sumber air)	-	-	2	6	10	12
Persentase desa yang bebas pencemaran lingkungan (desa kelurahan)	-	4	4	4	4	9

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

9. Pertanian

Untuk meningkatkan pelayanan dibidang pertanian, sekalipun Kabupaten Manggarai Timur merupakan daerah otonomi baru namun di kabupaten Manggarai Timur telah didirikan Kantor Pertanian Nasional. Penataan pembangunan pertanian dilaksanakan untuk menjamin kepastian hak atas tanah dan menjamin keamanan melaksanakan investasi, karenanya untuk menjamin kepastian hak atas tanah maka setiap pemililik lahan maka wajib melaksanakan sertifikasi tanah. Untuk lahan-lahan di Kabupaten Manggarai Timur yang sebagian besar belum bersertifikat. Upaya sertifikasi dilakukan melalui swadaya masyarakat dan program pemerintah. Kasus-kasus tanah yang menonjol di Kabupaten Manggarai Timur terutama berkaitan dengan tanah ulayat dan pada daerah kawasan hutan lindung.

Kondisi daerah Kabupaten Manggarai Timur terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari persentase luas lahan yang memiliki sertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah tanah bersertifikat dan memiliki dokumen pengesahan hak atas tanah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38. Penyebaran Kepemilikan Tanah Bersertifikat dan Dokumen Pengesahan Hak Atas Tanah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2010

No.	Kecamatan	Sertifikat Hak Milik Atas Nama Anggota Rumah Tangga (ART)	Sertifikat Hak Milik Bukan Atas Nama Anggota Rumah Tangga (ART)	Sertifikat Lainnya	Akta Jual Beli Notaris / PPAT	JUMLAH
1.	Borong	1.499	201	27	4.626	6.353
2.	Kota Komba	740	115	4	604	1.463
3.	Elar	584	52	92	1.745	2.473
4.	Sambi Rampas	695	122	10	219	1.046
5.	Poco Ranaka	638	51	26	859	1.574
6.	Lamba Leda	847	37	30	661	1.575
JUMLAH		4.605	578	189	8.714	14.484

Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010

Dari data pada tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah dokumen kepemilikan tanah secara sah dalam bentuk sertifikat dan akta jual beli tanah oleh Masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur masih sangat rendah jika dibandingkan dengan lahan yang dimiliki kepala keluarga yang diperkirakan sebesar 210.639 (diasumsikan rata kepemilikan lahan per rumah tangga adalah sebesar 3 bidang untuk 70.213 KK). Dengan demikian prosentase kepemilikan tanah secara sah sebesar 6,88 %.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Dengan jumlah penduduk sebanyak 263 142 jiwa maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. tercatat tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Manggarai Timur pada tahun 2008 baru mencapai 20%, kemudian mengalami kenaikan di 2011 mencapai 50%. Namun status terakhir di tahun 2013 tingkat kepemilikan KTP mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 100%.

Kepemilikan akta kelahiran di Manggarai Timur pada tahun 2009 telah mencapai 23% namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 100%. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak bayi yang lahir yang disertai akta kelahiran. Sementara untuk rasio pasangan berakta nikah tercatat 100%, hal ini menunjukkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Manggarai Timur saat ini telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara *online*.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 289.148 jiwa pada tahun 2013, maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. Tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki Kartu penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Manggarai Timur pada tahun 2008 baru mencapai 20%, kemudian meningkat menjadi 50 % pada tahun 2011 dan pada 2013 tingkat kepemilikan KTP mengalami peningkatan lagi menjadi 59,22%. Kepemilikan akta kelahiran di Manggarai Timur pada tahun 2009 telah mencapai 23% namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 100%. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak bayi yang lahir yang disertai akta kelahiran. Sementara untuk rasio pasangan berakta nikah tercatat 100%, hal ini menunjukkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Manggarai Timur saat ini telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara *online*.

Tabel 2.39. Perkembangan Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio Penduduk ber-KTP persatuan Penduduk (%)	20	40	40	-	-	59,22
Rasio bayi berakta kelahiran (%)	10	23	27	57	-	-
Rasio Pasangan berakta nikah (%)	2	3	4	4	-	-

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Jika dilihat perkembangannya, partisipasi angkatan kerja perempuan di Manggarai Timur cukup mengalami fluktuasi. Rasio Wanita Yang Bekerja Terhadap Total Angkatan Kerja Wanita sebesar 97.76% namun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 70.65%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 95.50%. Sementara untuk rasio wanita yang menjadi anggota DPR dan jumlah wanita yang bekerja sebagai PNS menunjukkan keterlibatan yang sangat rendah. Untuk lengkapnya dapat dilihat dalam tabel II.32 berikut.

Tabel 2.40. Perkembangan Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2008	2009	2010	2011	2012	2013
---	------	------	------	------	------	------

INDIKATOR KINERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cakupan penyampaian Informasi tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (kali)	-	-	-	6	12	18
Rasio Wanita Yang Bekerja Terhadap Total Angkatan Kerja Wanita (%)	-	97.76	99.04	70.65	95.50	97.50
Jumlah Wanita Yang Bekerja Sebagai PNS (Data BKD)	893	925	1,174	1,275	1,288	1,300
Rasio Wanita Yang Menjadi Anggota DPR (%)	6.67	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
Persentase penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (perempuan dan anak) dari 18 kasus yang ditargetkan (%)	-	-	-	-	33.30	66.67
Cakupan Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan dan Anak dari 240 Orang yang ditargetkan selama 5 tahun (orang)	-	60.00	120.00	120.00	120.00	180.00
Cakupan Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT terhadap dari 70 kegiatan yang dilaksanakan (%)	-	-	1.43	20.00	45.71	71.43
Cakupan Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dari 158 sasaran (%)	-	-	-	25.00	49.37	74.68

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

Terkait dengan capaian indikator SPM di bidang layanan terpadu perempuan dan anak diketahui bahwa kinerja selama periode 2009-2013 sudah cukup optimal. Ini diindikasikan dengan adanya usaha nyata berupa tindak lanjut penanganan dari pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang disertai dengan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tujuan program KB secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah dua anak lebih baik. Jumlah Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif sebesar 37,918.00 pada tahun 2013 meningkat dari 30,008.00 pada tahun 2008. Hal ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah dalam rangka menekan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2.41. Perkembangan Kinerja urusan KB dan KS Periode 2008-2013

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun (orang)	892.00	1,050.00	1,208.00	3,518.00	2,254.00	1,850.00
Jumlah Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	30,008.00	28,105.00	28,410.00	34,327.00	35,657.00	37,918.00
PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (pasangan)	10,479	6,118	3,549	5,620	4,916	4,119

Cakupan Peserta KB Aktif (orang)	26,790	43,238	43,707	52,810	53,219	54,953
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

Jika dilihat perkembangannya, cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Manggarai Timur cenderung mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2008, cakupan peserta KB aktif mencapai 26,790 orang, maka di tahun 2013 hanya sebesar 54,953 orang. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penurunan dari cakupan peserta KB aktif ini perlu menjadi salah satu perhatian, terutama terkait dengan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai Timur.

13. Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur dengan berbagai cara, salah satunya pendampingan serta pemberian pekerjaan bagi orang-orang yang bekerja di jalan agar menjadi produktif. Cakupan Pemberdayaan PMKS terhadap total PMKS meningkat pada tahun 2013 sebesar 1.500 orang, jika dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 150 Orang. Hal ini pembuktian perhatian pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup baik.

Tabel 2.42. Perkembangan Kinerja urusan Sosial Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA SOSIAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cakupan Pemberdayaan PMKS terhadap total PMKS (Orang / Kelompok)	-	150	0	1,100	1,400	1,500
Persentase Rumah layak huni	65.15	66.01	68.77	68.70	67.42	68.25
Cakupan Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (kk)	-	319	7,564	8,360	8,402	7,750
Jumlah kejadian bencana yang ditindaklanjuti terhadap kejadian bencana	3	11	26	74	136	194
Rehabilitasi bencana alam yang ditindaklanjuti terhadap jumlah kejadian bencana (paket)	2	4	8	12	21	29
Cakupan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Sosial Masyarakat / Individu / Keluarga / Masyarakat (sasaran)	10	60	141	320	340	350
Cakupan Penanganan Penderita / Korban HIV AIDS dan Narkotika (orang)	2	2	2	2	2	2

Persentase Jumlah Rumah Tangga yang menerima RASKIN tepat waktu dan tepat sasaran (RTS)	33,744	33,744	32,807	32,807	32,807	32,807
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

14. Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Ratio penduduk yang berkerja di Kabupaten Manggarai Timur cenderung meningkat, namun tidak menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan pada tahun 2013 sebesar 96.02% dibandingkan tahun 2008 sebesar 92.03%. selanjutnya tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Manggarai Timur dari waktu ke waktu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka sebesar 1.75%, pada tahun 2013 telah berkurang secara signifikan menjadi 1.90%. Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian Kabupaten Manggarai Timur, menjadi faktor pendorong (*driving forces*) dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, terutama pada sektor sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Tabel 2.43. Perkembangan Kinerja Ketenagakerjaan Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA KETENAGAKERJAAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan	-	23	31	36	56	80
Persentase jumlah Pekerja / Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek Aktif terhadap total jumlah Pekerja / Buruh setiap tahun	-	60	44.44	42.86	44.44	46.67
Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan terhadap total pencari kerja setiap tahun	-	0	2.32	32.76	4.55	4.71
Ratio penduduk yang bekerja (%)	92.03	94.48	96.02	96.02	96.02	96.02
Angka partisipasi angkatan kerja (%)		83.92	76.28	77.22	80.39	85.23
Tingkat penganggur terbuka (5)		1.75	3.98	3.00	2.50	1.90

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyak koperasi aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Jumlah koperasi yang berbadan hukum di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2008 sebanyak 11 koperasi dan koperasi yang berkualitas sesuai hasil klasifikasi (A, B, C) sebanyak 5 Koperasi. Pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 41 koperasi aktif.

Tabel 2.44. Perkembangan Kinerja urusan Koperasi, UKM Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA KOPERASI,	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-----------------------------	------	------	------	------	------	------

USAHA KECIL DAN MENENGAH						
Jumlah Koperasi Aktif	11	11	12	22	31	41
Jumlah Kelompok IKM yang statusnya meningkat dan memiliki ijin usaha	125	150	300	450	575	700
Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan dana bergulir	-	7	9	13	17	20

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak Industri Kecil Formal dan Non Formal di Kabupaten Manggarai Timur akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Pada tahun 2013 Jumlah Kelompok IKM yang statusnya meningkat dan memiliki ijin usaha sebesar 700 dibandingkan tahun 2009 sebesar 150 kelompok IKM.

16. Penanaman Modal

Jumlah nilai investasi lokal (Non PMDN/PMA) di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2008 mencapai Rp. 5.000.000.000. Pada tahun 2013 nilai investasi mengalami kenaikan, seiring membaiknya kondisi ekonomi yaitu sebesar Rp. 17.500.000.000. Namun jika dilihat dari besaran investasi yang diperoleh, memperlihatkan masih rendahnya investor yang masuk ke kabupaten ini. Untuk itu perlunya mengoptimalkan potensi daerah yang mampu membangkitkan minat investor melalui penciptaan branding daerah, tercatat pada tahun 2013, jumlah investor sektor industri dan perdagangan hanya 5 investor.

Tabel 2.45. Perkembangan Kinerja urusan Penanaman Modal Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PENANAMAN MODAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Investasi sektor industri dan perdagangan (Investor)	2	2	3	4	5	5
Peningkatan Nilai Investasi (Penanaman Modal) Setiap Tahun Rp.(000.000)	5,000	7,500	10,000	12,500	15,000	17,500
Persentase Jumlah Perizinan yang dilayani disertai dengan sistem pelayanan yang memenuhi standar pelayanan	-	0	0	0	100	100
Prosentase jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang perizinan	-	0	0	0	100	100
Prosentase Peningkatan Sinergisitas Pelayanan Perizinan	-	0	0	0	100	100

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

Untuk meningkatkan Penanaman Modal baik PMDN maupun PMA melihat potensi Kabupaten Manggarai Timur yang sangat potensial maka perlu dilakukan kajian terkait penanaman modal sehingga dapat diketahui penanaman modal apa saja yang cocok di Kabupaten Manggarai Timur.

17. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Manggarai Timur dilaksanakan melalui pembinaan, pendataan, pelestarian, pengembangan sanggar seni budaya yang ada di kelompok masyarakat. Sebagai daerah yang memiliki kekayaan seni budaya yang tumbuh dari kultur masyarakat berbagai jenis kesenian terkait dengan kegiatan adat istiadat. Dalam upaya pelestarian terhadap seni budaya local pemerintah setiap tahunnya melaksanakan pentas seni dan budaya.

18. Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan melalui berbagai peningkatan pembinaan beberapa cabang olahraga yang lebih berpeluang untuk menghasilkan prestasi, saat ini pembinaannya langsung oleh KONI bersama pengurus cabang dari masing masing jenis olah raga. Sedangkan diibidang organisasi pemuda selama ini yang berjalan cukup efektif pada kelompok pemuda dibawah lembaga keagamaan seperti Mudika dan remaja masjid.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, khususnya dalam pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilakukan melalui beberapa program yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindakan criminal, Program pengembangan wasawasn kebangsaan serta Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. Melalui program program tersebut kondisi di Kabupaten Manggarai Timur sangat kondusif terutama dalam kehidupan kerukunan antar umat beragama.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a) Jumlah Pamong Praja

Jumlah Pamong Praja di Kabupaten Manggarai Timur berfluktuati dari tahun 2008-2013. Tahun 2013 tercatat jumlah Pamong Praja mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin perlunya keberadaan Pamong Praja dalam menjamin keamanan sekaligus menegakkan PERDA secara konsisten.

b) Jumlah Limnas Yang Memenuhi Standar

Peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 263 142 jiwa berpengaruh terhadap jumlah personil limnas yang memenuhi standart. Tercatat jumlah Limnas di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 sebanyak 528, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2008 hanya sebanyak dengan jumlah penduduk 243 819 jiwa.

c) Persentase Penanganan Kasus Kamtibmas dan Penangan Kasus Penyakit Masyarakat

Persentase penanganan kasus kamtibmas dan penanganan kasus penyakit Masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur cenderung merata. Pada tahun 2011 ditemukan 25% penanganan kasus kamtibmas dan penanganan kasus penyakit masyarakat. Namun di tahun 2013 terjadi peningkatan, 100% kasus dapat diselesaikan dengan baik, hal ini tentunya atas kerjasama dan koordinasi berbagai pihak dalam penanganan kamtibmas dan penanganan kasus penyakit Masyarakat.

d) Jumlah Perda dan Perbub yang dihasilkan

Jumlah Perda dan Perbub selama periode 2009 sampai dengan 2013 sebanyak 297 yang terdiri dari perda sebanyak 97 dan Perbub sebanyak 173. Ini membuktikan bahwa Kabupaten Manggarai Timur perlunya pengaturan yang mampu memudahkan dan membatasi aktivitas masyarakat. Sementara Persentase Pelanggaran Terhadap Perda dan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti terhadap jumlah Perda dan Perbub yang ada tercatat dalam waktu 4 tahun terakhir ini dapat ditindaklanjuti 100%. Hal ini juga didukung bahwa pada tahun 2013 terdapat 25 Jumlah Desa/Kelurahan yang paham Hukum

e) Ketersediaan sarana dan Prasarana Pemerintahan Umum

Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana Pemerintahan Umum di Kabupaten Manggarai Timur didasarkan kepada kebutuhan logis terhadap efektivitas berlanjalannya pemerintahan sejak kabupaten ini dimekarkan dari induknya. Meskipun dilakukan secara bertahap, terhitung sejak 2009 – 2013, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus menerus melakukan pemenuhan pembangunan Kantor Bupati, Kantor SKPD, Kecamatan dan kantor instansi vertikal. Untuk menjelaskan kondisi kinerja urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Periode 2008-2013 terdapat di Tabel II.46.

Tabel 2.46. Perkembangan Kinerja urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Periode 2008-2013

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan umum						
1. Kantor Bupati (1 Unit = 100%) (-	0	20	40	65	100
2. Kantor SKPD (30 Unit = 100%)	-	0	0	16,67 % / 5 Unit	10 unit / 33,33 %	15 Unit / 50 %
3. Kantor Kecamatan	6	6	6	6	6	9
4. Kantor Instansi Vertikal (7 Unit = 100%)	-	28.57	28.57	42.86	42.86	57.14
Jumlah Tenaga Linmas Yang Memenuhi Standar	5	5	35	176	325	528
Persentase Penangan Kasus Kamtibmas dan Penangan Kasus Penyakit Masyarakat	100	100	40	75	100	100

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Perwakilan unsur Masyarakat dalam keanggotaan FKDM	-	10.00	10.00	11	11	75
Jumlah Lembaga Adat terdata	-	-	-	-	176	176.00
Persentase pantauan dan penganganan korban bencana alam	-	100	100	100	100	100
Persentase Umat beragama yang mendapat pembinaan kerukunan	75	100	100	100	100	100
Persentase masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur budaya	75	100	100	100	100	100
Persentase partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum	95	97				100
Persentase Kecamatan yang aman dan nyaman	100	100	100	100	100	100
Persentase keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100
Jumlah Polisi Pamong Praja		22	23	22	21	49
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	-	45.00	73.00	40.00	100.00	100.00
Persentase SKPD yang taat aturan dalam pelaksanaan program dan kegiatan	52	62.00	65.00	69.00	100.00	100.00
Prosentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik	33	33.00	67.00	100.00	100.00	100.00
Prosentase realisasi pelaksanaan pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Insidentil, Wasbangda, Pelayanan Publik dan Audit akhir Tahun anggaran.	50	70.00	80.00	100.00	100.00	100.00
Prosentase tingkat efektivitas sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	50	70.00	80.00	100.00	100.00	100.00
Prosentase Pemerintah Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Prosentase pelayanan terhadap pengaduan masyarakat	39	43.00	26.00	100.00	100.00	100.00
Prosentase Hasil Tindak Lanjut Temuan dan Pengawasan	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah Perda dan Perbub yang dihasilkan						
- PERDA	1	39	52	72	87	97

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
- PERBUP	7	60	108	141	153	173
Prosentse Jumlah Desa/Kelurahan yang paham Hukum	4	4	11	17	20	25
Perstase Pelanggaran Terhadap Perda dan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti terhadap jumlah perda dan perbub yang ada	0	50	100	100	100	100
Ketersediaan sarana prasarana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	154	154	160	159	159	159
Prosentase Kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan dan tepat waktu (Pembahasan Perda, Pansus)	100	100	100	100	100	100
Prosentase Jumlah Perda yang dibahas tepat waktu	100	89	100	77	100	100
Prosentase kepastian hukum kepemilikan tanah Pemda Kab. Manggarai Timur	-	-	-	25	50	75
Menurunnya Konflik Pertanahan	1.00	-	-	-	-	-
Peningkatan Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan dan Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Tepat Waktu	6	6	6	6	6	9
Prosentase Penyampaian LPPD Kepada Pemerintah Pusat	100	100	100	100	100	100
Predikat Penilaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Persentase Penyelesaian Masalah Tapal Batas Administrasi Pemerintah Antar Daerah Kabupaten (7 titik perbatasan)	28.57	71.43	71.43	71.43	71.43	100
persentase Dokumen LAKIP, RKT, PK yang terintegrasi dan tepat waktu	77	100	100	100	100	100
Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi	-	5	5	5	5	10
Persentase Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembinaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Terhadap Laporan Yang diwajibkan setiap tahun	-	100	100	100	100	100
Persentase Pekerjaan Pembangunan yang diselesaikan tepat waktu terhadap total pekerjaan fisik setiap tahun	-	28	32	100	100	100
Persentase Aparat yang memahami LAKIP, WASKAT dan BUDAYA KERJA, ANJAB dan	-	-	1	4	8	9

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ABK, SOP, SPM, SKJ, SIPP, SPP						
Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan	77	94	100	100	100	100
Presentase SKPD yang memiliki TUPOKSI, UJ dan SPP		-	100	100	100	100
Prosentase SKPD yang mengikuti FORKOMPINDA	100	100	100	100	100	100
Tingkat akurasi informasi penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan di masyarakat	-	-	50	50	100	100
Presentasi jumlah Kegiatan Penting yang didokumentasikan	50	80	86	100	100	100
Tingkat kelancaran pelayanan kepptokolan kepala daerah dan pejabat pemerintah	60	76	84	87	92	100
Prosentase Terlaksananya Dialog / Audensi dengan Tokoh - tokoh Masyarakat Pimpinan /Anggota Organisasi sosial & Kemasyarakatan	40	65	86	90	97	100
Prosentase Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara /Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen Dalam / Luar Negeri.	63	99	100	75	94	100
Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	12	72	284	429	519	619
Terlaksananya Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.	4	42	88	140	182	242
Persentasi Ketepatan waktu rata-rata penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	100	100	100	100	100	100
Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan	100	100	100	100	100	100
Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu	100	100	100	100	100	100
Berkurangnya temuan audit BPK	5	6	4	4	3	1
Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi inventaris daerah dg baik	48	79	100	100	100	100
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	184,390	225,000	325,000	400,000	500,000	575,000
Peningkatan Pajak Daerah (DPPKAD)	500	1,000	2,029	2,587	2,750	3,000
Peningkatan Retribusi Daerah (DPPKAD)	184.00	750,000	1,223	1,568	1,750	2,000

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kontribusi PAD terhadap belanja daerah (DPPKAD)	339,66 4	329,66 4	5,289,23 6	9,929,76 7	10,000, 000	11,000,0 00
Persentase tingkat efektivitas sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	100	70	50	100	100	100
Prosentase tenaga auditor terhadap seluruh personil yang ada	-	-	-	-	100	100
Prosentase tenaga auditor yang telah memiliki sertifikat auditor	-	-	-	-	100	100
Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya	22	36	54	40	42	63
Rasio Perbandingan PNS terhadap jumlah penduduk	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Pesentase struktur jabatan yang terisi		23	42	48	60	79
Presentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	-	9	12	13	16	22
Presentase aparatur yang memiliki pengembangan karir sesuai kebutuhan	-	-	-	-	100	100
Jumlah aparatur yang lulus dn memiliki sertifikat diklat teknis		500	700	900	1100	1200
Peningkatan Jumlah Aparatur Yang Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang & jasa	3	9	17	52	72	85
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola LPSE	-	0	0	14	14	14
Persentase Jumlah Perizinan yang dilayani disertai dengan sistem pelayanan yang memenuhi standar pelayanan	-	-	-	-	100	100
Prosentase jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang perizinan	-	-	-	-	100	100
Prosentase Peningkatan Sinergisitas Pelayanan Perizinan	-	-	-	-	100	100

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

21. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Penyediaan pangan di Di Kabupaten Manggarai Timur hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya (i) keterbatasan lahan, (ii) anomali iklim dan (iii) bencana longsor, dan (iv) selain itu keamanan pangannya juga perlu diperhatikan. Permasalahan

untuk menyediakan ketersediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan lingkungan yang baik, maka diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk sementara ditanami tanaman produktif, intensifikasi lahan menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai keamanan pangan dan terpenuhinya cadangan panganti Kabupaten Manggarai Timur. Ini bisa menjadi inovasi dalam mendukung produksi pangan skala rumah tangga. Implementasi hal ini akan mendukung bagi terwujudnya Kabupaten Manggarai Timur yang produktif, hijau dan nyaman.

**Tabel 2.47. Perkembangan Kinerja Pelayanan Minimal Urusan Ketahanan Pangan
Periode 2008-2013**

INDIKATOR KINERJA KETAHANAN PANGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio Ketersediaan Pangan (Energi) (Gram/Kapita/ Hari)	1,332	1,665	1,841	1,871	1,891	1,941
Skor Ketersediaan protein per kapita (Gram/Kapita/ Hari)	36.90	40.5	43.2	45.0	47.7	49.5
Koefisien keragaman Stabilisasi harga dan pasokan pangan (Rp)	4,500	5,000	5,500	6,125	8,700	9,000
Penguatan cadangan pangan (%)	25	30	35	40	45	50
Skor pola pangan harapan (PPH) (Skor PPH)	84.10	84.1	87.7	88.5	88.9	89.1
Pengawasan dan Pembinaan Pangan	-	60	65	75	80	85
Penangan Daerah Rawan Pangan dan Peta Kerawanan Pangan (dokumen)				1	1	1
Jumlah Desa Yang mendapat program DMP	1	3	4	5	6	7
Jumlah Lumbung Pangan Daerah (unit)	1	1	11	11	11	11

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan daerah masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun disparitas produksi pangan antar kecamatan merupakan tantangan lima tahun kedepan yang disebabkan tidak semua wilayah kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur berpotensi memproduksi tanaman pangan khususnya padi. Meskipun demikian upaya pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan antar wilayah dapat ditempuh melalui aspek distribusi pangan.

Sementara konsumsi pangan di Kabupaten Manggarai Timur belum memenuhi standar pola pangan harapan yaitu sebesar minimal 2.000 kkal. Dengan demikian pola konsumsi pangan masyarakat yang tidak berimbang ini akan menyebabkan kerawanan gizi bagi masyarakat. Hal ini perlu diwaspadai dengan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam merubah pola konsumsi pangan secara berimbang dalam lima tahun kedepan.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian, pertumbuhan jumlah PKK yang aktif sebanyak 35 pada tahun 2008, 69 pada tahun 2009, dan 117 pada tahun 2010. Terjadi peningkatan signifikan dari periode 2008-2013 sebanyak 138. Sementara kelompok binaan LKMD adalah sebanyak 23 pada tahun 2008, 47 pada tahun 2009, dan 70 pada tahun 2010. Terjadi peningkatan signifikan dari periode 2008-2013 sebanyak 143. Melihat pertumbuhan jumlah PPK aktif di Kabupaten Manggarai Timur memperlihatkan bahwa meningkatnya inisiatif masyarakat dalam proses pembangunan di Manggarai Timur.

**Tabel 2.48. Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Periode 2008-2013**

INDIKATOR KINERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah LKMD yang menjalankan fungsinya dengan baik	23	47	70	92	115	138
Jumlah PKK yang aktif	35	69	104	117	130	143
Jalan desa dengan kondisi baik (meter)	0	23.636	66.993	59.499	64.499	74.499
irigasi desa dengan kondisi baik (meter)	0	413	463	463	513	563
Jumlah kantor desa yang layak (unit)	100	102	102	104	114	127
Jumlah Desa yang mempunyai 3 - 5 Peraturan Desa Wajib	104	104	104	159	159	159

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

23. Statistik

Buku Daerah Dalam Angka selama periode 2008-2013 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Manggarai Timur dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2008-2013 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2.49. Perkembangan Kinerja Urusan Statistik Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA STATISTIK	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prosentase Publikasi Buku "Daerah Dalam Angka (DDA)"	100	100	100	100	100	100
Prosentase Publikasi Buku "Produk Domesti Regional Bruto (PDRB)"	100	100	100	100	100	100
Prosentase Jumlah Dokumen / Arsip Daerah Yang di Akuisisi	-	-	-	-	-	65
Persentase Data Sarana Ekonomi Daerah Yang Tersedia terhadap 18 unit jenis sarana ekonomi daerah	-	-	100	100	100	100

Persentase Data Produksi Daerah Yang Tersedia terhadap 96 Buah Data Produksi Daerah	-	1.64	78.13	78.13	78.13	78.13
---	---	------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

24. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Manggarai Timur ditangani oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Aspek pengelolaan arsip meliputi Pengelolaan arsip secara baku dan Peningkatan pengelolaan SDM arsip. Untuk mewujudkan tatakelola arsip maka telah dilaksanakan satu buah Program yaitu Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Namun mengingat lembaga yang mengelola kearsipan masih baru dan belum adanya staf yang berpengalaman dibidang ini maka penanganan tugas kearsipan belum berjalan optimal.

25. Komunikasi dan Informatika

Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2012 penanganannya telah dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika, bidang ini terkait langsung dengan jangkauan pelayanan jasa telekomunikasi dan informasi. Usaha untuk memperlancar pelayanan meningkatnya permintaan akan jasa komunikasi dilayani melalui penyediaan jasa Pos dan telekomunikasi. Jumlah kantor pos tahun 2013 sebanyak 1 buah berupa kantor pos desa. Sedangkan Pelayanan telekomunikasi baru dapat dilayani oleh jaringan telepon seluler yang saat ini sudah bisa menjangkau hampir sebagian besar wilayah kabupaten Manggarai Timur karena jumlah BTS bertambah terus dari tahun ke tahun. Untuk keperluan pelayanan internet pemerintah daerah telah bekerjasama dengan PT Telkom untuk mendapatkan pelayanan dikawasan perkantoran Lehong khususnya untuk pelayanan pengadaan barang dan jasa serta untuk keperluan penyebaran informasi.

Disamping itu kehadiran RSPD Kabupaten Manggarai Timur sejak akhir tahun 2009 telah berupaya menjadi sarana komunikasi dan informasi yang memfasilitasi kepentingan pada sektor pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Menyadari pentingnya peran RSPD Kabupaten Manggarai Timur sebagai Lembaga Biro Informasi pemerintah yang bertugas menjadi saluran resmi pemerintah yang menyediakan saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta yang membantu menjelaskan tujuan, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasi kebijakan, selain itu RSPD kabupaten Manggarai Timur dipandang sebagai representasi Pemerintah dan masyarakat Manggarai Timur yang harus diproduksi citra dan kewibawaannya. Menyadari peran ini, maka sejak awal RSPD Kabupaten manggarai Timur dipersiapkan secara teknis hingga jangkauan siarannya mampu menjangkau wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Dengan demikian RSPD Kabupaten Manggarai Timur menginformasikan tentang segala kepentingan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur pada masyarakat yang berada pada dua wilayah tersebut dan diarahkan untuk mendukung kepentingan pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Di Manggarai Timur juga telah memiliki LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) Radio Kabupaten Manggarai Timur sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal). Selain itu Kabupaten Manggarai Timur juga telah memiliki website sebagai sumber informasi.

Tabel 2.50. Perkembangan Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Durasi penyiaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat (jam)	-	1,500	3,000	4,500	6,000	7,500

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

26. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut system tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka.

Tabel 2.51. Perkembangan Kinerja Urusan Perpustakaan Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PERPUSTAKAAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Meningkatnya jumlah angka kunjungan keperpustakaan umum (orang)	500	4774	14612	13,345	15,000	15,000
Meningkatnya Ketersediaan Pondok Baca di Tingkat Kecamatan (unit)	1	1	1	1	1	2
Meningkatnya Koleksi Bahan Bacaan di Perpustakaan Umum (judul)	100	700	3200	4,700	6,030	7,530

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Produktivitas Padi pada tahun 2013 mencapai 72,904 ton dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2011 dari 68,166.58. Sementara untuk Produktivitas Jagung meningkat dari 22,310 tahun 2011 menjadi 23,823.0. Demikian produktivitas juga untuk taman holtikultura lainnya (Kedele, Kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, sorgun) dominan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan produktivitas tersebut diatas berbanding lurus dengan Luas Areal Pencetakan Sawah Baru (ha) dari 270 Ha tahun 2011 menjadi 420 ha pada tahun 2013. Disamping itu juga tumbuhnya kelompok-kelompok tani di Kabupaten Manggarai Timur turut memberikan andil dalam peningkatan produktivitas sektor unggulan. Tercatat bahwa pertumbuhan kelompok tani selama periode 2008-2013 dari 160 menjadi 1.112 kelompok tani.

Tabel 2.52. Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PERTANIAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Panjang Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi Yang Dibangun (km)	4	10	10	10	14	19
Jumlah PID yang ddbangun/direhabilitasi (unit)	-	-	17	20	48	53
Luas Areal Pencetakan Sawah Baru (ha)			50	15	350	212
Produktivitas Padi (Ton/ha)	3,76	3,76	3,67	3,67	3,68	3,75
Produktivitas Jagung (Ton/ha)	3,5	4,0	3,67	4,15	4,02	3,98
Produktivitas Kedele (Ton/ha)	-	-	-	1	-	1,96
Produktivitas kacang Tanah (Ton/ha)	1	1	1,1	1,1	1,1	1,2
Produktivitas kacang hijau (Ton/ha)	0,9	0,97	0,97	1	1,2	0,7
Produktivitas ubi kayu (Ton/ha)	9	9,47	9,03	9,64	9,44	8,03
Produktivitas ubi jalar (Ton/ha)	7	7,17	7,33	7,80	7,5	7,50
Produktivitas sorghum (Ton/ha)						0,33
Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Petani (kelompok)	2	4	7	7	7	7
Peningkatan Jumlah Petani yang dilatih (orang)	95	275	410	528	1,048	1,568
Rasio PPL yang mengikuti Diklat ((orang)	2	2	17	39	88	103
Kelompok tani aktif	160	350	548	657	1,008	1,112
Luas Areal Tanaman Perkebunan yang dikembangkan (ha)			191	212		
1. Kopi	-	0	40	48	64	64
2. Cengkeh	-	0	10	50	50	50
3. Kakao	-	0	121	76.9	50	50
4. Kelapa	-	0	0	17	20	20
5. Mente	-	0	20	20	20	20

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

Pertanian sebagai sektor unggulan dan penyumbang terbesar dalam PDRB Manggarai Timur memiliki peranan strategi dan menjadi layanan pilihan terutama dalam pemanfaatan lahan dan strategi dalam peningkatan panen dan produktifitas. Pergerakan PDRB yang disumbang oleh sektor pertanian terhitung dari tahun 2007 bergeser relative lambat, meskipun trendnya meningkat setiap tahunnya baik untuk ADH berlaku dan ADH konstan. Pada tahun 2010 tercatat persentase kontribusi sektor pertanian ADH berlaku mengalami penurunan dari 61.50% tahun 2011 menjadi 60.10% tahun 2013.

Tabel 2.53. Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (juta rupiah) Periode 2007-20012

NO	URAIAN	DALAM JUTAAN RUPIAH					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012

Kontribusi Sektor Pertanian							
1	ADH berlaku	373.004,71	438.970,42	489.469,25	541.002,13	607 012,93	687 402,63
	ADH Konstan	222.727,19	230.836,77	240.574,83	247.316,71	254 022,66	263 244,07
Jumlah PDRB							
2	ADH berlaku	588.801,42	682.024,98	767.021,54	866.286,71	987 027,70	1 143 784,73
	ADH Konstan	338.828,12	350.932,19	369.280,46	385.779,49	403 757,15	426 692,73
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian							
3	ADH berlaku	63,35	64,36	63,81	62,45	61,50	60,10
	ADH Konstan	65,74	65,79	65,15	64,11	62,91	61,69

Sumber : BPS 2012

Produktivitas ternak (seperti sapi, kerbau, kambing, babi) bergerak secara stagnan setiap tahunnya, pertumbuhan populasi khususnya kerbau dan kambing setiap tahun hampir tidak bergerak. ini artinya akan berpengaruh terhadap pembentukan PDRB. Sementara jika dilihat kondisi sumber daya di Kabupaten Manggarai Timur, sub sektor peternakan memiliki potensi pengembangan peternakan dengan tersedianya padang penggembalaan.

Tabel 2.54. Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PERTENAKAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah RPH (Ternak besar dan ternak babi) (unit)	-	-	1	-	-	-
Populasi Ternak (ekor):						
1. Sapi	5,718	7,208	9,625	9,625	9,625	12,420
2. Kerbau	9,254	9,451	9,451	9,451	9,451	9,067
3. Kambing	18,712	18,712	23,887	25,698	25,698	28,334
4. Babi	40,558	46,830	49,969	53,004	52,104	58,177

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

2. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Manggarai Timur masih jauh dari potensi produksi yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dimiliki oleh masyarakat terutama nelayan, terbatasnya sumber benih ikan unggul air tawar dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki nelayan dan petani ikan sehingga tidak dapat mengembangkan usaha pengembangan perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Manggarai Timur. Di samping itu juga masalah utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat produksi perikanan adalah masih rendahnya animo masyarakat untuk mencari nafkah di laut, yang terlihat dari masih rendahnya data jumlah nelayan di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2.55. Produksi Ikan Kabupaten Manggarai Timur

Uraian	2007	2008	2010	2012
Produksi Ikan (ton) :	2.339,82	4.447,76	2.257,23	-
Perikanan laut	1.709,20	3.992,90	1 986.41	-
Perikanan darat	52,62	428,30	57,82	48,0

Rumput Lauts	578	16,56	216,00	237,00
--------------	-----	-------	--------	--------

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Produktivitas ikan di atas secara langsung memberikan pengaruh kontribusi sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PAD Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perikanan dan kelautan, memperlihatkan kontribusi sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PAD Kabupaten Manggarai Timur sangat rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah perairan di Kabupaten Manggarai Timur. Pergerakan PAD dari sub sektor ini sejak 2010 hanya Rp 150.000.000 dan tahun Rp. 550.000.000 pada tahun 2013. Untuk itu pemerintah diharapkan mampu mendorong pengembangan subsektor ini dalam meningkatkan produktivitas ikan melalui peningkatan armada dan alat tangkap serta pelatihan terkait perikanan dan kelautan.

Tabel 2.56. Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase Nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap	375	450	568	574	587	597
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PAD (Rp. 000)	-	-	150,000	300,000	400,000	550,000
Jumlah PPI (Pelabuhan pendaratan Ikan) di Kabupaten Manggarai Timur (unit)	-	-	-	-	1	1
Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Manggarai Timur (unit)	-	-	-	-	-	1

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

3. Kehutanan

Berdasarkan data tahun 2007 luas lahan kritis sejumlah 32.345 ha, dengan rincian terdapat dalam kawasan hutan seluas 6.615 ha atau sejumlah 20,51%, dan di luar kawasan hutan seluas 25.730ha atau 79,48%. Penurunan luas lahan kritis terhadap luas wilayah kabupaten pada tahun 2013 berada pada posisi 19,595 ha lahan kritis.

Cakupan pengembangan kawasan hutan sejak tahun 2009 sampai 2013 tidak mengalami peningkatan. Luas kawasan selama periode tersebut tidak ada penambahan pengembangan kawasan termasuk kawasan hutan konservasi RTK 118 , kawasan hutan lindung kawasan hutan konversi serta kawasan hutan adat. Penyebarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57. Perkembangan Kinerja Urusan Kehutanan Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA KEHUTANAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Perlindungan Sumber daya alam (ha)	-	-	-	2.50	5	10

INDIKATOR KINERJA KEHUTANAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Penurunan luas lahan kritis terhadap luas wilayah kabupaten (ha. Lahan Kritis)	32.345	31,815	31,815	28,381.9	24,533	19,595
Cakupan pengembangan kawasan hutan (ha) :						
1. Luas kawasan hutan konservasi RTK 118 yang dikelola	-	32,249	32,249	32,249	32,249	32,249
2. Luas kawasan hutan lindung yang dikelola	-	-	23.985.29	23.985.29	23.985.29	23.985.29
3. Luas kawasan hutan konversi yang dikelola	-	-	5,705	5,705	5,705	5,705
4. Luas kawasan adat yang dikelola	-	-	-	17,5	20	20

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

4. Energi dan Sumberdaya Mineral

Kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB terjadi kenaikan pada tahun 2010 yaitu dari 1,97 % pada tahun 2009 meningkat menjadi 2,00 % pada tahun 2010. Kenaikan ini sangat merangsang pertumbuhan PDRB karena di tiga tahun sebelumnya sektor ini hanya bertahan pada angka 1,97 % sumbangan atas PDRB. Pada tahun 2013 naik menjadi 2,17 (ADH Berlaku) dan ADH Konstan sebesar 2.13.

Tabel 2.58. Kontribusi Energi dan Sumberdaya Mineral terhadap PDRB Periode 2008-2013

NO	URAIAN	DALAM JUTAAN RUPIAH					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian						
	ADH berlaku	11.694,53	13.422,22	15.180,40	17.553,33	20 38,58	24 812,66
	ADH Konstan	6.660,43	6.916,53	7.269,85	7.728,23	8 317,85	9 094,74
2	Jumlah PDRB						
	ADH berlaku	588.801,42	682.024,98	767.021,54	866.286,71	987 027,70	1 143 784,73
	ADH Konstan	338.828,12	350.932,19	369.280,46	385.779,49	403 757,15	426 692,73
3	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian						
	ADH berlaku	1,99	1,97	1,98	2,03	2.08	2.17
	ADH Konstan	1,97	1,97	1,97	2,00	2,06	2.13

BPS 2012

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja RPJMD 2009-2013 menunjukkan jumlah rumah tangga pengguna listrik secara periodik meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Namun kinerja ini perlu semakin dioptimalkan mengingat banyak jumlah penduduk yang masih belum mampu mengakses energi listrik khususnya di daerah-daerah terpencil. Demikian juga untuk ketersediaan sarana listrik untuk sarana ekonomi seperti di pasar meningkat dari tahun 2009 sampai tahun 2013.

Tabel 2.59. Perkembangan Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah rumah tangga pengguna listrik	1,823	2,320	3,017	3,532	4,272	5,222
Energi listrik yang dimanfaatkan berdasarkan jenis dan sumber energi pembangkit listrik (KWH):						
1. PLN	847.46	847.46	847.46	935.65	935.65	1100
2. PLTMH	32	32	32	164	200	275
Prosentase sarana ekonomi yang memiliki sarana listrik dari 7 unit pasar yang ada	14.29	14.29	14.29	14.29	42.86	57.14

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

5. Pariwisata

Meningkatnya jumlah kunjungan wisata pada tahun 2010 sebanyak 1.561 orang dibanding pada tahun 2008 yang hanya berjumlah 189 orang menandakan sektor ini termasuk yang prospektif mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini terus ditingkatkan untuk mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB secara keseluruhan. Potensi wisata di Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari wisata budaya, pantai, bahari dengan rata-rata kunjungan per objek wisata yang sangat minimal. Untuk itu perlu pemetaan pariwisata yang tertuang dalam rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2.60. Perkembangan Kinerja Urusan Pariwisata Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PARIWISATA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah obyek wisata budaya yang diidentifikasi	-	0	1	2	3	4
Jumlah kawasan wisata Pantai Yang Ditata	2	3	5	7	9	11
Jumlah Kawasan Wisata Bahari Yang Ditata	-	0	0	0	1	1
Jumlah Kawasan Wisata Alam Yang Ditata	3	3	3	4	4	4
Jumlah hotel yang diklasifikasi	3	5	6	6	7	9

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

6. Perdagangan

Kondisi perdagangan barang dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur masih didominasi oleh perdagangan luar daerah. Terselenggaranya pasar dan distribusi barak produk secara signifikan mengalami perkembangan dari 1 unit pada tahun 2010 meningkat menjadi 10 unit pada tahun 2013. Namun hal ini perlu semakin didorong untuk meningkatkan pemasaran produk maupun sembako dalam kabupaten Manggarai Timur sendiri.

Tabel 2.61. Perkembangan Kinerja Urusan Pariwisata Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PERDAGANGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Terselenggaranya Pasar dan Distribusi Barang Produk (Unit)	-	0	1	5	8	10
Terselenggaranya Registrasi Perusahaan Industri dan Perdagangan (Unit)	-	87	150	200	350	450
Meningkatnya Jumlah Pasar bagi pemasaran produk dan sembako (Unit)	13.00	13	14	17	20	22
Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Umum (Ruko / Kios Permanen / Tempat Asongan) (Unit)	1.00	1	2	2	3	3
Meningkatnya Jumlah Tempat Usaha Yang dilakukan Pengawasan Peredaran Barang (Unit)	145.00	160	260	360	410	460
Peningkatan Presentase akurasi alat ukur / timbang / takar yang ditera ulang terhadap jumlah alat ukur (Unit)	29.82	40.95	52.49	64.41	80.32	96.22

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

Dari sektor perdagangan, memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB menunjukkan pergerakan positif dari tahun 2007-2012 baik untuk harga berlaku maupun konstan. Hal ini berarti bahwa sektor ini perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Manggarai Timur tumbuh sesuai dengan mengeliatnya pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya dijabarkan dalam tabel II.62.

Tabel 2.62. Kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB (juta rupiah)

NO	URAIAN	DALAM JUTAAN RUPIAH					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kontribusi Sektor perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran)						
	ADH berlaku	73.942,59	83.306,26	96.243,22	115.105,66	136.295,85	166.313,14
	ADH Konstan	41.774,41	43.321,01	46.545,91	50.628,43	55.171,13	60.864,89
2	Jumlah PDRB						
	ADH berlaku	588.801,42	682.024,98	767.021,54	866.286,71	987.027,70	1.143.784,73
	ADH Konstan	338.828,12	350.932,19	369.280,46	385.779,49	403.757,15	426.692,73
3	Persentase Kontribusi Sektor perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran)						
	ADH berlaku	12,56	12,21	12,55	13,29	13,81	14,54
	ADH Konstan	12,33	12,37	12,60	13,12	13,66	14,26

BPS, 2012

7. Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling kecil menyumbang pertumbuhan PDRB Kabupaten Manggarai Timur. Sektor ini hanya mampu menyumbang sebesar 0,60 % terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Timur. Dalam kurun waktu 2007-2010, sumbangan terbesar terdapat pada tahun 2007 dengan besar sumbangan 0,63 %. Demikian juga pertumbuhan hingga tahun 2012, pada tahun ini bahkan turun ke level 0,61 dari 0,62 (ADH). Selengkapnya dijabarkan dalam tabel dibawah berikut:

Tabel 2.63. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (juta rupiah)

NO	URAIAN	DALAM JUTAAN RUPIAH					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kontribusi Sektor Industri						
	ADH berlaku	4.107,01	4.606,38	4.967,81	5.576,25	6 156,01	6 975,99
	ADH Konstan	2.119,29	2.185,04	2.265,16	2.321,54	2 380,67	4 443,99
2	Jumlah PDRB						
	ADH berlaku	588.801,42	682.024,98	767.021,54	866.286,71	987 027,70	1 143 784,73
	ADH Konstan	338.828,12	350.932,19	369.280,46	385.779,49	403 757,15	426 692,73
3	Persentase Kontribusi Sektor Industri						
	ADH berlaku	0,70	0,68	0,65	0,64	0,62	0,61
	ADH Konstan	0,63	0,62	0,61	0,60	2,55	2.66

BPS, 2012

Pertumbuhan IKM di Kabupaten Manggarai Timur, berdasarkan hasil evaluasi Kinerja RPJMD tahun 2009 terjadi peningkatan sejak 2009 sebanyak 150 IKM yang memiliki ijin usaha hingga 700 IKM pada tahun 2013. Demikian juga dengan dukungan pemerintah dalam memberikan bantuan dana berupa dana bergulir yang diberikan setiap tahunnya.

Tabel 2.64. Perkembangan Kinerja Urusan Perindustrian Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA PERINDUSTRIAN	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Kelompok IKM yang statusnya meningkat dan memiliki ijin usaha	150	300	450	575	700
Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan dana bergulir	7	9	13	17	20

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

8. Transmigrasi

Cakupan transmigrasi dan jumlah sarana dan prasarana transmigrasi lokal di Kabupaten Manggarai Timur pada periode 2008-2013 memperlihatkan perkembangan yang baik meskipun tidak signifikan. Selengkapnya terlihat dalam tabel II.59 berikut.

Tabel 2.65. Perkembangan Kinerja Urusan Transmigrasi Periode 2008-2013

INDIKATOR KINERJA TRANSMIGRASI	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cakupan wilayah transmigrasi	1	1	1	2	2	2

Jumlah sarana dan prasana transmigrasi local	1	1	1	2	2	2
--	---	---	---	---	---	---

Sumber : Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode 2009-2014

2.4. Aspek Daya Saing

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga per kapita (Angka Komsumsi RT per kapita)

Secara umum pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita ini dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Indikator ini memberi informasi penduduk di Manggarai Timur masih didominasi oleh penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita sebulan antara 150.000 – 199.999 yaitu sebanyak 75.095 jiwa atau sebesar 30,68 % dari total jumlah penduduk pada tahun 2009. Sedangkan pengeluaran tertinggi yaitu 1.000.000 dalam sebulan sebanyak 166 jiwa atau hanya sebesar 0,07 % dari total penduduk.

Pada tahun 2013 pengeluaran per kapita penduduk tertinggi pada level golongan pengeluaran 150 000 – 199 999 dalam sebulan sebanyak 72877 jiwa. Ini menunjukkan masih rendahnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa.

Tabel 2.66. Jumlah Penduduk dan Persentase menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Manggarai Timur, 2012

GOLONGAN PENGELUARAN	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE
< 100 000	2174	0,86
100 000 – 149 999	53784	21,28
150 000 – 199 999	73877	29,23
200 000 – 299 999	71046	28,11
300 000 – 499 999	43902	17,37
>500 000	7961	3,15
Jumlah/Total	252.744	100,00

DDA 2013

2. Nilai Tukar petani

Nilai Tukar petani (NTP) adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indek harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Gambaran nilai tukar petani di Kabupaten Manggarai Timur disajikan melalui NTP Provinsi. Selama periode januari-desember 2011, NTP Provinsi NTT cukup berfluktuasi dengan range dari 101,60 – 103,21. Selama tahun 2011 yaitu dari Januari sampai Desember 2011 NTP di Provinsi NTT berada di atas 100. Ini berarti rata-rata petani NTT mempunyai daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi pertaniannya, atau rata-rata NTP tahun 2011 sebesar 102,20.

Rata-rata NTP berdasarkan subsektor pada tahun 2011 cukup bervariasi. Subsektor peternakan dan Perikanan memiliki rata-rata NTP di atas 100 yaitu rata-rata NTP Peternakan sebesar 115,25 dan rata-rata perikanan sebesar 116,0. Sebaliknya, rata-rata NTP Subsektor tanaman pangan, Tanamana Holtikultura dan perkebunan rakyat adalah di

bawah 100, masing-masing sebesar 98,93, 98,65, dan 99,83. Rata-rata NTP subsector tanaman hortikultura adalah yang terendah pada tahun 2011.,

3. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk non pangan)

Tabel berikut dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur dengan dapat menjangkau konsumsi non pangan. Kelompok Perumahan, Bahan bakar, Penerangan, dan Air merupakan pengeluaran tertinggi pada tahun 2009 dan 2010, yaitu sebanyak 14,66 % dan 20,03 % dari total pengeluaran non pangan. Sementara jenis pengeluaran non pangan terendah adalah Pajak, Pungutan, dan Asuransi yaitu sebesar 0,61 % dan 0,66 % pada tahun 2009 dan 2010 dari total pengeluaran non pangan penduduk Kabupaten Manggarai Timur pada tahun tersebut.

Tabel 2.67. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Bukan Makanan di Kabupaten Manggarai Timur (Rupiah), 2009-2010

KELOMPOK BARANG BUKAN MAKANAN	2009		2010		2011		2012	
	PENGELUARAN	%	PENGELUARAN	%	PENGELUARAN	%	PENGELUARAN	%
Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan, Air	29 523	14,56	70 002	20,03	70 002	20,03	44 663	19,40
Aneka Barang dan Jasa	7 821	3,86	21 964	6,28	21 964	6,28	11 934	5,18
Biaya Kesehatan	2 408	1,19	3 429	0,98	3 429	0,98	2 746	1,19
Biaya Pendidikan	3 550	1,75	7 860	2,25	7 860	2,25	5 028	2,18
Pakaian, Alas Kaki, Tutup Kepala	3 598	1,77	7 850	2,25	7 850	2,25	5 976	2,60
Barang yang Tahan Lama	1 853	0,91	4 228	1,21	4 228	1,21	4 345	1,89
Pajak, Pungutan dan Asuransi	1 227	0,61	2 266	0,65	2 266	0,65	1 035	0,45
Keperluan Pesta dan Upacara	7 693	3,79	6 883	1,97	6 883	1,97	3 637	1,58
Total Bukan Makanan	57 674	28,45	124 481	35,62	124 481	35,62	79 364	34,47

Sumber : DDA 2013

4. Produktivitas Total Daerah

Pendapatan total daerah dihitung melalui produktivitas total daerah per sektor terhadap sumbangannya terhadap PDRB. Pendapatan total daerah ini menggambarkan kondisi makro ekonomi di Manggarai Timur di samping indikator yang lain. Berikut adalah table produktivitas total daerah per sector Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku selama kurun 2008-2012

Tabel 2.68. Produktifitas Total Daerah berdasarkan harga berlaku

SEKTOR/LAP USAHA	2008		2009		2010		2011		2012	
	RP	%	RP	%	RP	%	RP	%	RP	%
Pertanian	373.004,71	63,35	489.469,25	63,81	541.002,13	62,45	607.012,93	61,50	687.402,63	60,01
Pertambangan & penggalian	11.694,53	1,99	15.180,40	1,98	17.553,33	2,03	20.538,58	2,08	24.812,66	2,17

Industri dan pengolahan	4.107,01	0,70	4.967,81	0,65	5.576,25	0,64	6.156,01	0,62	6.975,99	0,61
Listrik, gas & air bersih	301,07	0,05	343,30	0,04	381,46	0,04	426,71	0,04	491,49	0,04
Konstruksi	32.414,53	5,51	43.913,19	5,73	51.077,51	5,90	59.856,48	6,06	71.276,30	6,23
Perdagangan, Hotel dan restoran	73.942,59	12,56	96.243,22	12,55	115.105,66	13,29	136.295,85	13,81	166.313,14	14,54
Pengangkutan dan Komunikasi	7.289,29	1,24	8.222,55	1,07	8.769,73	1,01	9.368,29	0,95	11.193,49	0,98
Keuangan, sewa & jasa perusahaan	9.203,90	1,56	11.557,52	1,51	13.125,82	1,52	14.895,31	1,51	17.373,07	1,52
Jasa-jasa	76.843,78	13,05	97.124,29	12,66	113.694,80	13,12	132.477,53	13,42	157.945,95	13,81

Sumber : DDA 2013

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Fasilitas Bank non Bank

Saat ini untuk transaksi keuangan jasa perbankan di Kabupaten Manggarai Timur terdapat dua unit Bank, yaitu BRI dan BPD.

Tabel 2.69 Jenis Bank Di Kabupaten Manggarai Timur

NO	URAIAN	2013
1	Bank	3
2	BPR	-
Jumlah		2

2. Ketersediaan penginapan

Di wilayah Kabupaten Manggarai Timur terdapat fasilitas penginapan dengan kelas Hotel Non Bintang sebanyak 6 unit. Jumlah dan kualitas fasilitas hotel harus ditingkatkan untuk mendukung terus bertumbuhnya sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2.70. Jenis Penginapan Di Kabupaten Manggarai Timur

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Hotel Bintang	-	-	-	-	-
2	Hotel Non Bintang (hotel melati dan Penginapan lainnya)	6	6	6	7	7
Jumlah		6	6	6	7	7

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan Ketertiban

a) Jumlah Kriminalitas

Kabupaten Manggarai Timur termasuk kabupaten yang sangat aman dengan jumlah kriminalitas yang relative kecil dan dapat dikendalikan oleh aparat keamanan. Jumlah kriminalitas rata rata 2 kejadian setiap tahunnya.

b) Jumlah demonstrasi

Kejadian demonstrasi di Kabupaten Manggarai Timur sepanjang tahun 2009-2013 tidak ada kejadian demonstrasi yang cukup berarti dan mengganggu ketentraman kehidupan bermasyarakat.

2. Kemudahan Perizinan

Untuk Proses Perizinan dan penanaman modal, telah dibentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMDP2T). Lama Proses perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Pelayanan) antara 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari tergantung jenis perizinannya. Jumlah Jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dikeluarkan oleh lembaga ini sebanyak 95 buah.

3. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber PAD adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah sebanyak 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terbagi atas 2 Jenis yaitu :

- Retribusi Layanan Umum, terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi penjualan produk usaha daerah, Retribusi sewa alat berat, retribusi penjualan hasil perikanan, retribusi sewa alat berat, retribusi penjualan hasil perikanan, retribusi sewa rumah dinas, retribusi SP3 Ijin usaha salon, Retribusi penjualan cengkeh SPP Mano, retribusi penjualan hasil pertanian
- Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari Retribusi Ijin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi ijin trayek, retribusi pemanfaatan alat terbang, retribusi izin pemanfaatan ruang.

4. Peraturan Daerah

Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim investasi ada 2 buah yaitu

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai Timur (merupakan dasar untuk pembentukan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu /BPMDP2T)

5. Status Desa

Di Kabupaten Manggarai Timur terdapat 159 desa yang tersebar di 9 Kecamatan, status seluruh desa tersebut hingga saat ini belum ada bersatatus swadaya atau swakarsa.

2.4.4. Fokus Sumber Daya manusia

1. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan daerah. Untuk menentukan kualitas SDM sangat tergantung kepada kemampuan dari tenaga kerja tersebut dan juga tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka diasumsikan semakin baik juga tingkat kualitasnya. Begitu pula hanya semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah maka semakin baik pula kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2013 dari jumlah penduduk 289.148 jiwa terdapat 4.166 jiwa yang tingkat pendidikannya hingga jenjang S1, S2 dan S3. Jika dibandingkan maka rasionya 159 artinya setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Manggarai Timur terdapat 159 orang lulusan S1/S2/S3.

Tabel 2.71. Rasio Lulusan S1, S2 dan S3

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah lulusan S1	2.735	3.107	3.382	3.686	4.569
2	Jumlah lulusan S2	20	23	26	29	36
3	Jumlah lulusan S3					-
4	Jumlah lulusan S1,S2,S3	2.755	3.130	3.408	3.715	4.605
5	Jumlah Penduduk	289.148	289.148	289.148	289.148	289.148
6	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (4/5)	95	108	118	128	159

2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara usia produktif dan usia tidak produktif pada sebuah wilayah, sehingga dapat diketahui besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Manggarai Timur sejak tahun 2009 hingga 2013 kecenderungannya tidak mengalami perubahan yaitu diangka 79,36 %. Dengan kata lain, setiap 100 orang penduduk berusia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Manggarai Timur mempunyai tanggungan sebanyak 79 orang yang berusia tidak produktif (usia dibawah 15 tahun + usia dia tas 64 tahun). Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, rasio ketergantungan di Kabupaten Manggarai Timur memiliki nilai yang lebih besar, dimana secara nasional kisarannya 50%.

Tabel . 2.72. Rasio Ketergantungan

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penduduk usia < 15 tahun	101.166	105.347	105.857	107.124	117.641
2	Jumlah Penduduk > 64 tahun	8.860	9.226	9.271	9.382	10.303
3	Jumlah Penduduk usia tdk produktif (1+2)	110.026	114.573	115.128	116.506	127.944
4	Jumlah Penduduk usia produktif	138.628	144.354	145.056	146.792	161.204
5	Rasio Ketergantungan (3/4)	79,37	79,37	79,37	79,37	79,37

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2009-2013

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyalurkan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyaluran antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Periode kinerja keuangan Kabupaten Manggarai Timur disajikan untuk periode tahun 2009-2013, dimana tahun anggaran 2009 juga merupakan tahun pertama pelaksanaan APBD di Kabupaten Manggarai Timur baik sebagai daerah otonomi baru maupun sebagai tahun pertama pelaksanaan Kepala Daerah terpilih. Data kinerja keuangan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 diperoleh dari Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

1. Komponen Pendapatan:

- a) **Pendapatan Asli Daerah** yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b) **Dana Perimbangan** yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c) **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Lain lain pendapatan. Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

2. Komponen Belanja:

- a) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

3. Komponen Pembiayaan:

- a) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Penjelasan selengkapnya mengenai setiap komponen Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dapat dilihat pada uraian-uraian berikut ini.

Tabel 3.1. Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kab. Manggarai Timur 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun Anggaran 2009			Tahun Anggaran 2010			Tahun Anggaran 2011			Tahun Anggaran 2012			Tahun Anggaran 2013		
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PENDAPATAN DAERAH	230.312.053.972	229.207.466.252	99,52	372.105.045.962	356.681.437.194	95,86	490.859.047.807	480.926.957.160	97,98	531.417.415.971	494.797.187.211	93,11	535.840.272.287	534.836.240.357	100
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	9.500.000.000	3.906.296.898	41,12	9.825.731.139	8.366.181.732	85,15	14.145.400.000	12.868.278.166	90,97	17.294.035.000	15.266.657.498	88,28	21.563.919.322	19.693.795.934	91
1.2.	Dana Perimbangan	217.046.487.000	217.045.516.728	100,00	314.064.383.528	319.393.218.881	101,70	373.986.525.146	373.098.361.367	99,76	492.228.998.954	475.614.655.784	96,62	479.092.004.391	480.648.392.849	100
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.765.566.972	8.255.652.626	219,24	48.214.931.295	28.922.036.581	59,99	102.727.122.661	94.960.317.627	92,44	21.894.382.017	3.915.873.929	17,89	35.184.348.574	34.494.051.574	98
2.	BELANJA DAERAH	235.312.053.972	214.411.777.303	91,12	392.896.651.456	315.330.779.157	80,26	548.707.743.820	480.970.086.840	87,66	583.971.381.899	551.582.193.250	94,45	528.196.448.335	507.106.340.453	96
2.1	Belanja Tidak Langsung	115.940.623.963	108.631.253.927	93,70	153.494.879.734	145.750.048.060	94,95	195.325.826.253	196.157.721.476	100,43	225.245.181.495	223.786.550.967	99,35	260.818.994.125	259.867.273.398	100
2.2	Belanja Langsung	119.371.430.009	105.780.523.376	88,61	239.401.771.722	169.580.731.097	70,84	353.381.917.567	284.812.365.364	80,60	358.726.200.404	327.795.642.283	91,38	267.377.454.210	247.239.067.055	92
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.000.000.000)	14.795.688.949	(295,91)	20.791.605.494	41.350.658.037	(198,88)	(57.848.696.013)	(43.129.680)	0,07	(52.553.965.928)	(56.785.006.039)	108,05	7.643.823.952	27.729.899.904	363
3	PEMBIAYAAN															
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	15.301.819.655	11.245.916.545	73,49	25.008.544.494	24.551.503.596	98,17	62.448.696.013	62.324.400.418	99,80	58.841.333.928	58.678.550.087	99,72	(951.775.952)	(2.605.900.956)	274
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.750.000.000	1.750.000.000	100,00	4.216.939.000	3.620.000.000	85,84	4.600.000.000	4.600.000.000	100,00	6.287.368.000	6.287.368.000	100,00	6.692.048.000	6.692.048.000	100
	PEMBIAYAAN NETO	13.551.819.655	9.495.916.545	70,07	20.791.605.494	20.931.503.596	100,67	57.848.696.013	57.724.400.418	99,79	52.553.965.928	52.391.182.087	99,69	(7.643.823.952)	(9.297.948.956)	122
4.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	8.551.819.655	24.291.605.494	284,05	-	62.282.161.633	-	-	57.681.270.738	-	-	(4.393.823.952)	-	-	18.431.950.948	-

Tabel 3.2. Tabel Realisasi Pendapatan dan Proporsi Pendapatan Kab. Manggarai Timur Thn 2009-2013

No	Uraian	2009		2010		2011		2012		2013	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PENDAPATAN DAERAH										
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.906.296.898	1,70	8.484.377.334	2,38	12.868.278.166	2,68	15.266.657.498	3,09	19.693.795.934	3,68

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

2014-2019

No	Uraian	2009		2010		2011		2012		2013	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	664.258.166	0,29	2.036.608.290	0,57	2.587.077.263	0,54	4.153.749.766	0,84	4.608.543.456	0,86
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.126.315.955	0,49	1.223.329.450	0,34	1.568.733.285	0,33	4.423.473.999	0,89	4.841.545.019	0,91
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	35.717.577	0,02	381.731.139	0,11	1.427.808.758	0,30	2.313.565.101	0,47	4.664.815.377	0,87
1.1.4	Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah	2.080.005.200	0,91	4.842.708.455	1,36	7.284.658.860	1,51	4.375.868.632	0,88	5.578.892.082	1,04
1.2	DANA PERIMBANGAN	217.045.516.728	94,69	319.393.218.881	89,52	373.098.361.367	77,58	450.613.814.989	91,07	480.648.392.849	89,87
1.2.1	Dana bagi Hasil Pajak	7.236.405.000	3,16	18.599.769.041	5,21	17.011.264.172	3,54	13.441.326.708	2,72	14.774.801.007	2,76
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.542.295.728	2,42	282.050.772	0,08	559.841.075	0,12	402.664.351	0,08	350.855.842	0,07
1.2.3	Dana Bagi Hasil Cukai		-	17.774.668	0,00	-	-	50.729.930	0,01		-
1.2.4	Dana Alokasi umum	171.322.816.000	74,75	255.080.624.400	71,49	293.409.456.120	61,01	339.700.544.000	68,65	382.067.746.000	71,44
1.2.5	Dana Alokasi khusus	32.944.000.000	14,37	45.413.000.000	12,73	62.117.800.000	12,92	97.018.550.000	19,61	83.454.990.000	15,60
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.255.652.626	3,60	28.922.036.581	8,11	94.960.317.627	19,75	28.916.714.724	5,84	34.494.051.574	6,45
1.3.1.	Pendapatan Hibah		-		-		-		-		-
1.3.2.	Dana Darurat		-		-		-		-		-
1.3.3.	Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi	1.160.302.626	0,51	4.063.628.425	1,14	2.374.469.970	0,49	3.564.167.795	0,72	4.129.898.574	0,77
1.3.4.	Dana Penyesuaian	5.036.850.000	2,20	22.061.081.609	6,18	92.474.340.000	19,23	21.436.673.000	4,33	30.364.153.000	5,68
	- DPDF/PPD			15.533.081.609			-				
	- DPID					29.700.000.000					
	- DPPID					19.645.276.000					
	- DPPIP			450.000.000							
	- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD + Tunjangan Profesi Guru	5.036.850.000		6.078.000.000		6.278.250.000		21.436.673.000		30.364.153.000	
	- Dana BOS					36.850.814.000					
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya	2.058.500.000	0,90	1.708.900.000	0,48		-		-		-
1.3.6	Pendapatan Lainnya		-	1.088.426.547	0,31	111.507.657	0,02	3.915.873.929	0,79		-
	JUMLAH PENDAPATAN	229.207.466.252	100,00	356.799.632.796	100,00	480.926.957.160	100,00	494.797.187.211	100,00	534.836.240.357	100,00

Perkembangan kemampuan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada kurun waktu 5 tahun sejak 2009 sampai 2013 menunjukkan perkembangan cukup baik ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD tersebut secara proporsional belum sebanding dengan besarnya Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH), namun sebagai daerah otonomi baru sudah menunjukkan perbaikan.

Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kab. Manggarai Timur Thn 2009-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	Rata rata Pertumbuhan
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	117,20	51,67	18,64	29,00	54,13
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	206,60	27,03	60,56	10,95	76,29
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8,61	28,23	181,89	9,45	57,05
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	968,75	274,04	62,04	101,63	351,62
1.1.4	Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah	132,82	50,43	(39,93)	27,49	42,70
1.2	Dana Perimbangan	47,15	16,10	20,78	6,67	22,68
1.2.1	Dana bagi Hasil Pajak	157,03	(8,54)	(20,99)	9,92	34,36
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	(94,91)	98,89	(28,08)	(12,87)	(9,24)
1.2.3	Dana Bagi Hasil Cukai		100,00		(100,00)	-
1.2.4	Dana Alokasi umum	48,89	15,03	15,78	12,47	23,04
1.2.5	Dana Alokasi khusus	37,85	36,78	56,18	(13,98)	29,21
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	250,33	228,33	(69,55)	19,29	107,10
1.3.1.	Pendapatan Hibah					-
1.3.2.	Dana Darurat					-
1.3.3.	Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi	250,22	(41,57)	50,10	15,87	68,66
1.3.4.	Dana Penyesuaian	337,99	319,17	(76,82)	41,65	155,50
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	(16,98)	100,00		-	20,76
1.3.6	Pendapatan Lainnya		(89,76)	3.411,75	(100,00)	805,50
	JUMLAH PENDAPATAN	55,67	34,79	2,88	8,09	25,36

Dari tabel diatas tergambar bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2009-2013 sebesar 25,36 %. Dana Perimbangan, walaupun pertumbuhan Dana Perimbangan sebesar 22,68% per tahun (lebih kecil dari pertumbuhan PAD sebesar 54,13%/tahun), namun kontribusinya terhadap total pendapatan sangat besar yaitu sebesar 89,87%. Dan jika dilihat dari komposisi pendapatan tergambar bahwa persentase PAD terhadap total pendapatan daerah sangat kecil sekali, yaitu hanya rata-rata 3 %.

Struktur pendapatan ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan Kabupaten Manggarai Timur masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat, atau secara umum APBD Kabupaten Manggarai Timur masih belum mandiri. Salah satu kelemahan dari struktur pendapatan seperti ini adalah relatif tingginya ketidakpastian pendapatan dalam rangka perencanaan anggaran.

a) PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Pemerintah Daerah telah berusaha meningkatkan PAD dan upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan yaitu dengan rata rata pertumbuhan sebesar 54,13 %, namun perkembangan kenaikan PAD tersebut pada setiap tahunnya belum pernah mencapai target PAD yang telah ditetapkan di dalam APBD. Jika dibandingkan

antara tahun 2009 dengan 2013 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu meningkat hingga 400 % yaitu dari Rp 3.906.296.898 ditahun 2009 menjadi 19.693.795.934 ditahun 2013.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kontribusi Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sangat besar yaitu rata rata 89 % dengan tingkat pencapaian realisasai 100%. Pertumbuhan Dana Perimbangan diatas rata rata nasional yaitu sebesar 22,68%. Jika dibandingkan penerimaan dari Dana Perimbangan antara tahun 2009 dengan 2013 mengalama peningkatan sebesar 121 % yaitu dari Rp 217.045.516.728 ditahun 2009 menjadi Rp 480.648.392.849 ditahun 2013.

c) Lain lain Pendapatan Daerah yang sah

Jenis Pendapatan untuk Lain lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Propinsi, Dana Penyesuaian, Bantuang Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya, serta Pendapatan Lainnya. Realiasai jumlah pendapatan dari Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah pada setiap tahunnya mengalam fluktuasi yang cukup besar terutama pada tahun 2010 sebesar Rp 28.922.036.581 lalu naik ditahun 2011 menjadi Rp 94.960.317.627 tetapi kembali turun ditahun 2012 menjadi Rp 28.916.714.724 ditahun 2012. Tingginya penerimaan di tahun 2011 karena pada Dana Penyesuaian terdapat beberapa jenis pendapatan dari pemerintah pusat diantaranya Dana DPID, DPPID dan Dana BOS. Tetapi di tahun 2012 dana dana tersebut sudah tidak ada lagi (khusus Dana BOS masuk menjadi bagian pendapatan pemerintah provinsi).

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur selama kurun waktu 2009-2013 seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.4. Neraca Kab. Manggarai Timur Tahun 2009-2013

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	ASET					
1.1	Aset Lancar	25.831.005.677	65.475.707.053	68.265.383.794	14.145.538.143	25.392.715.787

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.2	Investasi Jangka Panjang	6.716.939.000	6.203.117.000	10.807.959.000	15.190.053.328	20.000.000.000
1.3	Aset Tetap	64.852.158.909	182.380.767.672	352.046.151.882	605.616.551.372	756.385.107.862
1.4	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.5	Aset Lainnya	290.131.607	412.988.607	290.131.607	290.131.607	1.039.044.607
	JUMLAH ASET	97.690.235.193	254.472.580.332	431.409.626.283	635.242.274.450	802.816.868.256
2.	KEWAJIBAN					
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	-	-	7.293.337.239	11.650.826.884	404.988.921
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-			
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	7.293.337.239	11.650.826.884	404.988.921
3.	EKUITAS DANA					
3.1	Ekuitas Dana Lancar	25.831.005.677	65.475.707.053	60.972.046.555	2.494.711.259	24.987.726.866
3.2	Ekuitas Dana Investasi	71.859.229.516	188.996.873.279	363.144.242.489	621.096.736.307	777.424.152.469
3.3	Ekuitas Dana Cadangan					
	JUM. EKUITAS DANA	97.690.235.193	254.472.580.332	424.116.289.044	623.591.447.566	802.411.879.335
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	97.690.235.193	254.472.580.332	431.409.626.283	635.242.274.450	802.816.868.256

Tabel 3.5. Rata rata Pertumbuhan Neraca Kab. Manggarai Timur Tahun 2009-2013

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013
1.	ASET				
1.1	Aset Lancar	153,26	4,35	(79,28)	79,82
1.2	Investasi Jangka Panjang	(7,65)	74,23	40,55	31,67
1.3	Aset Tetap	181,23	93,03	72,03	24,90
1.4	Dana Cadangan				
1.5	Aset Lainnya	42,35	(29,75)		258,13
	JUMLAH ASET	160,43	69,57	47,25	26,39
2.	KEWAJIBAN				
2.1	Kewajiban Jangka Pendek			59,75	(95,40)
2.2	Kewajiban Jangka Panjang				
	JUMLAH KEWAJIBAN			59,75	(95,40)
3.	EKUITAS DANA				
3.1	Ekuitas Dana Lancar	153,26	(6,80)	(95,91)	898,00
3.2	Ekuitas Dana Investasi	163,01	92,14	71,03	25,17
3.3	Ekuitas Dana Cadangan				
	JUM. EKUITAS DANA	160,43	66,70	47,03	28,66
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	160,43	69,57	47,25	26,39

Selama kurun waktu 2009-2013, perkembangan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengalami perkembangan yang meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 75,91%. Nilai aset daerah meningkat sangat signifikan yaitu sebesar Rp 705.126.633.063 (721 %) dari Rp 97.690.235.193 ditahun 2009 menjadi Rp 802.816.868.256 ditahun 2013. JumlahAset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka

panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan), dan aset lainnya, semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya harus diselesaikan di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -17,83%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kewajiban pemerintah dari tahun ke tahun.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2013 mencapai Rp.802.816.868.256, dan mengalami pertumbuhan dari 2009-2013 dengan rata-rata 101,21 %.

3.1.3 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio likuiditas dan solvabilitas yang digunakan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 -2013

No	Uraian	2011	2012	2013
1	Rasio Lancar	9,36	1,21	62,70
2	Rasio Quick	8,91	0,77	49,73
3	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,02	0,02	0,0005
4	Rasio Hutang terhadap modal	0,02	0,02	0,0005

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.7. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun Anggaran 2009			Tahun Anggaran 2010			Tahun Anggaran 2011			Tahun Anggaran 2012			Tahun Anggaran 2013		
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%
2	BELANJA DAERAH															
2.1	Belanja Tidak Langsung	115.940.623.963	108.631.253.927	93,70	153.494.879.734	145.750.048.060	94,95	195.325.826.253	196.157.721.476	100,43	225.245.181.495	223.786.550.967	99,35	260.818.994.125	259.867.273.398	99,64
2.1.1	Belanja Pegawai	109.691.634.663	102.479.897.978	93,43	137.878.238.894	130.643.334.660	94,75	163.604.434.933	165.230.632.186	100,99	196.869.844.495	196.699.256.327	99,91	219.664.546.485	218.788.385.758	99,60
2.1.2	Belanja Bunga															
2.1.3	Belanja Subsidi															
2.1.4	Belanja Hibah	650.000.000	650.000.000	100,00	1.550.000.000	1.300.000.000	83,87	12.611.041.000	11.871.290.250	94,13	2.800.000.000	2.550.000.000	91,07	17.493.700.000	17.493.700.000	100,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.087.500.000	1.037.166.649	95,37	1.314.000.000	1.314.000.000	100,00	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	100.000.000	88.550.000	88,55	80.000.000	80.000.000	100,00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	4.473.989.300	4.443.989.300	99,33	12.652.640.840	12.492.713.400	98,74	16.110.350.320	16.055.799.040	99,66	24.475.337.000	24.398.744.640	99,69	23.364.637.640	23.289.077.640	99,68
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	37.500.000	20.200.000	53,87	100.000.000	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	50.000.000	5,00	216.110.000	216.110.000	100,00
2.2	Belanja Langsung	119.371.430.009	105.780.523.376	88,61	239.401.771.722	169.580.731.097	70,84	353.381.917.567	284.812.365.364	80,60	358.726.200.404	327.795.642.283	91,38	267.377.454.210	247.239.067.055	92,47
2.2.1	Belanja Pegawai	6.628.895.500	6.521.090.500	98,37	9.171.180.210	5.451.159.658	59,44	17.379.307.040	14.748.669.620	84,86	14.353.161.981	13.615.506.702	94,86	16.081.586.500	14.783.139.550	91,93
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.566.475.450	45.416.015.458	91,63	54.604.229.680	45.119.239.532	82,63	81.397.964.331	68.956.772.656	84,72	100.141.848.938	88.953.291.317	88,83	100.649.240.735	90.923.988.813	90,34
2.2.3	Belanja Modal	63.176.059.059	53.843.417.418	85,23	175.626.361.832	119.010.331.907	67,76	254.604.646.196	201.106.923.088	78,99	244.231.189.485	225.226.844.264	92,22	150.646.626.975	141.531.938.692	93,95
	JUMLAH BELANJA	235.312.053.972	214.411.777.303	91,12	392.896.651.456	315.330.779.157	80,26	548.707.743.820	480.970.086.840	87,66	583.971.381.899	551.582.193.250	94,45	528.196.448.335	507.106.340.453	96,01

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2009-2013, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selama periode Tahun Anggaran 2009-2013, jumlah Belanja mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari Rp 214.411.777.303 di tahun 2009 menjadi Rp 507.106.340.453 di tahun 2013. Dengan jumlah seluruhnya untuk target Belanja Daerah sebesar Rp. 2.289.088.389.482 dengan realisasi sebesar Rp. 2.070.714.537.952 atau 90 %.

Tabel 3.8. Proporsi Realisasi Belanja

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
2	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Tidak Langsung	50,66	46,22	40,78	40,57	51,25
2.1.1	Belanja Pegawai	47,80	41,43	34,35	35,66	43,14
2.1.2	Belanja Bunga					
2.1.3	Belanja Subsidi					
2.1.4	Belanja Hibah	0,30	0,41	2,47	0,46	3,45
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,48	0,42	0,42	0,02	0,02
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	2,07	3,96	3,34	4,42	4,59
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	0,01		0,21	0,01	0,04
2.2	Belanja Langsung	49,34	53,78	59,22	59,43	48,75
2.2.1	Belanja Pegawai	3,04	1,73	3,07	2,47	2,92
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,18	14,31	14,34	16,13	17,93
2.2.3	Belanja Modal	25,11	37,74	41,81	40,83	27,91
	JUMLAH BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3.9. Proporsi Realisasi Struktur Belanja Langsung dan Tidak Langsung

TAHUN ANGGARAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG		TOTAL BELANJA
	Rp	%	Rp	%	Rp
2009	108.631.253.927	50,66	105.780.523.376	49,34	214.411.777.303
2010	145.750.048.060	46,22	169.580.731.097	53,78	315.330.779.157
2011	196.157.721.476	40,78	284.812.365.364	59,22	480.970.086.840
2012	223.786.550.967	40,57	327.795.642.283	59,43	551.582.193.250
2013	259.000.915.403	50,94	249.418.785.999	49,06	508.419.701.402
Jumlah	933.326.489.833	45,07	1.137.388.048.119	54,93	2.070.714.537.952

Bila struktur belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dibandingkan antara Belanja Langsung dan Tidak Langsung, rata-rata menunjukkan bahwa Belanja Langsung (54,93%) lebih besar dari pada Belanja Tidak Langsung (45,07%).

Pada Belanja Tidak Langsung selama periode Tahun Anggaran 2009-2013 terealisasi sebesar Rp. 933.326.489.833 atau 98 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 950.825.505.570 sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.10. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2009-2013

TAHUN ANGGARAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
2009	115.940.623.963	108.631.253.927	94
2010	153.494.879.734	145.750.048.060	95
2011	195.325.826.253	196.157.721.476	100,4
2012	225.245.181.495	223.786.550.967	99
2013	260.818.994.125	259.000.915.403	99
Jumlah	950.825.505.570	933.326.489.833	98

Tabel 3.11. Rata Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	34,17	34,59	14,09	16,12
2.1.1	Belanja Pegawai	27,48	26,47	19,05	11,23
2.1.2	Belanja Bunga				
2.1.3	Belanja Subsidi				
2.1.4	Belanja Hibah	100,00	813,18	(78,52)	586,03
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	26,69	52,21	(95,57)	(9,66)
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	181,11	28,52	51,96	(4,55)
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	(100,00)		(95,00)	332,22

Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya mengalami peningkatan, khusus pada Belanja Tidak Langsung yang wajib yaitu Belanja Pegawai mengalami peningkatan karena adanya penambahan jumlah pegawai serta adanya kenaikan gaji. Sedangkan pada Belanja Hibah mengalami peningkatan yang sangat besar ditahun 2013 dikarenakan adanya kegiatan Pemilukada.

Tabel 3.12. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
A	Belanja Tidak Langsung	102.479.897.978	130.643.334.392	165.518.584.436	196.907.073.854	218.501.726.320
1	Belanja Pegawai (PNS)	99.017.318.994	127.220.694.921	160.765.669.272	192.103.991.587	213.620.911.782
2	Belanja Kepala Daerah	150.693.075	154.660.000	354.838.952	484.838.952	484.710.816
3	Belanja DPRD	3.251.290.150	3.267.979.471	4.110.123.962	4.110.452.788	4.106.944.284
4	Biaya pemungutan pajak	60.595.759	-	287.952.250	207.790.527	289.159.438
B	Belanja Langsung	6.521.090.500	5.451.159.658	14.748.669.620	13.615.506.702	14.783.139.550
1	Belanja Pegawai	6.521.090.500	5.451.159.658	14.748.669.620	13.615.506.702	14.783.139.550
	JUMLAH BELANJA	109.000.988.478	136.094.494.050	180.267.254.056	210.522.580.556	233.284.865.870

Lalu dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir seperti yang tercantum pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (RP)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	Prosentase (a/b) *100
		A	B	
1	Tahun 2009	109.000.988.478	215.116.222.394	50,67
2	Tahun 2010	136.094.494.050	377.152.294.996	36,08
3	Tahun 2011	180.267.254.056	485.658.828.614	37,12
4	Tahun 2012	210.522.580.556	541.722.216.370	38,86
5	Tahun 2013	233.284.865.870	515.111.749.402	45,29

Pada tabel 3.12 dan 3.13 tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang semula ditahun 2009 lebih besar dari belanja untuk kebutuhan public ditahun tahun berikutnya menjadi lebih kecil, hal ini menunjukkan belanja daerah sangat berpihak untuk kebutuhan langsung masyarakat. Data ini merupakan dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Setelah mengetahui perilaku belanja untuk kebutuhan aparatur, dilakukan analisis belanja periodik dan pengeluaranpembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) Pencairan Dana Cadangan, (c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (d) Penerimaan Pinjaman Daerah, (e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, (f) penerimaan piutang daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2009-2013 Penerimaan Pembiayaan kabupaten Manggarai Timur sebesar terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), Koreksi (*contra post*), dan Pencairan Dana Cadangan.

Realisasi penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2009-2013 sebesar Rp. 156.840.081.718 sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 22.829.416.000.

Tabel 3.14. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2009-2013

TAHUN ANGGARAN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN NETTO
2009	15.301.819.655	1.750.000.000	13.551.819.655
2010	24.291.605.494	3.500.000.000	20.791.605.494
2011	62.267.161.783	4.600.000.000	57.667.161.783
2012	57.681.270.738	6.287.368.000	51.393.902.738
2013	(2.701.775.952)	6.692.048.000	(9.393.823.952)
Jumlah	156.840.081.718	22.829.416.000	134.010.665.718

Pada Penerimaan Pembiayaan sebagian besar bersumber dari SILPA terutama untuk pembayaran belanja pada belanja modal yang harus dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan terutama diperuntukkan untuk Penyertaan Modal pada Bank NTT sebagai salah satu sumber PAD. Jumlah Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada Bank NTT hingga akhir tahun 2013 sejumlah Rp 20.000.000.000.- dengan perincian seperti pada table berikut ini :

Tabel 3.15. Penyertaan Modal pada Bank NTT

No	Tahun Anggaran	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)
1.	2008	250.000.000.-
2.	2009	1.750.000.000.-
3.	2010	3.500.000.000.-
4.	2011	4.500.000.000.-
5.	2012	5.000.000.000.-
6.	2013	5.000.000.000.-
	Jumlah	20.000.000.000.-

Tujuan dilakukan Analisis pembiayaan daerah adalah untuk mendapatkan gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup defisit riil, untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Pada Penerimaan Pembiayaan sebagian besar bersumber dari SILPA terutama untuk pembayaran belanja pada belanja modal yang harus dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan terutama diperuntukkan untuk Penyertaan Modal pada Bank NTT sebagai salah satu sumber PAD.

Tabel 3.16. Realisasi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	229.207.466.252	356.799.632.796	480.926.957.160	494.797.187.211	534.836.240.357
	dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	214.411.777.303	315.330.779.157	480.970.086.840	551.582.193.250	507.106.340.453
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.750.000.000	3.500.000.000	4.600.000.000	6.287.368.000	6.692.048.000
A.	Defisit Riil	13.045.688.949	37.968.853.639	(4.643.129.680)	(63.072.374.039)	21.037.851.904
1	SILPA TA sebelumnya	11.245.916.545	24.433.307.994	62.324.400.418	57.678.550.087	(4.393.823.951)
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Penerimaan Pinjaman Daerah					
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah		141.702.500		997.279.349	1.787.922.995
5	Penerimaan Piutang Daerah					
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	11.245.916.545	24.575.010.494	62.324.400.418	58.675.829.436	(2.605.900.956)
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan TA berkenaan	24.291.605.494	62.543.864.133	57.681.270.738	(4.396.544.603)	18.431.950.948

Tabel 3.17. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No	Uraian	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	SILPA TA sebelumnya	86,20	64,35	(1.342,29)	91,45	20,89
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah	-	0,37	-	1,58	8,50
5	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Realisasi penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2009-2013 sebesar Rp. 154.098.594.694 sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 22.829.416.000. Sehingga realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp 131.149.178.694. Selain itu dilakukan juga Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SILPA Pemerintah Daerah ditunjukkan oleh Tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.18. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Manggarai Timur TA 2009-2012

No	Uraian	2009		2010		2011		2012	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Jumlah SILPA	24.291.605.494		62.324.400.418		57.681.270.738		(4.393.823.951)	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	(5.593.703.102)	-23,03	(1.341.353.805)	-2,15	(1.277.121.834)	-2,21	(2.027.377.502)	46,14
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(970.272)	0,00	5.328.835.353	8,55	(888.163.779)	-1,54	(12.119.772.953)	275,84
4	Pelampauan Penerimaan Lain lain pendapatan daerah yang sah	4.490.085.654	18,48	(19.292.894.714)	30,96	(7.766.805.034)	13,47	(22.473.078.305)	511,47
5	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	25.396.193.214	104,55	72.421.673.809	116,20	15.361.769.698	26,63	(13.213.304.522)	300,72
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai akhir tahun belum selesai	0	0,00	5.208.139.775	8,36	52.251.591.687	90,59	45.439.709.331	-1.034,17

3.3 Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan perlu dilakukan Analisis kerangka pendanaan. Adapun Langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung sebelumnya dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran perlu dilakukan Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya

Tabel 3.19. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

NO	URAIAN	2012	2013	TK PERTUMBUHAN (%)
I	Belanja Tidak Langsung	224.365.553.281	244.118.026.320	9
1	Belanja Gaji & Tunjangan	168.596.218.079	183.256.758.782	8
2	Belanja DPRD	4.096.676.923	4.106.944.284	2,5
3	Belanja Op Kepala Daerah	483.499.039	484.710.816	2,5
4	Insentif Pungutan Pajak	288.436.539	289.159.438	2,5
5	Tamsil + TPG	27.327.737.700	30.364.153.000	10
6	Belanja Ban Sosial	350.000.000	350.000.000	0
7	Belanja Hibah	2.250.000.000	2.400.000.000	7
8	Bantuan Keuangan ke Desa	16.972.985.000	17.866.300.000	5
9	Bantuan Keuangan Lainnya	3.000.000.000	4.000.000.000	25
10	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	0
II	Belanja Langsung	2.750.000.000	3.000.000.000	9
	-Belanja Jasa Kantor	2.750.000.000	3.000.000.000	9
III	Pengeluaran Pembiayaan	5.500.000.000	6.500.000.000	18
	-Penyertaan Modal	4.500.000.000	5.000.000.000	11
	- Pemberian Pinjaman	1.000.000.000	1.500.000.000	50
IV	Total Belanja Wajib serta Pengeluaran Wajib Yang Mengikat	232.615.553.281	253.618.026.320	9

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.3.1.1 Proyeksi Data Masa Lalu

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah, hal ini karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi : proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2009-2013

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Namun dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2009-2012 adalah

data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggung jawaban APBD. Sedangkan untuk APBD Tahun 2013 belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2009-2013 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Selama Periode Tahun Anggaran 2009-2013, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

- 1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah;
- 2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah;
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya
- 4) Peningkatan kualitas hubungan dengan pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2009-2013, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2009-2013 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain :

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan.

3. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur.
4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
5. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM).
6. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
7. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - d) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan yang digunakan untuk pemberian bantuan keuangan kepada Desa serta Dana pendamping program PNPM, Pamsimas serta program pemerintah pusat lainnya yang membutuhkan dana pendampingan yang dikelola langsung oleh kelompok masyarakat.
 - e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, dan (b) pengeluaran pembiayaan.

1) Proyeksi pendapatan

Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun. Proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima tahun (2009-2013). Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 569.839.485.845, dan meningkat menjadi Rp. 614.487.853.946 pada tahun 2015,

Rp 665.494.038.972 pada Tahun 2016, Rp 721.656.027.491 pada Tahun 2017, Rp 783.237.904.478 pada Tahun 2018 dan Rp 850.450.126.020 pada Tahun 2019. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2014-2019, pendapatan akan menjadi Rp. 4.205.165.436.752.-. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Adapun proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.19. Proyeksi Pendapatan Tahun 2014 - 2019

NO	URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	PENDAPATAN	572.576.930.845	615.987.853.946	665.494.038.972	721.656.027.491	783.237.904.478	850.450.126.020
A	PADS	19.737.445.000	20.000.000.000	21.000.000.000	24.000.000.000	27.000.000.000	30.000.000.000
B	DANA PERIMBANGAN	510.758.827.000	553.586.515.700	601.195.167.270	653.439.683.997	711.033.652.397	774.237.017.636
	- DBH PAJAK	12.700.000.000	13.000.000.000	13.250.000.000	13.500.000.000	14.000.000.000	14.500.000.000
	- DAU	421.442.287.000	463.586.515.700	509.945.167.270	560.939.683.997	617.033.652.397	678.737.017.636
	- DAK	76.616.540.000	77.000.000.000	78.000.000.000	79.000.000.000	80.000.000.000	81.000.000.000
C	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.080.658.845	42.401.338.246	43.298.871.702	44.216.343.494	45.204.252.082	46.213.108.384
	- Hibah	861.540.000	861.540.000	861.540.000	861.540.000	861.540.000	861.540.000
	- Bagi Hasil Pajak Provinsi	4.496.165.845	4.500.000.000	4.600.000.000	4.700.000.000	4.850.000.000	5.000.000.000
	- Cukai Tembakau	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
	- Tamsil Guru + TPG	30.364.153.000	31.901.338.246	32.698.871.702	33.516.343.494	34.354.252.082	35.213.108.384
	- Bantuan Keuangan Prov	358.800.000	358.800.000	358.800.000	358.800.000	358.800.000	861.540.000

- 2) Proyeksi Dana Pembangunan yang bersumber dari Dana Provinsi dan APBN (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi) Untuk memperkirakan besarnya Dana APBN (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi) yang akan dialokasikan untuk pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur pada TA 2014 – 2019 hanya berdasarkan realisasi dana pembangunan pada tahun 2009-2014, namun angka perkiraan tersebut sangat relative sekali mengingat tidak ada ketentuan yang mengatur besarnya bantuan untuk daerah kabupaten. Adapun perkiraannya adalah sbb :

Tabel 3.20. Perkiraan Alokasi Dana Pembangunan yang bersumber dari APBN (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi).

No	Program	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1.	Desa Mandiri Anggur Merah	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
2.	PNPM Mandiri Pedesaan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
3.	PNPM GSC	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4.	PPIP	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.	Bantuan Perumahan	7.500.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000	12.500.000	12.500.000	15.000.000
6.	KPDT	10.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000	15.000.000	15.000.000
7.	Dana Alokasi Desa	-	32.000.000	64.000.000	80.000.000	96.000.000	112.000.000	128.000.000
		51.750.000	85.750.000	120.250.000	137.250.000	155.750.000	173.750.000	189.750.000

3) **Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama**

Proyeksi Belanja dan pengeluaran **wajib mengikat serta prioritas utama** tahun 2014-2019 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21. Pengeluaran Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun Anggaran 2014 – 2019

NO	URAIAN	DATA THN DASAR 2013	TK PERTUM BUHAN(%)	PROYEKSI					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Belanja Tidak Langsung	236.368.026.320		260.646.528.160	299.730.558.210	312.843.647.659	324.481.202.605	356.816.530.300	351.048.879.547
1	Belanja Gaji & Tunjangan	183.256.758.782	8	204.870.436.434	215.042.662.620	222.569.155.812	228.133.384.707	233.836.719.325	240.851.820.904
2	Belanja DPRD	4.106.944.284	2,5	4.209.617.891	4.314.858.338	4.422.729.797	4.533.298.042	4.646.630.493	4.762.796.255
3	Belanja Op Kepala Daerah	484.710.816	2,5	496.828.586	509.249.301	521.980.534	535.030.047	548.405.798	562.115.943
4	Insentif Pungutan Pajak	289.159.438	2,5	296.388.424	303.798.135	311.393.088	319.177.915	327.157.363	335.336.297
5	Tamsil + TPG	30.364.153.000	2,5	31.123.256.825	31.901.338.246	32.698.871.702	33.516.343.494	34.354.252.082	35.213.108.384
6	Bantuan Keuangan ke Desa	17.866.300.000		19.650.000.000	47.658.651.570	52.319.516.727	57.443.968.400	63.103.365.240	69.323.701.764
7	Bantuan Pemilikada							20.000.000.000	
II	Belanja Langsung	3.000.000.000		3.250.000.000	13.250.000.000	13.500.000.000	15.500.000.000	14.750.000.000	15.250.000.000
	-Belanja Jasa Kantor	3.000.000.000		3.250.000.000	3.250.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000
	-Belanja Makan Minum Pegawai				10.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.500.000.000

III	Pengeluaran Pembiayaan			1.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000
	-Penyertaan Modal				10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	- Pemberian Pinjaman			1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
IV	Total Belanja Wajib serta Pengeluaran Wajib Yang Mengikat	239.368.026.320		265.396.528.160	324.480.558.210	337.843.647.659	350.481.202.605	383.066.530.300	377.798.879.547

3.3.1.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang (2014-2019), kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Timur diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

Berdasarkan data dalam kurun waktu 5 tahun 2009-2013 daya serap anggaran, pada belanja langsung rata-rata hanya mampu menyerap 85% anggaran. Berdasarkan data tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan kemampuan pengelolaan keuangan dari setiap SKPD semakin baik maka diperkirakan SILPA rata rata sebesar 2 % pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila SILPA pada akhir tahun terealisasikan diatas 2 %, selisih tersebut akan diprioritaskan pada penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan.

Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.22. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 2014 – 2019

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pendapatan	572.576.930.845	615.987.853.946	665.494.038.972	721.656.027.491	783.237.904.478	850.450.126.020
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.	SILPA	18.431.950.948	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	16.000.000.000
4.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.732.032.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	Total Penerimaan	592.740.913.793	632.487.853.946	681.994.038.972	738.156.027.491	799.737.904.478	867.950.126.020
	Dikurangi						
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yg Wajib & Mengikat serta Prioritas	265.396.528.160	324.480.558.210	337.843.647.659	350.481.202.605	383.066.530.300	377.798.879.547
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	327.344.385.633	308.007.295.736	344.150.391.313	387.674.824.886	416.671.374.178	490.151.246.473

Tabel 3.23. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	327.344.385.633	308.007.295.736	344.150.391.313	387.674.824.886	416.671.374.178	490.151.246.473
Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I							
II.a	Belanja Langsung	316.843.065.168	309.307.295.736	345.050.391.313	389.024.824.886	417.721.374.178	491.651.246.473
II.b	Pembentukan Cadangan						
	Dikurangi						
II.c	Belanja Langsung yg wajib dan mengikat serta prioritas utama	3.250.000.000	13.250.000.000	13.500.000.000	14.500.000.000	14.750.000.000	15.250.000.000
II.d	Pengeluaran Pembiayaan yg wajib mengikat serta prioritas utama	1.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I	313.593.065.168	296.057.295.766	331.550.391.313	374.524.824.886	402.971.374.178	476.401.242.473
Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II							
III.a	Belanja Tidak Langsung	274.397.848.625	311.680.558.210	325.443.647.659	337.631.202.605	370.516.530.300	364.798.879.547
	Dikurangi						
III.b	Belanja Tdk Langsung yg wajib yang mengikat serta prioritas utama	260.646.528.160	299.730.558.210	312.843.647.659	324.481.202.605	356.816.530.300	351.048.879.547
III	Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a - III.b)	13.751.320.465	11.950.000.000	12.600.000.000	13.150.000.000	13.700.000.000	13.750.000.000
	Surplus Anggaran Riil atau berimbang (I - II - III)	-	-	-	-	-	-

3.3.2. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II

Prioritas II dialokasikan belanja tidak langsung yang tidak mengikat dan wajib, seperti belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas II harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan III terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Prioritas III

Prioritas II dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat, seperti gaji dan tunjangan pegawai dan belanja alokasi dana desa

Berkaitan dengan hal tersebut Alokasi kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.24. Rencana Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Tahun 2014 s/d 2019

No	Jenis Dana	Alokasi											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1	PRIORITAS I	53,24	313.593.065.168	46,81	296.057.295.636	48,61	331.550.391.313	50,74	374.524.824.886	50,39	402.971.374.178	54,89	476.401.246.473
2	PRIORITAS II	2,32	13.751.320.465	1,89	11.950.000.000	1,85	12.600.000.000	1,78	13.150.000.000	1,71	13.700.000.000	1,58	13.750.000.000
3	PRIORITAS III	44,44	265.396.528.160	51,31	324.480.558.210	49,54	337.843.647.659	47,48	350.481.202.605	47,90	383.066.530.300	43,53	377.798.879.547
	TOTAL	100	592.740.913.793	100	632.487.853.946	100,00	681.994.038.972	100	738.156.027.491	100	799.737.904.478	100	867.950.126.020

3.4. SINERGI KEUANGAN DAERAH DENGAN KEUANGAN PEMBANGUNAN LAIN

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian target RPJMD 2009-2014, pembiayaan pembangunan tidak saja didukung oleh Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Timur tetapi juga didukung dari Dana yang bersumber APBD Provinsi, APBN, hibah internasional serta investasi swasta dan dana CSR.

3.4.1. Dana APBD Provinsi

Pemerintah Provinsi NTT untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur selama ini bentuk bantuan yang diberikan melalui kas daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Bantuan Provinsi, penerimaan ini menjadi bagian dari pendapatan Kabupaten Manggarai Timur.

Sedangkan bantuan yang diberikan kemasayarakat ada yang dikelola oleh SKPD Provinsi juga ada yang bantuan tunai langsung kelompok masyarakat melalui Program Desa / Kelurahan Mandiri Anggur Merah, bantuan yang diberikan berupa uang tunai yang akan digunakan untuk pemberdayaan ekonomi senilai Rp 250.000.000 tiap desa/kelurahan. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 dari 176 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur sudah 21 desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan, karena pola pemberian bantuan yang diberikan saat itu adalah 1 kecamatan 1 desa. Sehingga total bantuan yang telah diterima sejumlah Rp 5.250.000.000.-

Terdapat pula bantuan untuk perbaikan rumah pada masyarakat miskin sebanyak 5 unit tiap desa khususnya didesa penerima bantuan Desa Mandiri Anggur Merah.

3.4.2. Dana APBN

Pelaksanaan pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari Dana APBN terbagi atas 2 jenis yaitu Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi. Khusus untuk Dana Tugas Pembantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat ada beberapa jenis Program diantaranya Program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MP), Program PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM GSC), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP), Program Keluarga Harapan, serta Program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS).

1. Program PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM GSC

Untuk Program PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM GSC hingga saat ini jumlah bantuan yang diterima sejumlah Rp 112.747.226.000.- dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 3.25. Jumlah Bantuan Program PNPM MP dan PNPM GSC di Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2009-2012**

No	Tahun	PNPM MP	PNPM GSC
1.	2009	Rp. 6.000.000.000	Rp. 17.681.180.000
2.	2010	Rp. 14.400.000.000	Rp. 12.010.080.000
3.	2011	Rp. 14.400.000.000	Rp. 6.176.750.000

No	Tahun	PNPM MP	PNPM GSC
4.	2012	Rp. 16.200.000.000	Rp. 6.501.216.000
5.	2013	Rp. 13.960.000.000	Rp. 5.318.000.000
	Jumlah	Rp. 65.060.000.000	Rp. 47.687.226.000

2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) serta Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP), bantuan yang diberikan berupa bantuan langsung sebesar Rp 250.000.000/desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sampai dengan tahun 2013 jumlah bantuan yang diberikan untuk PPIP sebanyak Rp 20.000.000.000 kepada 80 desa, sedangkan melalui Program P4IP sebanyak Rp 4.500.000.000 untuk 18 desa/kelurahan.

Tabel 3.26. Jumlah Bantuan Program PPIP di Kab.Manggarai Timur TA. 2009-2013

No	Tahun	Jumlah Desa	Rp
1.	2009	-	-
2.	2010	3	Rp. 750.000.000
3.	2011	10	Rp. 2.500.000.000
4.	2012	12	Rp. 3.000.000.000
5.	2013	55	Rp. 13.750.000.000
	Jumlah	80	Rp. 20.000.000.000

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan di Kabupaten Manggarai Timur baru dimulai pada tahun 2013, jumlah total nominal bantuan senilai Rp 5.072.900.000.-, jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin yang mendapat bantuan sebanyak 6.918 KK. Dengan perincian 776 orang ibu hamil, 6.501 orang balita, 10.210 siswa SD dan 2.128 siswa SMP.

4. Program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS).

Program ini adalah program bantuan untuk perbaikan rumah yang dilaksanakan dari Kementerian Perumahan Rakyat, sejak tahun 2009 hingga 2013 jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapat bantuan sebanyak 2.942 KK dengan total bantuan senilai Rp 19.801.500.000.-. Adapun perinciannya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.27. Jumlah Bantuan BSPS di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2013

No	Tahun	Jumlah Rumah	Nilai Bantuan (Rp)	Jumlah Bantuan
1.	2009	50 Unit	Rp 5.000.000/unit	Rp 250.000.000.-
2.	2010	100 Unit	Rp 5.000.000/unit	Rp 500.000.000.-
		50 Unit	Rp 10.000.000/unit	Rp 500.000.000.-
3.	2011	200 Unit	Rp 5.000.000/unit	Rp 1.000.000.000.-
4.	2012	1.006 Unit	Rp 6.000.000/unit	Rp 6.054.000.000.-
5.	2013	1.533 Unit	Rp 7.500.000/unit	Rp 11.497.500.000.-
	Jumlah	2.942 Unit		Rp 19.801.500.000.-

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah terkait Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Perumusan permasalahan pembangunan dan penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah. Rumusan permasalahan pembangunan ini menjadi dasar penyusunan program prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Timur dalam waktu 5 tahun mendatang.

1) Urusan Pendidikan

Salah satu indikator terlaksananya dengan baik pendidikan untuk masyarakat dapat diketahui dengan meningkatnya angka melek huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat tersebut. Indikator ini juga dapat menggambarkan mutu dari SDM yang ada di suatu wilayah yang diukur dalam aspek pendidikan, karena semakin tinggi angka kecakapan baca tulis maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sektor pendidikan Kabupaten Manggarai Timur pada periode tahun 2009-2014 mengalami perbaikan dan peningkatan dalam upaya pembangunan sumber daya manusia, tetapi masih perlu dilakukan peningkatan untuk mencapai/melampaui standart nasional. Pada tahun 2013 angka melek huruf di kabupaten ini sebesar 91,04 %. Ini berarti bahwa masih ditemukan 8,6% yang terindikasi buta huruf. Beberapa permasalahan pada bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

- Rendahnya Angka Partisipas Kasar (APK) untuk jenjang SMA/MA/MK, menunjukkan masih banyak jumlah penduduk yang berumur 15 sampai 18 tahun yang belum menduduki jenjang Pendidikan SMA/MA/MK. Hal ini juga didukung oleh rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP/MT/Paket B
- Angka putus sekolah/Drop Out di Manggarai Timur pada setiap jenjang pendidikan perlu perhatian serius dari pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang ada di Manggarai Timur. Sampai dengan tahun 2013, Angka Putus Sekolah (APS) di tingkat SD / MI sebesar 0,66%, ditingkat SMP / MTs sebesar 0,61% dan untuk SMA / MA / SMK sebesar 0,97 Siswa.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan kependidikan, yang disertai distribusinya yang belum merata. Sampai dengan tahun 2013 jumlah guru SD/MI adalah 1.403 orang dengan jumlah murid sebanyak 40.593 orang atau dapat dikatakan bahwa 1 orang guru melayani 29 orang murid, sedangkan idealnya 1 berbanding 15 sampai 20 orang murid. Jumlah Guru SMP/MTs sebanyak 425 orang dengan jumlah murid sebanyak 15.200 orang atau 1 orang guru melayani 36 murid, sedangkan idealnya 1 berbanding 10 – 15 murid. Jumlah Guru SMA/MA/SMK sebanyak 199 orang

dengan jumlah murid sebanyak 6.540 orang atau 1 orang guru melayani 33 murid, sedangkan idealnya 1 berbanding 10 – 15 murid.

- Masih rendahnya kualitas ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ditandai dengan ratio perbandingan antara ruang kelas terhadap jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI jumlah ruang kelas sebanyak 2.172 RK dengan jumlah murid sebanyak 40.593 orang atau ratio perbandingan antara ruang kelas dan jumlah murid adalah 1 berbanding 19 orang dan sudah memenuhi standar yaitu 1 berbanding 20 orang. Meskipun demikian secara kualitas masih sangat memprihatinkan karena banyak ruang kelas yang rusak dan tidak layak. Pada jenjang pendidikan SLTP/MTs jumlah ruang kelas baru mencapai 145 RK dengan jumlah murid tercatat 15.200 orang atau ratio perbandingan 1 berbanding 104 orang, idealnya 1 berbanding 20 orang. Pada jenjang pendidikan SLTA/MA jumlah ruang kelas sebanyak 152 RK dengan jumlah murid sebanyak 6.540 orang atau 1 berbanding 43 orang, idealnya 1 berbanding 20 orang.
- Lokasi dan sarana prasarana sekolah yang secara umum belum mawadahi kebutuhan tumbuh kembang anak.
- Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- Pergerakan anak bersekolah yang lintas wilayah, sehingga beban pelayanan pendidikan tidak seimbang.

2) Bidang Kesehatan

- Masih Rendahnya Kualitas kesehatan Masyarakat, Indikator yang menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat adalah Tingkat Kematian Bayi (AKB), Angka kematian kasar, Tingkat kematian ibu selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas, dan umur harapan hidup. Hasil analisis menunjukkan bahwa angka kematian bayi pe 1000 KH masih relative tinggi sebesar 10,81, angka kematian balita per 1000KH sebesar 0,67 dan angka kematian ibu per 1000KH sebesar 2,00. Rendahnya kualitas hidup ini disebabkan oleh beberapa faktor; rendahnya daya beli masyarakat membiayai kebutuhan pelayanan kesehatan dasar, pola hidup tidak sehat karena tekanan ekonomi, akses terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan yang masih sulit karena topografi wilayah, infrastruktur jalan yang rusak, rasio yang tidak seimbang antara tenaga medis dan para medis dibanding jumlah penduduk di Manggarai Timur.
- Belum tersedianya rumah sakit umum daerah dan minimnya sarana dan prasarana kesehatan dasar lainnya yang belum sesuai standart Indonesia Sehat Tahun 2015. Sampai dengan tahun 2013 jumlah Puskesmas di Kabupaten Manggarai Timur baru mencapai 20 unit, yang berarti bahwa 1 unit Puskesmas dapat melayani 14.457 jiwa penduduk Manggarai Timur.
- Masih rendahnya usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Manggarai Timur. Sampai dengan tahun 2013, angka harapan hidup Kabupaten Manggarai Timur baru mencapai 62,50 tahun, sehingga berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai Timur yaitu baru mencapai 67,06 yang termasuk dalam kategori IPM Sedang.
- Minimnya tenaga kesehatan, khususnya untuk dokter dan bidan untuk 20 puskesmas yang tersebar di 9 kecamatan. Sampai dengan tahun 2013 jumlah Dokter umum baru

sebanyak 13 orang atau 1 orang dokter melayani 22.242 jiwa Penduduk Kabupaten Manggarai Timur, sementara indicator Indonesia Sehat ditetapkan 1 orang dokter melayani 2500 jiwa penduduk atau 40 orang dokter per 100.000 jumlah penduduk. Jumlah perawat sebanyak 311 orang atau ratio jumlah perawat per 100.000 jumlah penduduk baru mencapai 57,0 orang, sementara indicator Indonesia Sehat sebesar 117,5 perawat per 100.000 jumlah penduduk. Jumlah Bidan sebanyak 175 orang atau ratio bidan per 100.000 jumlah penduduk baru mencapai 33,9 bidan, sementara indicator Indonesia Sehat 100 bidan per 100.000 jumlah penduduk.

- Kabupaten Manggarai Timur masih termasuk dalam 15 Kabupaten / Kota / Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Berdasarkan hasil penelitian tahun 2013 oleh Bappeda Kabupaten Manggarai Timur, diketahui bahwa Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebesar 0,328. Meskipun IPKM tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,045 dari IPKM tahun 2010 yaitu sebesar 0,283, IPKM Kabupaten Manggarai Timur masih termasuk kategori rendah karena kurang dari angka satu (<1).

3) Pekerjaan Umum,

- Rendahnya persentase panjang jaringan jalan kabupaten Manggarai Timur yang berada dalam kondisi baik.
- Masih rendahnya kualitas infrastruktur pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Manggarai Timur. (Kesehatan, Pendidikan dan Penerangan/Energi)
- Ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah kecamatan yang berakibat tidak berkembangnya daya saing antar wilayah kecamatan dan desa;
- Ketimpangan pertumbuhan antar kawasan, antar kecamatan dan antar desa masih mewarnai perjalanan pembangunan daerah. Kurangnya pemerataan pembangunan sarana prasarana, distribusi sumberdaya yang tidak seimbang dan terhambatnya pengembangan ekonomi unggulan cukup signifikan mempengaruhi keadaan ini;
- Kurangnya jumlah irigasi dan embung yang dapat meningkatkan kemampuan penyediaan sumber air;
- Meningkatnya laju degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis, menurunnya kuantitas dan kualitas air (baik air tanah maupun air permukaan), bencana kekeringan pada lahan sawah yang mengakibatkan gagal tanam dan bahkan gagal panen akan lebih diperparah oleh dampak perubahan iklim.

4) Perumahan Rakyat

- Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni yaitu 31,75%
- Belum Optimalnya penataan kawasan pemukiman khususnya kawasan kumuh di daerah perkotaan dan kampung nelayan yang belum ditangani.
- Belum tersedianya utilitas atau sarana prasarana pendukung yang memenuhi standar rumah yang layak huni seperti :
 - Air minum bersih
 - Jamban yang sehat
 - Listrik
 - Jalan lingkungan (jalan setapak)

5) Penataan Ruang

- Rendahnya pengendalian dan pengawasan bangunan di Kabupaten Manggarai Timur
- Tingginya perubahan guna lahan
- Belum terwujudnya kawasan-kawasan strategis di kabupaten Manggarai Timur
- Rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang;
- Masih belum optimalnya pemanfaatan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dalam mengendalikan fungsi tata ruang;
- Semakin tingginya konversi (alih fungsi) lahan pertanian
- Keadaan tata ruang wilayah kabupaten dan kota belum dibuat pada tingkat skala operasional, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam membaca peta rencana tersebut

6) Perhubungan

- Kondisi ruas jalan masuk dan keluar terminal yang masih sangat sempit dan perlu adanya pelebaran jalan sehingga arus lalu lintas serta mobilitas sosial menjadi lancar
- Rendahnya jumlah rambu-rambu lalu lintas
- Rendahnya ketersediaan angkutan kota maupun kecamatan
- Di Bidang Perhubungan udara, saat ini masyarakat Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara dilayani melalui Bandar Udara Soa di Kabupaten Ngada dan Bandar Udara Frans Sales Lega di Kabupaten Manggarai. Permasalahannya kedua bandara tersebut tidak dapat melayani penerbangan sepanjang tahun karena pada musim hujan dan berkabut tidak dapat melayani, selain itu penerbangan juga hanya melayani pagi hari saja. Akibatnya masyarakat kabupaten Manggarai Timur harus menuju Bandara di Labuan Bajo yang waktu tempuhnya dari Borong sekitar 5 jam atau ke Bandara di Ende yang waktu tempuhnya sekitar 6-7 dari kota Borong.

7) Lingkungan Hidup

- Belum optimalnya upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Belum efektifnya pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; akibat pengelolaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang tidak menerapkan prinsip konservasi dan tingginya tekanan penduduk disekitar kawasan hutan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga lahan kritis yang tidak produktif setiap tahun bertambah di seluruh wilayah kabupaten.
- Belum optimalnya partisipasi yang berbasis masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Belum memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

8) Pertanahan

- Masalah tanah ulayat. Ada tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat melalui unjuk rasa dan gugatan di pengadilan terhadap tanah yang telah dikuasai oleh pemerintah maupun masyarakat lainnya. Sampai dengan tahun 2013, jumlah kasus penyerobotan tanah ulayat yang telah dikuasai pemerintah terjadi sebanyak 5 kasus yaitu Lehong, Golo Mongkok, Kalang Maghit, Nanga Lanang dan Wae Kembek.
- Masalah pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi pengendalian pertanahan selama ini dalam pelayanan pertanahan secara sporadic telah diadopsi dalam berbagai persepakatan tata usaha pertanahan, tetapi belum berjalan maksimal. Sampai dengan tahun 2013 prosentase kepemilikan tanah bersertifikat dan Akta Jual Belih Tanah baru mencapai 6,88%.
- Masalah Tanah Terlantar/Tanah Kosoap. Tanah terlantar/tanah kosoap baik yang sudah mempunyai hak menurut UUPA ataupun penguasaannya secara adat, tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai Timur dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat maupun investasi. Hal ini disebabkan karena data spesial tentang hal itu belum tersedia dengan baik. Beberapa lokasi yang perlu menjadi perhatian serius kedepan adalah satar bleng, kawasan tanjung bendera, satar ba'it, satar gising dan satar buntal.
- Masalah sengketa tanah yang selalu menjadi isu yang sangat strategis akhir-akhir ini karena jumlah penduduk semakin bertambah sedangkan luas tanah tidak bertambah, sehingga perlu dilengkapi dengan dokumen pertanahan yang baik dan yang benar.

9) Kependudukan dan catatan Sipil

- Masih belum optimalnya pelaksanaan layanan Administrasi Kependudukan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus identitas kependudukan yang meliputi KTP dan Kartu Keluarga. Sampai dengan tahun 2013, jumlah penduduk wajib KTP tercatat sebesar 192.810 jiwa, tetapi yang sudah memiliki KTP baru mencapai 114.185 orang atau sebesar 59,22 %. Dari jumlah kepala keluarga sebanyak 70.213 KK tahun 2013, baru 23.909 KK yang sudah memiliki Kartu Keluarga atau baru mencapai 34,05%;
- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk dan melaporkan perubahan atas peristiwa penting yang dialaminya. Hal ini ditambah lagi masih lemahnya kinerja aparat pemerintah mulai dari tingkat RT sampai tingkat Kabupaten dalam menyampaikan laporan kejadian penduduk antara lain, lahir mati, pindah masuk dan keluar penduduk, menjadikan sulit untuk mengetahui perkembangan data penduduk secara rutin dan berkala
- Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga dalam menjamin kenyamanan dan ketentraman lingkungan dan masyarakat. Sampai dengan tahun 2012 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 168 kasus, dengan perincian kekerasan fisik 77 kasus, psikis 7 kasus, seksual 66 kasus dan penelantaran 18 kasus;
- Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Angka kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2012 tercatat sebesar 24,59 % dengan jumlah

penduduk miskin sebanyak 64.400 Jiwa. Secara agregat mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 24,52 % dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 63.527 jiwa;

- Cakupan bantuan sosial bagi PMKS masih rendah dan tumpang tindih. Pada tahun 2013 jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat bantuan social Raskin tercatat sebanyak 32.807 RTS atau sebesar 50,94%. Sedangkan bantuan social lainnya tidak terdeteksi karena lemahnya koordinasi lintas sektoral.
- Upaya pemberdayaan sosial sebagai upaya membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan optimal. Sampai dengan tahun 2013 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yg menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) baru mencapai 9,4% dan Presentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial sebesar 3%. Kondisi ini masih sangat jauh dari target SPM bidang sosial yang ditetapkan sebesar 80%;

10) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Tingginya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu pelanggaran HAM. Data yang akurat belum tersedia karena banyak kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan alasan bahwa masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain
- Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan. Permasalahan utama pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik.

11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Rendahnya partisipasi PUS terutama pria dalam ber-KB. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi yang tersedia terutama bagi kaum laki-laki, keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender dan penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi masih belum mantap dalam memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender.

12) Ketenagakerjaan

- Rendahnya kesempatan dan lapangan kerja. Hal ini digambarkan dengan Angka Partisipasi Kerja dan tingkat pengangguran terbuka yang selalu berfluktuatif setiap tahun sejak tahun 2009 sampai tahun 2013. Pada tahun 2009 Angka Partisipasi Angkatan kerja sebesar 83,92 %, pada tahun 2010 menurun menjadi 76,28%, tahun 2011 meningkat lagi menjadi 77,22%, tahun 2012 meningkat menjadi 80,39% dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 85,39%. Dengan tingkat pengangguran berkisar antara 1,75% sampai 3,89 % dari tahun 2009 sampai tahun 2013.
- Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini ditandai dengan gambaran pencapaian Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 4.878.750,- atau setara dengan Rp. 13.366,- per hari. Jika dibandingkan dengan UMR sebesar Rp. 45.000,- per hari maka produktifitas kerja hanya sebesar 29,70 %.

- Masih kurangnya sosialisasi peraturan perlindungan tenaga kerja. Hal ini ditandai indicator permasalahan tenaga kerja yang cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2009, jumlah kasus tenaga kerja tercatat sebanyak 23 kasus dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 80 kasus ketenagakerjaan atau meningkat sebesar 247,83% dalam kurun waktu lima tahun atau rata-rata meningkat sebesar 49,57% setiap tahun. Di samping itu Persentase jumlah Pekerja / Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek Aktif terhadap total jumlah Pekerja / Buruh setiap tahun berkisar 44,5 %.

13) Koperasi dan UKM

- Belum meningkatnya kapasitas produktif para anggotanya sehingga mampu menghadapi persaingan pasar.
- Belum meningkatnya kesejahteraan anggota, terutama yang berpenghasilan tetap yang rentan terhadap gejolak inflasi.
- Belum meningkatnya kemampuan anggota dalam menjaga kelancaran arus pertukaran yang efisien.
- Rendahnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan ekonomi usaha kecil dan menengah.
- Koperasi belum dikelola secara profesional sebagai unit bisnis yang sekaligus berfungsi sosial;
- Masih sangat kecilnya peranan Koperasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat;
- Kompetensi (inovasi, kreatifitas, kewirausahaan, kerjasama dan networking) pengelola Koperasi dan pengusaha UMKM masih rendah;

14) Penanaman Modal

- Investasi yang ada masih belum mampu mendorong tumbuhnya sector swasta/sector riil;
- Belum optimalnya iklim investasi;
- Rendahnya sarana dan prasarana pendukung investasi
- Informasi tentang peluang usaha di berbagai sektor belum meyakinkan investor.
- Belum tersedianya sarana pendukung seperti infrastruktur dan sumber daya energi.
- Kurangnya promosi baik di media masa, elektronik dan pameran investasi

15) Kebudayaan

- Banyaknya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang belum atau mendapat perhatian dalam rangka pelestariannya. Oleh karena itu dalam rangka pelestariannya pemerintah daerah perlu melakukan revitalisasi kawasan situs dan cagar budaya di Kabupaten Manggarai Timur.

16) Kepemudaan dan Olah Raga

Minimnya organisasi pemuda dan olah raga atau belum terbentuknya organisasi pemuda di Kabupaten Manggarai Timur. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mendorong para pemuda/i agar terlibat aktif dalam organisasi kepemudaan maupun olah raga di wilayahnya. Secara umum organisasi kepemudaan yang sudah terbentuk di Kabupaten Manggarai Timur masih didominasi organisasi kepemudaan yang bersifat keagamaan yang meliputi Organisasi Mudika, Remaja Mesjid dan Pemuda GMIT. Sedangkan organisasi

kepemudaan yang bersifat kemasyarakatan seperti Karang Taruna belum terbentuk. Demikian juga halnya dengan penyelenggaraan event – event olahraga masih sangat terbatas. Sampai dengan tahun 2013 baru tercatat event olahraga tingkat Kabupaten sebanyak 3 kali setiap tahun yaitu Bupati Cup untuk Sepak Bola antar kecamatan merebutkan piala bupati, Polsek Cup untuk bola volley antar club, GMIT Cup untuk bola volley antar club dan Danramil Cup untuk Bola volley antar club.

17) Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri

- Pergeseran sistem nilai dan berkurangnya kultur sistem gotong royong;
- Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan daerah atau nasional yang dapat mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat;
- Belum berjalannya penanganan bencana alam yang lebih responsif baik melalui mitigasi (pengurangan dampak) bencana dan penanganan bencana yang lebih responsif dan terpadu.

18) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

- Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.
- Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional. ;
- Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan mekanisme reward and punishment yang adil,
- Masih adanya praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang.

19) Ketahanan Pangan

- Rendahnya pertumbuhan dan pengembangan ekonomi pada pusat – pusat agrobisnis dan agroindustri.
- Rendahnya pertumbuhan dan pengembangan ekonomi pada wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- Rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat petani dalam penerapan Teknologi Usaha Tani.
- Belum optimalnya peran kelembagaan Penyuluh dan Tani/Nelayan.
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya ketahanan pangan.
- Belum optimalnya kapasitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja pada sektor ketahanan pangan.
- Belum tercapainya distribusi pangan secara merata di Kabupaten Manggarai Timur
- Belum adanya regulasi ketahanan pangan sebagai tata laksana keamanan, mutu dan gizi pangan daerah.
- Belum Optimalisasi penyediaan makanan pengati beras seperti jagung, paisang dan ubi-ubian dalam rangkan mejaga kethanan pangan lokal.

20) Perberdayaan masyarakat dan Desa

- Belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut berperan serta dalam proses pembangunan;
- Desa masih belum mandiri, dan masih bergantung pada pemerintahan di atasnya akibat rendahnya Pendapatan Asli Desa;
- Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan;
- Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya belum optimal;

21) Statistik

- Masih kurang lengkapnya dokumen statistic, Indeks Gini Ratio, Input-Output dan IHK Kabupaten Manggarai Timur. Dokumen ini perlu dilengkapi dan disinkronisasi melalui koordinasi dan kerjasama antar SKPD agar rencana dan kebijakan yang disusun oleh pemerintah tepat sasaran.

22) Kearsipan

- Minimnya ketersediaan arsip baku di setiap SKPD
- Minimnya SDM yang mampu mengelola Arsip secara baku

23) Komunikasi dan Infomatika

- Hingga saat ini di Kabupaten Manggarai Timur belum mendapat pelayanan dari PT. Telkom melalui jaringan telepon kabel, sehingga pada tingkat SKPD, ketersediaan sarana komunikasi dan informasi masih sangat terbatas khususnya untuk fasilitas faximile dan akses internet. Ketersediaan sarana ini sangat diperlukan untuk mengetahui informasi secara up-to-date berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai sarana koordinasi internal dan eksternal SKPD.

24) Perpustakaan

- Belum tersedianya Perpustakaan Daerah yang representative.
- Kurangnya minat baca masyarakat di perpustakaan daerah Kabupaten Manggarai Timur
- Kurangnya peran masyarakat Kabupaten Manggarai Timur

3.1.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan**1) Pertanian**

- Pertumbuhan sektor pertanian dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, belum diikuti oleh peningkatan nilai tambah produk pertanian;
- Masih kurangnya infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi maupun jalan produksi, maupun perbaikan jalan desa untuk kepentingan produksi dan pemasaran;
- Peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang dengan peningkatan produksi pangan dan Masih terindikasinya daerah yang beresiko rawan pangan;
- Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas (degradasi) lahan produktif;
- Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap bahan pangan karena rendahnya pendapatan;
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan terutama pada lahan kritis;
- Meningkatnya gangguan iklim dan hama penyakit tanaman maupun ternak.

2) Kehutanan

- Konflik kepentingan status kepemilikan lahan antara pemerintah dengan masyarakat disekitar kawasan hutan.
- Terjadinya gangguan keamanan dan pelestarian sumberdaya hutan akibat tekanan masyarakat sekitar hutan;
- Terancamnya luas hutan yang berfungsi sebagai penyangga iklim dan tata air bagi ekosistem;
- Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan masih rendah.

3) Energi dan Sumber daya Mineral

- Masih adanya aktivistas pertambangan tanpa izin
- Belum optimalnya pelayanan listrik yang dapat dijangkau sampai ke daerah terpencil
- Rendahnya kontribusi sector pertambangan terhadap Kabupaten Manggarai Timur

4) Pariwisata

- Masih kurangnya penataan dan Pengamanan Objek Pariwisata;
- Kurangnya infrastruktur dasar pariwisata;
- Belum terkaitnya pengembangan sektor pariwisata dengan sektor-sektor
- lainnya, seperti sektor pertanian, usaha kecil menengah, dan budaya
- Kurang gencarnya promosi dan pemasaran pariwisata
- Belum terbentuknya usaha jasa pariwisata seperti Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata yang mengatur paket dan perjalanan wisata
- Belum memadainya sarana Pariwisata seperti transportasi, akomodasi dan restorasi yang antara lain : Hotel bertaraf Internasional belum tersedia, Fasilitas telekomunikasi belum lengkap, aksesibilitas ke obyek wisata masih rendah, Jalan ke lokasi obyek wisata belum baik Fasilitas pada obyek wisata belum tersedia.

5) Kelautan dan Perikanan

- Belum optimalnya pengelolaan potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap
- Belum terpadunya pengelolaan wilayah pesisir;
- Masih besarnya potensi perkembangan hama dan penyakit pada perikanan budidaya.
- Fasilitasi modal usaha bagi pembudidaya ikan dan nelayan ;
- Terbatasnya anggaran sehingga belum adanya peralatan untuk mendeteksi penyakit ikan yang banyak terjadi di kelompok binaan dinas dan masyarakat umum.
- Tingkat persentase produksi ikan dalam daerah belum memungkinkan untuk diexport ke luar daerah karena terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan seperti kapal-kapal yang berukuran 10-30 GT.
- SDM nelayan pada umumnya rendah sehingga tidak mampu melakukan operasi penangkapan dengan kapal-kapal ukuran 15-30 GT.
- Pendapatan para nelayan umumnya sangat rendah sehingga tidak mampu membeli bahan bakar dalam jumlah tinggi untuk mengoperasikan kapal-kapal, juga pengadaan spare parts berpengaruh pada pengembalian atau penyeteroran dana bergulir dari program penguatan modal pemerintah lewat dinas kelautan dan perikanan.

- Pada bidang perikanan air tawar masalah kekurangan air tetap sangat berpengaruh selama tak terkendalinya perambah hutan, kecuali air dari selokan sisa pembuangan air sawah dan mempengaruhi perkembangan proses pembenihan perikanan rakyat.

6) Perindustrian

- Kurangnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk industri.
- Iklim berusaha masih belum kondusif;
- Rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar.
- Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya usaha industri.

7) Perdagangan

- Rendahnya nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur, hal ini disebabkan minimnya keanekaragaman, kualitas dan promosi barang-barang ekspor hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.
- Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang urgensi perdagangan terkait kebutuhan ekonomi masyarakat.

4.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kabupaten Manggarai Timur.
2. Isu strategis dari Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempengaruhi Kabupaten Manggarai Timur
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur 2009-2029.
 - Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.
 - Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

4.2.1. Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Internasional

Penentuan isu strategis didahului dengan review terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Manggarai Timur. Hasil review akan melengkapi draft isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Manggarai Timur.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode yang lalu dan mencermati

tantangan ke depan, RPJMN menetapkan Visi Indonesia 2014, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Visi tersebut diturunkan kedalam 11 prioritas nasional yaitu :

- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- Pendidikan
- Kesehatan
- Penanggulangan Kemiskinan
- Ketahanan Pangan
- Infrastruktur
- Iklim Investasi dan Iklim Usaha
- Energi
- Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
- Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

Ke 11 prioritas nasional ini merupakan prioritas bersama yang harus dicapai bersama termasuk oleh Kabupaten Manggarai Timur.

2. **Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk. Evaluasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). EPPD meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB).

EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Didalamnya terdapat arahan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasikan “Sistem Pengukuran Kinerja Mandiri” . Untuk dapat melakukan hal tersebut pemerintah pusat telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan isu strategis Kabupaten Manggarai Timur, aspek-aspek pembangunan yang terdapat dalam Indikator Kinerja Kunci dapat dipandang sebagai aspek strategis yang harus diprioritaskan penanganannya.

Hasil penilaian BPKP terhadap EKPPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 mendapat peringkat 1 se Provinsi NTT dengan nilai 2,66 atau kategori prestasi tinggi.

3. **Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. SPM adalah ketentuan

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Hingga saat ini telah diterbitkan 15 (lima belas) SPM oleh kementerian/lembaga, yaitu SPM:

- 1) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- 2) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 3) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.
- 4) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 5) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 6) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 7) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota.
- 8) Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 9) Bidang Pekerjaan Umum.
- 10) Bidang Ketenagakerjaan.
- 11) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota.
- 12) Bidang Komunikasi dan Informasi.
- 13) Bidang Kesenian.
- 14) Bidang Penanaman Modal.
- 15) Bidang Perhubungan Daerah.

4. *Millenium Development Goals (MDG's)*

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan salah satu agenda pembangunan dunia yang juga menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Manggarai Timur. Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Adapun kedelapan tujuan pembangunan milenium terdiri dari:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Tabel 4.1. Realisasi Pencapaian Indikator Target MDGs Kab. Manggarai Timur

GOAL	TARGET	MDGs	MDGs Target 2015	2009	2010	2011	2012	2013	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Goal 1	Target 1.1	Rasio penduduk miskin	7,50	25,51	25,94	24,52	24,59	21,96	BPS

GOAL	TARGET	MDGs	MDGs Target 2015	2009	2010	2011	2012	2013	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Goal 1	Target 1.8	Prevalensi malnutrisi balita (gizi buruk + gizi kurang)	18,80	1,94	10	7,07	4,96	3,34	DINAS KESEHATAN
Goal 2	Target 2.1	Angka Partisipasi Murni SD	100,00	88,55	87,9	81,17	80,91	79,96	PPO
Goal 2	Target 2.1.a	Angka Partisipasi Murni SMP	100,00	38,31	42,72	43,3	51,55	65,65	PPO
Goal 2	Target 2	Angka Melanjutkan ke SMP	100,00	98,23	98,57	98,58	98,94	99,34	PPO
Goal 2	Target 2	Angka Melek Huruf (15-24 tahun)	100,00	78,94	83,22	86,68	89,54	91,04	PPO
Goal 3	Target 3.1.a	Rasio partisipasi murid perempuan SD	100,00						PPO
Goal 3	Target 3.1.b	Rasio partisipasi murid perempuan SMP	100,00						PPO
Goal 3	Target 3.3	Proporsi perempuan di DPRD	30,00	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	SETWAN
Goal 4	Target 4.1	Angka kematian balita (AKABA) per 1.000	32,00	2,5	2,03	1,18	1,57	1,13	DINAS KESEHATAN
Goal 4	Target 4.2	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000	23,00	13,5	11,31	15,16	7,16	11,28	DINAS KESEHATAN
Goal 5	Target 5.1	Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000	102,00	307,1	344,1	275,6	217,04	206,88	DINAS KESEHATAN
Goal 5	Target 5.2	Cakupan kelahiran ditolong tenaga terlatih	90,00	65,95	69,04	70,08	76,86	83,13	DINAS KESEHATAN
Goal 6	Target 6.1	Prevalensi HIV/AIDs (per 100.000)		1	1	3	3	3	DINAS KESEHATAN
Goal 6	Target 6.6	Prevalensi malaria (per 1.000)/AMI (luar Jawa Bali)		6,26	7	3	3	2	DINAS KESEHATAN
Goal 6	Target 6.9	Prevalensi TBC (per 100.000)		2,81	45	45	58	46	DINAS KESEHATAN
Goal 7	Target 7.1	Persentase cakupan luas hutan		35,74	35,74	35,74	35,74	35,74	DINAS KEHUTANAN
Goal 7	Target 7.8	Cakupan air bersih	67,00	60,30	60,72	64,85	66,79	68,37	DINAS PU

4.2.2. Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 yaitu: “Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia”

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut telah ditetapkan 8 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu;

- 1) Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;
- 2) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
- 3) Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
- 4) Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah;
- 5) Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- 7) Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- 8) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan 6 tekad pembangunan yaitu :

- 1) Menjadikan NTT sebagai Provinsi Jagung
- 2) Menjadikan NTT sebagai Provinsi Ternak
- 3) Menjadikan NTT sebagai Provinsi Koperasi
- 4) Menjadikan NTT sebagai Provinsi cendana
- 5) Menjadikan NTT sebagai Destinasi Utama Dunia
- 6) Menjadikan NTT sebagai Provinsi Kepulauan berbasis Perikanan dan Kelautan

Dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan 6 tekad pembangunan dengan melakukan revitalisasi dan peningkatan skala usaha serta peningkatan jangkauan pembangunan ke seluruh wilayah, dengan pendekatan kewilayahan dan didukung sektor terkait dengan sesuai potensinya. Pendekatan pembangunan dilaksanakan basis desa/kelurahan pada klaster kawasan yaitu kawasan pertanian terpadu untuk pengembangan jagung dan peternakan, kawasan pesisir dan laut terpadu, kawasan wisata terpadu, kawasan pengembangan cendana dan pengembangan koperasi secara merata berbasis desa/kelurahan.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka penyesuaian pelaksanaan pembangunan antar daerah khususnya dengan kabupaten tetangga, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota.

Kerjasama antara pemerintah daerah dalam pembangunan daerah dalam berbagai sektor sering kali diabaikan pemerintah daerah pada hal ini merupakan isu yang sangat strategis yang harus di respon guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di setiap daerah di NTT masih belum signifikan kontribusi laju pertumbuhan ekonomi masih bergantung kepada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan sedangkan sektor yang lain belum memberikan kontribusi yang besar terhadap dalam menopang kesejahteraan masyarakat. Untuk itu komitmen bersama antara Kabupaten Manggarai , Manggarai Timur dan Ngada sangat diperluan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masyarakat di wilayah perbatasan di tiga kabupaten. Pada tabel berikut ini dapat kita lihat berapa keterkaitan antara arah kebijakan dan isu strategis yang akan menjadi perhatian bersama :

Tabel 4.2. Identifikasi Keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Tetangga

No	RPJMD Kabupaten Ngada (2010 - 2015)	RPJMD kabupaten Manggarai (2010-2015)	Keterkaitan
1.	Kerjasama antara daerah	Kerjasama antara daerah	Melakukan kerjasama antara daera dalam melaksanakan pembangunan diberbagai sektor
2.	Pengembangan pariwisata flores	Pengembangan pariwisata flores	Dengan ditetapkannya Flores sebagai satu Destinasi Pariwisata maka didalam pengembangan

			kepariwisataan perlu dilakukan kerjasama baik dari sisi promosi maupun penyiapan infrastruktur.
3.	Energi listrik	Energi listrik	Kabupaten Mangarai memiliki sumber energi listrik yang besar bisa menjadi penyangga ketersediaan energi untuk kabupaten Ngada dan Manggarai timur
4.	Kebijakan penetapan fungsi dua pelabuhan Aimere dan Wae Wole	-	Pengembangan Pelabuhan Aimere menjadi pelabuhan pengakuatan penumpang dan Wae Wole menjadi pelabuhan barang/bongkat muat.
5.	Infrastuktur Jalan	Pembangunan Infrastruktur Manggarai Timur dan Manggarai di lintas selatan Iteng dan Sok	Memudahkan akses lalulintas perekonomian dua kabuapten Mangarai dan manggarai Timur
6.	Pelayanan kesehatan	Pelayanan kesehatan	Kabupaten ngada dan Manggarai memiliki rumah sakit bisa membantu pelayanan kesehatan bagu kabupaten amnggarai Timur
7.	Pengembangan perguruan tinggi	Pengembangan perguruan tinggi	Kabupaten mangarai Timur menjadi daerah menjadi tujuan pendidkan bagi calon mahasiswa dari Manggarai Timur dan Ngada
8.	Penyelesai masalah perbatasan	6.Penyelesai masalah perbatasan	Tiga kabupaten punya itekat baik untuk segera menyelesaikan masalah perbatasan denga arif dan bijaksana.
9.	Memperlancar arus distribusi keluar masuk barang	Memperlancar arus distribusi keluar masuk barang	Tiga kabupaten harus mendukung bagi kemudahan kemudaha dalam proses distribusi barang antara daerah
10	Pengembangan koperasi	Pengembangan koperasi	Tiga kabupaten memberikan keleluasan dalam pengembangan koperasi.
11	Pembangunan dan pengembangan bandara	Pembangunan dan pengembangan bandara	Pembangunan Bandara di Tanjung Bendera Manggarai Timur yang dapat melayani penerbangan sepanjang tahun, sedangkan Kabupaten Ngada dan Manggarai

			menjadi penyangga pelayanan angkutan udara.
--	--	--	---

Dari beberapa arah kebijakan yang terkait yang tergambar diatas yang menjadi fokus perhatian pemerintah tiga kabupaten adalah : pengembangan kawasan perbatasan dengan menerapkan pola pembangunan wilayah terpadu yang diharapkan akan membawa dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

4.2.4. Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur 2009-2029.
2. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.
3. Sasaran-sasaran pembangunan dan target kinerja yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

4.2.5. Penetapan Isu Strategis

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi NTT serta isu internasional serta aspek lainnya, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM Relatif Rendah

Pembangunan manusia sebagai insan yang bermartabat menekankan pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta bergizi. Kemampuan masyarakat untuk berdaya saing tinggi merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran daerah. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih menemui hambatan, antara lain dilihat dari masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, baik yang disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, perilaku masyarakat yang belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan penyakit. Tahun 2009 jumlah kunjungan rawat jalan di seluruh Fasilitas puskesmas sebanyak 108.935 kunjungan dan rawat inap sebanyak 648. Dari angka kunjungan tersebut, jumlah kasus penyakit menular yang terjadi adalah sebanyak 78 kasus hepatitis B (Profil Kesehatan NTT, 2009).

Pada tahun 2009, jumlah kasus kematian ibu melahirkan terjadi sebanyak 23 kasus dan jumlah kasus kematian bayi dan balita terjadi sebanyak 66 kasus. Jika dilihat dari kesehatan lingkungan, persentase rumah memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2010 adalah sebesar 67,20% yg memenuhi syarat kesehatan. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan ditandai dengan keadaan rumah tangga yang memiliki akses kepada air bersih nonperpipaan rumah tangga dan yang memiliki akses terhadap sanitasi.

Dari segi taraf pendidikan masyarakat, kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan harus terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Pada tahun 2013 SD/MI/Paket A realisasi APK

sebesar 91,04% dan APM sebesar 79,96%. Pada tingkat SMP/MTs/Paket B realisasi APK sebesar 100% dan APM sebesar 65,65% Di tingkat SMA / MA / SMK/Paket C realisasi APK sebesar 81% dan APM sebesar 66,03%. Jumlah Putus Sekolah Sekolah (APS) di tingkat SD / MI sebesar 0,66%, ditingkat SMP / MTs sebesar 0,61% dan untuk SMA / MA / SMK sebesar 0,97 Siswa.

Kemampuan keberaksaraan secara umum terus mengalami peningkatan, tetapi disparitas kemampuan antar kelompok masih relatif tinggi. Disparitas ini dapat terlihat, antara lain, pada masih rendahnya kemampuan keberaksaraan kelompok penduduk perempuan, miskin, dan yang tinggal di perdesaan dengan masih banyaknya orang masih mengalami buta huruf. Selain itu, perluasan akses pada jenjang pendidikan tinggi (PT) perlu diikuti dengan adanya jaminan kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas dan relevansi, APK PT yang tinggi akan mengakibatkan pengangguran terdidik yang besar sehingga berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Dari hasil perhitungan IPM tahun 2009, menempatkan Kabupaten Manggarai Timur sebagai daerah yang mempunyai perhatian besar terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan peringkat regional, indeks pembangunan manusia Kabupaten Manggarai Timur berada pada peringkat 15 dari 22 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada di urutan 450 dalam skala nasional, sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Manggarai Timur masih tergolong rendah. Meskipun pada tahun 2013 terjadi pergerakan yang cukup baik dari peringkat 19 ke 13 dari seluruh kabupaten di Provinsi NTT, namun posisi ini perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Di Manggarai Timur.

2. Belum terpenuhinya Infrastruktur Dasar

Rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih merupakan persoalan besar di Kabupaten Manggarai Timur, yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah. Pada aspek transportasi, sarana dan prasarana merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian, dalam rangka memperpendek rentang kendali, untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi manusia dan barang. Transportasi darat (jalan, jembatan maupun moda transportasi) masih sangat terbatas.

Pembangunan sarana jalan dan jembatan mestinya berjalan bersamaan dengan makin meningkatnya usaha pembangunan. Namun terbatasnya anggaran yang tersedia menjadi kendala dalam merealisasikan hal tersebut. Fakta lapangan menunjukkan bahwa panjang jalan dan jembatan di Manggarai Timur relatif meningkat untuk jalan kabupaten dari 1.193,35 km tahun 2007 bertambah menjadi 1.283,85 km pada tahun 2010, yang terdiri dari Jalan Negara 155 km. Namun peningkatan ini masih relative kurang memadai dibandingkan luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur 2.643,93 Km² atau 264.393 ha.

Seperti halnya jalan, permasalahan yang sama juga terjadi untuk fasilitas seperti jembatan baik jumlah maupun panjang bentangannya masih relative kurang jika dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Manggarai Timur. Peningkatan jembatan sampai tahun 2013 sebanyak 205 buah, dari 190 buah jembatan pada tahun 2008.

Sarana irigasi belum berjalan bersamaan dengan makin meningkatnya usaha intensifikasi pembangunan bidang pertanian. Panjang irigasi terhitung sejak tahun 2009 sampai 2013 mencapai 563 meter dalam kondisi baik.

3. Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, adalah perkembangan penduduk miskin. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dapat diartikan bahwa pendapatan penduduk semakin meningkat. Jumlah dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2009 adalah 25, 51% dengan angka garis kemiskinan 58.975 jiwa, sementara tahun 2010 meningkat 25,94 % dengan angka garis kemiskinan 182.641 jiwa. Pada tahun 2011 menurun menjadi 24,52 dengan garis kemiskinan 205 486 dan pada tahun 2013 kembali naik sekitar 0,7 persen atau menjadi 24,59 dengan garis kemiskinan 231 188.

Pada sisi lain produktivitas ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi terbatasnya kesempatan kerja. Tingginya jumlah pencari kerja yang tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja yang tersedia terbatas antara lain dapat dilihat dari jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan. Pada tahun 2010 jumlah pengangguran sebanyak 565 jiwa dengan komposisi laki-laki sebesar 374 orang dan perempuan sebesar 191 orang, yang bekerja diberbagai lapangan usaha sebanyak 120.238 orang. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 2010 tingkat pengangguran terbuka di Manggarai Timur mencapai 0,47 %. Selanjutnya tahun 2011 jumlah pengangguran mencapai 3.403 mengalami penurunan 2572 pada tahun 2013.

4. Minimnya Jiwa Wira Usaha dan Terbatasnya Kesempatan Kerja

Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Manggarai Timur adalah melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu dilakukan mengingat jumlah populasi UKM pada tahun 2010 masih relatif rendah, baik yang bergerak pada sektor perdagangan 488 pengusaha kecil, sektor pertanian 126 pengusaha kecil dan sektor non pertanian 256 pengusaha kecil pada tahun 2008. Pada tahun 2013 total seluruh kelompok IKM yang statusnya meningkat dan memiliki izin usahan sebanyak 700 IKM sementara untuk koperasi aktif sebesar 41 koperasi. Jumlah koperasi dan UKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya, sehingga kinerja UKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja UKM tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan UKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UKM. Tingkat kinerja yang demikian ini berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif lainnya, yang meliputi sumber-sumber informasi, pasar, dan faktor produksi. Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sangat sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan. Penguasaan teknologi, manajemen, informasi, dan pasar masih jauh dari

memadai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UKM memerlukan biaya yang relatif besar apalagi untuk dikelola secara mandiri oleh UKM.

5. Penurunan Kualitas Lingkungan

Kabupaten Manggarai Timur memiliki keterbatasan lahan dan sumber daya air, oleh karena keterbatasan sumber daya alam tersebut, maka pengelolaan secara parsial akan mengakibatkan menurunnya fungsi lingkungan, dan akan merusak kelestarian lingkungan secara makro seperti berkurangnya sumber air, terjadinya abrasi pantai, proses pendangkalan sungai, pencemaran lingkungan dan penurunan air permukaan. Perkembangan Kabupaten memang menuntut penyediaan lahan permukiman sehingga setiap tahun diperkirakan akan terjadi alih fungsi lahan dan lingkungan. Konflik kepentingan antara aktivitas ekonomi dengan lingkungan menjadi permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam, sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan. Kondisi lahan kritis di wilayah kabupaten Manggarai Timur masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian, mengingat masih ditemukan sekitar 19.595 ha luasnya lahan kritis yang memerlukan penanganan.

Perubahan iklim yang terjadi dalam satu abad terakhir telah menjadi isu global sekaligus merupakan tantangan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Kabupaten Manggarai Timur merupakan daerah yang rentan terhadap perubahan iklim, sebagai dampaknya secara sosial dan ekonomi dapat menurunkan pendapatan, terutama petani yang merupakan mata pencaharian terbesar di Kabupaten Manggarai Timur karena terjadinya perubahan musim tanam.

6. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Yang Belum Dikelola Maksimal

Kabupaten Manggarai Timur memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi sumber daya alam yang utama adalah potensi agro, kelautan dan pariwisata yang bisa menjadi modal dan pemicu pembangunan wilayah Kabupaten Manggarai Timur, namun produktivitas pengelolaan ketiga sektor tersebut masih belum maksimal. Ketiga sektor ini apabila digarap dengan serius dan profesional maka potensi-potensi unggulan tersebut perannya tidak saja hanya sebatas pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tapi akan mampu memberikan multiplier efek bagi sektor lainnya.

Sebagai salah satu pendukung utama pembangunan, potensi dan peran jenis tanaman pada subsektor pertanian, Perkebunan dan peternakan dalam kehidupan masyarakat yang dimiliki Kabupaten Manggarai Timur relatif besar. Pada sub sektor pertanian, total luas tanah sawah dan ladang sebesar 13.800 Ha, akan tetapi pada tahun 2010 luas panen padi baik sawah dan ladang tercatat hanya seluas 16.307 Ha, dengan rata-rata produksi sebesar 2,89 Kw/Ha untuk padi sawah dan 9,61 Kw/Ha untuk produksi padi ladang. Meskipun pada tahun 2013 terjadi pencetakan sawah baru sebesar 420 Ha, namun dari sisi produktivitas masih rendah. Pada sub sektor pekebunan dengan luas areal potensial perkebunan sebesar 65643,36 Ha, dengan rata-rata produksi sebesar 54421,8 ton dan produktivitas sebesar 31022,16 ton. Komoditi kopi dan cengkeh yang menjadi produk unggulan daerah

Kabupaten Manggarai Timur masih harus ditingkatkan mutu pengolahan pasca panen agar menghasilkan produk yang dapat memenuhi standar kualitas ekspor. Pada subsektor perikanan, potensi, pemanfaatan dan RTP dari berbagai jenis kegiatan budidaya perikanan darat (kolam, tambak dan sawah) di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2010, dari potensi yang tersedia sejumlah 720 ha jumlah produksi perikanan dari 2044 RTP/pengusaha perikanan hanya memproduksi sebanyak 273,82 ton.

Kabupaten Manggarai Timur memiliki potensi sumber daya alam di wilayah perairan dan laut dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, akan tetapi masih terdapat ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya kelautan di Kabupaten Manggarai Timur. Kegiatan penangkapan ikan di laut masih merupakan kegiatan yang dominan di sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Manggarai Timur, dengan produksi perikanan tangkap adalah 1 986,41 ton tahun 2010. Pada tahun 2007 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Manggarai Timur adalah sebesar 1.709, 2 ton atau sebesar 13,93 % dari potensi tangkap dan pada tahun 2008 produksi perikanan tangkap meningkat menjadi 3.992,90 ton atau sebesar 32,56 % dari potensi tangkap yang tersedia. Rendahnya peningkatan produksi perikanan tangkap disebabkan karena tingginya ketergantungan nelayan terhadap cuaca, dan minimnya sarana penangkapan ikan serta kenaikan harga BBM yang mengakibatkan tingginya biaya operasional penangkapan, sehingga nelayan ada yang beralih profesi ke profesi yang lain.

Potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur seperti wisata pantai, wisata alam, wisata budaya dan wisata cagar budaya, wisata minat khusus. Kondisi ini diharapkan akan memberi pengaruh positif bagi peningkatan kunjungan wisatawan, yang pada gilirannya akan dapat merambat kepada kemajuan sektor lainnya. Kunjungan Wisatawan untuk Tahun 2010 baik Asing dan Domestik sejumlah 133 orang dengan komposisi 137 untuk Wisatawan Asing dan 1.424 untuk Wisatawan Domestik. Promosi terhadap obyek wisata yang spesifik dan khusus seperti Komodo dan Teratai Raksasa yang tidak terdapat di daerah lain perlu dibuat secara khusus agar menjadi daya tarik wisatawan manca Negara, selain itu pembenahan obyek-obyek wisata berupa penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai perlu ditingkatkan. Pembinaan terhadap masyarakat terutama di wilayah-wilayah yang dilalui dan dikunjungi wisatawan merupakan hal yang sangat penting. Perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam turut menjaga serta menciptakan rasa aman. Pemberdayaan masyarakat di daerah wisata juga perlu ditingkatkan agar produk-produk di sekitar lokasi obyek wisata dapat dipasarkan sehingga sektor ini dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

7. Reformasi Birokrasi Belum Berjalan Optimal

Birokrasi, dunia usaha dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good Governance*). Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan public, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Rendahnya kualitas pelayanan publik

merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kompetensi SDM aparatur. Rendahnya Kompetensi ditandai dengan masih rendahnya komitmen dan integritas, rendahnya kemampuan atas tugas dan tanggung jawabnya, dan lemahnya inisiatif dan inovatif. Upaya pemberantasan KKN merupakan salah satu tuntutan penting pada awal reformasi.

Namun prevalensi KKN semakin meningkat dan menjadi permasalahan di seluruh lini pemerintahan dari pusat hingga daerah. Tuntutan akan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang berdaya guna, produktif dan bebas KKN serta sistem yang transparan, akuntabel dan partisipatif masih memerlukan solusi tersendiri. Masih belum jelasnya standar kinerja yang dapat diukur untuk menentukan mutu output yang dihasilkan aparatur. Hal tersebut terkait dengan asumsi bahwa sebarang kualitas dari output kegiatan yang dilaksanakan, tidak akan memberikan perubahan terhadap penghargaan kepada aparatur yang bersangkutan, kondisi ini terkait dengan motivasi, dan motivasi dalam hal ini dapat dilihat dari dua hal yakni, kebutuhan terhadap implementasi *sanksi* baik *reward* maupun *punishment*. Pengawasan sebagai bagian dari proses interaksi pembelajaran sekaligus memberikan wahana dijalankannya sistem sanksi, penghargaan tidak atau belum berjalan sebagaimana diharapkan.

8. Masih Terjadinya Ketidakadilan Peran Gender

Kesetaraan dan keadilan gender sudah menjadi isu yang sangat penting dan komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Disadari bahwa keberhasilan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda dan memerlukan dukungan semua pihak.

Perempuan Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2010 berjumlah 50,42% (130 556 jiwa) dari total (258 931 jiwa) penduduk Kabupaten Manggarai Timur merupakan sumber daya pembangunan yang cukup besar. Partisipasi aktif perempuan dalam proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Dari 130,556 jiwa yang perempuan yang bekerja sebagai PNS 1 173 jiwa dan laki-laki 2 537 jiwa. Sementara tahun 2013 meningkat menjadi 1.300 jiwa. Kurang berperannya kaum perempuan akan memperlambat proses pembangunan atau bahkan perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri. Kenyataannya dalam beberapa aspek pembangunan komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Disadari bahwa keberhasilan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda dan memerlukan dukungan semua pihak.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi Kabupaten Manggarai Timur 2014-2019

Visi merupakan gambaran masa depan yang ideal yang menjadi dasar/arah/pondasi dalam proses perencanaan. Karena itu, visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai atau direalisasikan. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur (RPJPD) Tahun 2009-2029 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun yang memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, maka perumusan visi misi harus mengacu pada RPJPD tersebut..

Visi Kabupaten Manggarai Timur perlu dipahami dan didukung bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para stakeholder dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan dengan menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada kurun waktu 5 tahun yang telah lewat. Dengan demikian maka dirumuskan visi Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut :

VISI :

**“ TERWUJUDNYA MANGGARAI TIMUR YANG LEBIH SEJAHTERA, CERDAS,
KREATIF, INOVATIF, SEHAT, RAMAH LINGKUNGAN, DEMOKRATIS, BERMARTABAT DENGAN
MENJUNJUNG TINGGI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENUJU MASYARAKAT YANG LEBIH
MANDIRI YANG DIREKAT OLEH BUDAYA LOKAL”**

Visi tersebut di atas kaya makna, menyeluruh dan terpadu. Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut::

1. Lebih Sejahtera, adalah kondisi suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial, serta secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi diatas rata rata kabupaten/kota di propinsi NTT
2. Kreatif dan Inovatif, adalah suatu kondisi masyarakat yang mampu mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan.
3. Ramah Lingkungan, adalah sikap masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
4. Demokratis, mencerminkan keterwakilan proses dan substansi agenda-agenda pembangunan yang dilakukan secara rasional dan objektif dengan mempertimbangkan aspek keterbukaan, partisipasi publik, kesamaan dan keadilan;
5. Bermartabat, adalah sikap dan kondisi masyarakat yang taat dan patuh terhadap norma hukum, adat dan budaya lokal, demokratis dan ramah lingkungan.
6. Menjunjung Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah suatu kondisi masyarakat yang taat terhadap hokum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

7. Mandiri, adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan social
8. Direkat Oleh Budaya Lokal, adalah Pendekatan pembangunan yang dilakukan dengan memperhatikan nilai nilai luhur budaya Manggarai melalui pendekatan budaya dengan memberdayakan lembaga adat.

Visi tersebut muncul karena kondisi obyektif masyarakat Manggarai Timur yang hingga kini masih berupaya mensejajar diri dengan daerah lain yang lebih maju. Bila Manggarai Timur ingin mensejajarkan diri dengan Kabupaten lain di Provinsi NTT, maka program percepatan pembangunan di segala bidang menjadi kata kunci, terutama pembangunan di sektor infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Agar Proses percepatan dapat dilaksanakan maka segenap sumber daya yang ada perlu difungsikan secara optimal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan maupun sumber daya

5.2 Misi Kabupaten Manggarai Timur 2014-2019

Misi merupakan komponen yang paling mendasar bagi pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sehingga mampu menyatukan segenap komponen-komponen dasar dalam organisasi dalam mencapai Visi. Agar rumusan misi mencerminkan upaya untuk mewujudkan visi, maka perlu ada upaya untuk menjabarkan rumusan visi secara nyata dalam berbagai kondisi yang diperkirakan akan menandai atau mengindikasikan terwujudnya visi tersebut. Semakin rinci dan jelas gambaran visi, akan semakin terarah pula rumusan-rumusan misi dalam mewujudkan visinya. Untuk mencapai visi tersebut diatas maka dirumuskan maka misi Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut :

1. **Membangun SDM Kabupaten Manggarai Timur Yang Produktif Dan Berdaya Saing**

Kemandirian sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu : pendidikan yang bermutu tinggi di semua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan peningkatan derajat kesehatan yang tinggi dan merata ke seluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumber daya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender. Dengan demikian diharapkan sumber daya manusia Manggarai Timur memiliki daya saing yang dapat memajukan daerahnya sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri.

2. **Membuka Isolasi Daerah dan Membangun Infrastruktur secara Merata**

Jaringan infrastruktur wilayah yang handal sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Manggarai Timur. Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya juga merupakan syarat mutlak yang harus diwujudkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggarai Timur. Meratanya pembangunan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan di

seluruh Manggarai Timur akan mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

3. **Menumbuhkembangkan Ekonomi Rakyat Melalui Optimalisasi Keunggulan Lokal**

Misi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan unsur penting menuju kemandirian daerah melalui pengembangan keunggulan lokal berbasis desa. Usaha ekonomi mikro dapat dimulai pada lapisan masyarakat di akar rumput melalui skala rumah tangga yang kemudian akan didorong untuk mengembangkan daya saing yang sehat dalam dunia usaha. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata ke seluruh pelosok daerah serta menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

4. **Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel yang Berkarakter Melayani**

Manajemen pemerintahan akan sangat menentukan kemajuan sebuah daerah dalam berkompetisi di otonomi daerah. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional adalah merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari *Korupsi*, *Kolusi* dan *Nepotisme* (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan kepercayaan masyarakat dan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa sehingga pada gilirannya akan memperoleh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Rumusan Tujuan dan sasaran menurut misi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Periode 2014-2019

VISI : TERWUJUDNYA MANGGARAI TIMUR YANG LEBIH SEJAHTERA, CERDAS,
KREATIF, INOVATIF, SEHAT, RAMAH LINGKUNGAN, DEMOKRATIS, BERMARTABAT DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA MENUJU MASYARAKAT YANG LEBIH MANDIRI ”

MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target indikator sasaran				
				2014	2015	2016	2017	2018
MISI I :Membangun SDM Kabupaten Manggarai Timur Yang Produktif Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan pada semua jenjang	1. Meningkatnya akses pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang merata kepada masyarakat	Angka Melek Huruf					
			Angka rata-rata lama sekolah	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun
			Angka partisipasi kasar	34,03%	39,03%	43,03%	48,03%	50,03%
			Angka pendidikan yang ditamatkan	100%	100%	100%	100%	100%
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	83%	84%	86%	88%	90%
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	68%	72%	75%	78%	80%
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	68%	72%	75%	78%	80%
			APK TK/RA					
			APM TK/RA					
			Cakupan Jumlah Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD/TK/RA)					
			12	13	14	14	15	

			angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	80%	85%	90%	95%	100%	
			angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	70%	75%	80%	85%	90%	
			angka rata-rata lama sekolah :						
			SD/MI	6 tahun	6 tahun	6 tahun	6 tahun	6 tahun	
			SMP/MTs	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	
			angka partisipasi kasar :						
			SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	
			SMP/MTs	81,26%	80%	71,26%	70,00%	61,26%	
			angka pendidikan yang ditamatkan :						
			SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	
			SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	
			Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains :						
			SD/MI	,-	600 orang	720 orang	780 orang	840 orang	
			SMP/MTs	,-	600 orang	720 orang	780 orang	840 orang	
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	1/171	1/148	1/166	1/164	1/162	
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk	1/130	1/128	1/126	1/124	1/122	

			usia sekolah (SMP/MTs)					
			Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains (SD/MI dan SMP/MTs)	0	600 orang	720 orang	780 orang	840 orang
			Cakupan sekolah SD/MI, SMP/MTs yang menerapkan 5 Pilar STBM	0	50 sekolah	60 sekolah	70 sekolah	80 sekolah
			rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	1/330	1/308	1/290	1/275	1/262
			Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains (SMA/SMK/MA)	120 orang	150 orang	180 orang	210 orang	240 orang
			Jumlah event iptek berskala regional dan nasional di Manggarai Timur	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
			Jumlah prestasi yang diraih dibidang IT	0	3	3	3	3
			Prosentase Jumlah SMA/SMK yang memiliki Laboratorium IPA, Bahasa dan Komputer dari 51 Unit SMA/SMK (%)					
			Laboratorium IPA	0	16 unit(31,37%)	26 unit(50,98%)	36 unit(70,59%)	46 unit(90,20%)

			Laboratorium Bahasa	0	13 unit(25,49%)	23unit(45,10%)	37 unit(72,55%)	47unit(92,16%)
			Laboratorium Komputer	0	15unit(29,41%)	29unit(56,86)	41 unit(80,39%)	46unit(90,20%)
			Ratio Ruang Kelas Terhadap Jumlah SMA/SMK (%)	223 RK (1/5)	267 RK (1/6)	308 rk(1/6)	343 unit (1/7)	0
			Prosentase Sekolah SMA/SMK yang memiliki Perpustakaan Sekolah (%)	10 unit (20%)	20 unit (40%)	30 unit(29%)	42 unit (83%)	47 unit(93%)
			Jumlah SMA/SMK Yang menerapkan 5 Pilar STBM	1 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
			Cakupan penyediaan sarana dan prasarana PNF	0	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
			Jumlah kelembagaan PAUD Yang dikembangkan (Kelompok)	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok
			Jumlah Kelompok Belajar yang dikembangkan (Klober)	20 klober	20 klober	20 klober	10 klober	10 klober
		2.Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan	Jumlah siswa memiliki kartu NISN	68,566	75,423	82,965	91,262	100,388
			Jumlah guru memiliki kartu NUPTK	68,566	75,423	82,965	91,262	100,388
			Jumlah Guru yang memiliki sertifikasi					

			Angka kredit guru dan pengawas sekolah	100%	100%	100%	100%	100%
			angka kelulusan (AL) SD/MI	95%	96%	97%	98%	99%
			angka kelulusan (AL) SMP/MTs	95%	96%	97%	98%	99%
			angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	93%	94%	95%	96%	97%
			Data SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA/SMK teremajakan dalam aplikasi DAPODIK	529	637	645	653	661
			Jumlah Gedung perpustakaan	0	0	0	1 unit	1unit
			Persentase Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan Umum	7,68%	7,92%	8,15%	8,38%	8,61%
			Jumlah Judul Koleksi Bahan Pustaka	150 judul	250 judul	250 judul	250 judul	250 judul
		3. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Cakupan pemuda yang telah dilatih dalam kewirausahaan dan kecakapan hidup	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
			Cakupan pemuda yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat dasar (Jumlah pemuda	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang

			yang bergabung dalam organisasi pramuka)					
2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	4.Meningkatnya prestasi olah raga	Cakupan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten (Sepak bola dan Bola Volley)	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
		Cakupan organisasi cabang olahraga yang sudah terbentuk	2 cabang	2 cabang	2 cabang	3 cabang	3 cabang	
		Cakupan atlet berprestasi	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	
		Cakupan Klub Olahraga yang terdaftar dan berpartisipasi dalam setiap kompetisi olahraga	3 klub	3 klub	3 klub	4 klub	4 klub	
		Cakupan sarana dan prasarana olahraga yg tersedia:						
		- GOR		1 unit				
		- Stadion				1 unit		
		- Gedung Pemuda					1 unit	
		- Lapangan Futsal	1 unit					
		- Kolam Renang					1 unit	

	5.Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 Penduduk)	0% (0 Unit)	0.004 % (1 Unit)	0.004 % (1 Unit)	0.004 % (1 Unit)	0.004 % (1 Unit)
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	3%	3,5%	4%	4,5%	5%
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	55%	56%	58%	59%	60%
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80%	85%	90%	95%	100%
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	77%	78%	79%	80%	81%
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5%	6%	7%	8%	9%
		Angka Harapan Hidup					

	3. Peningkatan drajad kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	6. Menurunnya kematian ibu baru melahirkan dan anak baru lahir	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0 % (0 Unit)	0.004 % (1 Unit)	0.004 % (1 Unit)	0.004 % (1 Unit)	0.004 % (1 Unit)
			Rasio posyandu per satuan balita	26%	28%	30%	32%	34%
			Rasio puskesmas, poliklinik, pustu, poskesdes per satuan penduduk	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5
			Jumlah Poskesdes	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
			Jumlah Polindes					
			Jumlah Puskesmas					
			Jumlah Puskesmas Pembantu					
			Cakupan Puskesmas Perkecamatan	1 Puskesmas	2 Puskesmas	2 Puskesmas	2 Puskesmas	1 Puskesmas
			Cakupan Pembantu Puskesmas Per Desa	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
			Angka Kelangsungan Hidup bayi					-10%
			Angka Kematian bayi					11.00/1000 KH
			Angka Kematian Ibu					202/100.000 KH
			Angka kematian balita					0.67/100000 kelahiran ibu

			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85%	90%	95%	95%	97%	
			Persentase Balita Gizi Buruk	26%	28%	30%	32%	34%	
			Cakupan kunjungan bayi	93%	95%	97%	98%	100%	
		7. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Cakupan Desa Siaga Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	
			Jumlah desa siaga	0 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	
		8. Terkendalinya Jumlah penduduk	Rasio Akseptor KB	40%	45%	50%	55%	60%	
			Rata-rata anak per keluarga	3 Orang	3 Orang	3 Orang	2 Orang	2 Orang	
		4. Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	9. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio KDRT	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
				Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%

			Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	35%	36%	37%	38%	39%
			Presentase Angkatan Kerja Perempuan	70%	72%	74%	76%	78%
		10.Meningkatnya pemahaman anggota keluarga terhadap bahaya narkoba	Cakupan media penyebaran informasi upaya penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS	3 (cetak,visual dan audio	3 (cetak,visual dan audio	3 (cetak,visual dan audio	3 (cetak,visual dan audio	3 (cetak,visual dan audio
			Cakupan masyarakat yang mendapat penyuluhan narkoba, PMS, dan HIV/AIDS	1355 Orang	1355 Orang	1355 Orang	1355 Orang	1355 Orang
			Cakupan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pemuda sebagai pelopor penggerak anti narkoba	550 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang
		11.Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	Presentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala Kabupaten yang menerima program	47%	55%	65%	70%	75%

			pemberdayaan sosial					
			Persentase (%) PMKS skala kab/kota yg menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	80%	80%	80%	80%	80%
			Presentase Penyadang Cacat Fisik dan Mental serta Lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%
			Cakupan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten (Sepak bola dan Bola Volley)	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali
			Cakupan organisasi cabang olahraga yang sudah terbentuk	5 Cabang	7 Cabang	9 Cabang	12 Cabang	14 Cabang

			Persentase peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka penanganan masalah-masalah kesejahteraan dan perlindungan social masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase peningkatan kerukunan Hidup dan kerjasama antar Umat Beragam	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan pemuda yang dibina dan dilatih sebagai PASKIBRAKA	72 Orang	72 Orang	72 Orang	72 Orang	72 Orang
			Cakupan Klub Olahraga yang terdaftar dan berpartisipasi dalam setiap kompetisi olahraga	16 Klub	18 Klub	20 Klub	22 Klub	24 Klub

			Cakupan pemuda yang dibina dan dilatih sebagai PASKIBRAKA	72 Orang	72 Orang	72 Orang	72 Orang	72 Orang
	5. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	12.Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM)	2	2	2	2	2
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1	2	3	4	5
			Jumlah LSM	1	2	3	3	3
			LPM berprestasi	34,09	51,14	65,79	84,21	100
			PKK Aktif	62,90	73,66	84,95	90,00	100,00
			Posyandu Aktif	24,71	45,25	65,78	86,31	100,00
			Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
			Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	20	40	60	80	100
			Pembentukan Wilayah Desa baru			6		
			Pembentukan Wilayah Kelurahan baru/perubahan status desa menjadi kelurahan			8		

	6. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dan sinergitas program program penanggulangan kemiskinan	13. Sinergisnya program program penanggulangan kemiskinan	Prosentase penyaluraa bantuan RASKIN kepada RTS-PM sesuai target 6 (enam) tepat yaitu : Tepat sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas selama 5 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
	7. Pelestarian seni budaya Manggarai	14.Meningkatnya pelestarian seni budaya	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	1 situs	2 situs	2 situs	2 situs
Jumlah Grup kesenian			0	2 sanggar	2 sanggar	2 sanggar	2 sanggar	
Cakupan kajian seni (Seminar)			0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
Misi Kesenian			2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	
Kelompok Sadar Wisata Yang Dibina			6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	
MISI II: Membuka Isolasi Daerah	1. Meningkatkan Infrastruktur secara merata dan membuka keterisolasian daerah terpencil, berbasis tata ruang dan lingkungan hidup	1.Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas dan merata	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,29%	0,31%	0,33%	0,36%	0,38%
			Panjang jalan dilalui roda 4	0,00519%	0,00519%	0,00519%	0,00519%	0,00519%
			Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk	27%	28%	29%	30%	31%

			Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	58,50%	60,85%	63,19%	65,53%	67,87%
			Prosentase Jumlah akses jalan pada sarana kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Jumlah akses jalan pada fasilitas umum					
				100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Jumlah akses jalan pada sarana pendidikan	30%	35%	40%	45%	50%

		2.Meningkatnya kualitas peralatan kebina margaan	Presentase Tersedianya serta Terpeliharannya Sarana Kebinamargaan	100%	100%	100%	100%	100%
		3.Terwujudnya infrastruktur air bersih, drainase dan sanitasi yang berkualitas dan merata	Rasio Jaringan Irigasi	3,69 (55.132,11)	3,15 (47.095,29)	2,72 (40.665,83)	2,38 (35.522,27)	2,10 (31.407,41)
			Presentase rumah tinggal bersanitasi	82% (41,156)	85% (42.959,2)	88,5% (44.401,8)	90,8% (45.555,8)	92,6% (46.479)
			Rumah tangga pengguna air bersih	67,7% (47.558,6)	74,2% (52.089,5)	79,4% (55.714,2)	83,5% (58.613,9)	86% (60.933,8)
			Rumah tangga ber Sanitasi	82% (41,156)	85% (42.959,2)	88,5% (44.401,8)	90,8% (45.555,8)	92,6% (46.479)
			Lingkungan Permukiman Kumuh	77,62% (883)	83% (947)	88% (1,011)	94% (1,075)	100% (1,137)
			Prosentase Jumlah akses air bersih pada sarana kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Jumlah akses air bersih pada fasilitas umum	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Jumlah akses air bersih pada sarana pendidikan	30%	35%	40%	45%	50%
			4.Terwujudnya pengelolaan irigasi yang optimal	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,23%	0,39%	0,55%	0,70%

			Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	64,74% (1942,4 M)	71,79%(2153,92 M)	77,43%(2323,136M)	81,95%(2458,50M)	85,56% (2566,80 M)
			Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	46,4 % (7.063,3 Ha)	59,8% (9.101,7 Ha)	73,2 % (11.140,1 Ha)	86,6 % (13.178,5 Ha)	100% (15,216,9 Ha)
		5.Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	20 % (59.715,2)	36 % (107.316,2)	48,8 % (145.482,6)	59 % (176.015,7)	67,2 % (200.442,2)
			Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	100%	100%	100%	100%	100%
			Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,52 % (1.502,04)	0,52 % (1.502,08)	0,52 % (1.503,11)	0,52 % (1.504,15)	0,52 % (1.505,19)
			Rasio rumah layak huni	65% (29,45)	72,10% (32,606)	77,68% (35,12)	82,15% (37,14)	85,72% (38,76)
			Rasio permukiman layak huni	77,62% (883)	83% (947)	88% (1,011)	94% (1,075)	100% (1,137)
			Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Lingkungan Permukiman	77,62% (883)	83% (947)	88% (1,011)	94% (1,075)	100% (1,137)
			Rumah tangga pengguna listrik	21,2% (148.894,6)	37% (259.518,3)	49,6% (348.017,2)	59,7% (418.816,4)	67,7% (475-455-7)
			Rumah layak huni	65% (29,45)	72,10% (32,606)	77,68% (35,12)	82,15% (37,14)	85,72% (38,76)

		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	42,74%	42,74%	42,74%	42,74%	42,74%
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	1,39% (630)	2,49%(1,130)	3,60% (1,630)	4,71% (2,130)	5,81% (2,630)
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	10%	10%	10%	10%	10%
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,52 % (1.502,04)	0,52 % (1.502,08)	0,52 % (1.503,11)	0,52 % (1.504,15)	0,52 % (1.505,19)
	6.Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi publik yang nyaman dan lancar	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	20.500 orang	21.600 orang	22.650 orang	22.700 orang	22.750 orang
		Rasio ijin Trayek	15 Ijin	16 Ijin	17 Ijin	17 Ijin	18 Ijin
		Jumlah pelabuhan udara/terminal bis/tambatan perahu :					
		Pelabuhan Udara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	Tahap 1	Tahap 2
		Terminal	2 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit
		Tambatan Perahu	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit
		Halte	0 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit
		Angkutan Darat	2 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
		Bus Pemda					
		Jumlah uji kir Angkutan umum	13 Kendaraan	15 Kendaraan	25 Kendaraan	32 Kendaraan	42 Kendaraan

			Kepemilikan KIR Angkutan Umum	254 Unit	254 Unit	254 Unit	254 Unit	256 Unit
			Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	3 Jam/Kendaraan	3 Jam/Kendaraan	3 Jam/Kendaraan	3 Jam/Kendaraan	3 Jam/Kendaraan
			Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	100 Rb/Berkala	100 Rb/Berkala	100 Rb/Berkala	100 Rb/Berkala	100 Rb/Berkala
				75 Rb/Perdana	75 Rb/Perdana	75 Rb/Perdana	75 Rb/Perdana	75 Rb/Perdana
			Pemasangan Rambu-Rambu					
			Jumlah rambu-rambu yang terpasang	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit
			Jumlah traffic light yang terpasang	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit
			Jumlah pagar pengaman jalan yang terpasang	250 Meter	250 Meter	250 Meter	0 Meter	0 Meter
			Jumlah traffic con yang tersedia	0 Buah	50 buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah
			Panjang pengecatan marka jalan	0 Km	2 Km	2 Km	2 Km	2 Km
		7.Meningkatnya infrastruktur energy dan ketersediaan energi	Jumlah peta detail potensi tambang mineral	1 WP	1 Wp	1 WP		1 WP
			Tersedianya regulasi tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara sebanyak 1 perda	1 Perda				

	Jumlah Pembangunan PLTMH	5 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
	Jumlah Perluasan Jaringan PLTMH sebanyak 13 Unit	3 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit
	Jumlah Rehabilitasi PLTMH sebanyak 2 titik lokasi		1 Unit	1 Unit		
	Jumlah detail desain dan studi kelayakan untuk pembangunan dan perluasan jaringan PLTMH		6 DED	6 DED	6 DED	6 DED
	Tersedianya regulasi tentang Ketenagalistrikan sebanyak 1 perda	1 Perda				
	Tersedianya master plan pengembangan energi		1 Paket			
	Jumlah penerangan jalan umum bagi masyarakat		7 Unit	6 Unit		
	Jumlah SHS terpelihara		50 Unit	50 Unit	50 Unit	25 Unit
	Jumlah pengembangan energi bio energi	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
	Jumlah data potensi mineral		2 Kec	2 Kec	3 Kec	2 Kec

2. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal	8.Manggarai Timur menjadi Kabupaten yang hijau yang bersih, sehat dan ramah lingkungan	Prosentase Penanganan Sampah	100%	100%	100%	100%	100%
		Pencemaran Status Mutu Air	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan sumber mata air	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengawasan terhadap pengawasan amdal	100%	100%	100%	100%	100%
		Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk	100%	100%	100%	100%	100%
		Penegakan hukum lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio Ruang Terbuka Hijau	42,74%	42,74%	42,74%	42,74%	42,74%
		9.Tertanggulangi bencana secara dini dan konferhensif	Pengurangan risiko terhadap bencana				
	Prosentase penanganan korban bencana						100%

	3. Mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	10. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	42,74%	42,74%	42,74%	42,74%	42,74%
MISI III : Menumbuhkembangkan Ekonomi Rakyat Melalui Optimalisasi Keunggulan Lokal	1. Menumbuhkembangkan ekonomi daerah	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan)	Luas Lahan Pengembangan buah-buahan :	160 Ha	165 Ha	180 Ha	175 Ha	195 Ha
			Luas Lahan Pengembangan sayuran dan biofarmaka:					
			Luas lahan pengembangan jahe	8	8	10	10	10
			Luas Lahan pengembangan sayur-sayuran	22	22	22	22	22
			Petugas yang mengikuti pelatihan	-	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
			Peternak yang mengikuti pelatihan	-	82 Orang	82 Orang	82 Orang	82 Orang
			Dokumen RDKK	100%	100%	100%	100%	100%
			Pembangunan Damparit dan salurannya	40 Unit	35 Unit	35 Unit	35 Unit	35 Unit
			Pembangunan Jalan Usaha Tani	3 Km	3 Km	3 Km	3 Km	3 Km
			Lahan sawah baru yang tercetak		50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha
			Luas Tanam Komoditi Tanaman Pangan :					
			Padi sawah	18,903 Ha	19,378 Ha	19,761 Ha	20,145 Ha	20.471
			Jagung	7,787 Ha	7,942 Ha	8,101 Ha	8,263 Ha	8,429 Ha

			Produktifitas Komoditi Tanaman Pangan :					
			Padi sawah	3.9 Ton/Ha	4 Ton/Ha	4 Ton/Ha	4 Ton/Ha	5 Ton/Ha
			Padi ladang	1.16 Ton/Ha	1.19 Ton/Ha	1.22 Ton/Ha	1.25 Ton/Ha	1.28 Ton/Ha
			Jagung	4 Ton/Ha	4 Ton/Ha	4 Ton/Ha	4.5 Ton/Ha	5 Ton/Ha
			Kedelai	1.75 Ton/Ha	1.8 Ton/Ha	1.85 Ton/Ha	1.9 Ton/Ha	1.95 Ton/Ha
			Kacang Hijau	1 Ton/Ha	1.09 Ton/Ha	1.12 Ton/Ha	1.15 Ton/Ha	1.19 Ton/Ha
			Ubi Kayu	8.3 Ton/Ha	8.5 Ton/Ha	8.7 Ton/Ha	9 Ton/Ha	9 Ton/Ha
			Ubi Jalar	7.5 Ton/Ha	7.8 Ton/Ha	8 Ton/Ha	8.2 Ton/Ha	8.4 Ton/Ha
			Sorghum	1.03 Ton/Ha	1.06 Ton/Ha	1.09 Ton/Ha	1.12 Ton/Ha	1.15 Ton/Ha
			Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB					
			Kontribusi Sektor Pertanian(Palawija) Terhadap PDRB		59,55	59,14	58,71	58,52
			Cakupan Bina Kelompok Tani	10,21%	12%	12,43%	12,43%	12,43%
			Peningkatan Harga Komoditi Kopi dari Rp. 18.000 per kg tahun 2013 menjadi Rp.47.000 per kg tahun 2019 (Rp/Kg)					47

			Prosentase Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB						22%
			Minimal 25 % dari total produksi kopi dan kakao memenuhi standart mutu ekspor pada tahun 2019 (dari mutu asalan menjadi mutu standart ekspor)						25
			Prosentase Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB						22
			Prosentase Kontribusi sektor perkebunan terhadap PAD Kabupaten Manggarai Timur						2%
			Populasi ternak :						
			Sapi	15.963	17.559	17.719	17.735		17.736
			kerbau	12.233	12.845	12.875	12.877		12.877
			Kambing	31.167	34284	34595	34627		34630
			Babi	63.995	70394	71034	71098		71105
			Distribusi bibit ternak kepada masyarakat :						
			Sapi	165	165	165	165		165
			Kerbau	11	11	22	22		22
			Kuda			20	20		
			Kambing	463	500	500	500		500

			Babi	500	500	500	500	500
			Petugas yang mengikuti pelatihan	-	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
			Peternak yang mengikuti pelatihan	-	82 Orang	82 Orang	82 Orang	82 Orang
			Cakupan Vaksinasi Anthrax (% dari Populasi)	30%	40%	50%	60%	70%
			Cakupan Vaksinasi SE (% dari Populasi)	30%	40%	50%	60%	70%
			Persentase HPR yang divaksin (dari total populasi)	80%	80%	80%	80%	80%
			Produksi Perikanan	2.620,5 ton	2.480,6 ton	3.010,4ton	3.230,3 ton	3.500 ton
			Perikanan Laut	154 Ton	154 Ton	154 Ton	154 Ton	154 Ton
			PerikananTangkap	49 Ton	49 Ton	49 Ton	49 Ton	49 Ton
			Jumlah Nelayan yang memiliki alat tangkap	750	762	774	786	798
			Jumlah PPI		1 Unit			
			Jumlah TPI		1 Unit			
			Tingkat Konsumsi Ikan	11 kg/kap/thn	12 kg/kap/thn	13 kg/kap/thn	14 kg/kap/thn	15 kg/kap/thn
			Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD (Rp.1.000)	Rp.19.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000

			Persentase Data Sarana Ekonomi Daerah Yang Tersedia terhadap 18 unit jenis sarana ekonomi daerah						11 Jenis (62%)
			Persentase Data Produksi Daerah Yang Tersedia terhadap 96 Buah Data Produksi Daerah						12 Jenis (14%)
			Penurunan luas lahan kritis dari 21.612 ha tahun 2013 menjadi 20.362 ha tahun 2019	250	500	750	1000	1250	
			Prosentase kerusakan hutan	8	7	6	5	4	
			Meningkatnya Cakupan Kawasan hutan adat dari 5 Kawasan tahun 2013 menjadi 10 kawasan tahun 2019	6	7	2	9	10	
			Cakupan luas kawasan hutan yang direview tapal batasnya (Ha)	5.137,73	5.137,73	5.137,73	5.137,73	5.137,73	
			Kontribusi sub sector kehutanan terhadap PDRB Manggarai Timur	2,60	2,75	3,0	3,25	3,50	

			Kontribusi Sub sector kehutanan terhadap PAD Manggarai Timur	2,38	2,50	2,75	3,00	3,25
			Jumlah petani yang mengikuti pelatihan budidaya tanaman pangan dan SL-PHT	205 org	205 org	205 org	205 org	205 org
			Jumlah kelompok P3A yang dilatih	5 klpk	5 klpk	5 klpk	5 klpk	5 klpk
			Luas Tanam Komoditi Tanaman Pangan					
			'- Padi sawah	18,903 Ha	19,378 Ha	19,761 Ha	20,145 Ha	20.471
			'- Jagung	7,787 Ha	7,942 Ha	8,101 Ha	8,263 Ha	8,429 Ha
			Produktifitas Komoditi Tanaman Pangan :					
			'- Padi sawah	3.9 Ton/Ha	4 Ton/Ha	4 Ton/Ha	4 Ton/Ha	5 Ton/Ha
			'- Padi ladang	1.16 Ton/Ha	1.19 Ton/Ha	1.22 Ton/Ha	1.25 Ton/Ha	1.28 Ton/Ha
			'- Jagung	4 Ton/Ha	4 Ton/Ha	4 Ton/Ha	4.5 Ton/Ha	5 Ton/Ha
			'- Kedelai	1.75 Ton/Ha	1.8 Ton/Ha	1.85 Ton/Ha	1.9 Ton/Ha	1.95 Ton/Ha
			'- Kacang Hijau	1 Ton/Ha	1.09 Ton/Ha	1.12 Ton/Ha	1.15 Ton/Ha	1.19 Ton/Ha
			'- Ubi Kayu	8.3 Ton/Ha	8.5 Ton/Ha	8.7 Ton/Ha	9 Ton/Ha	9 Ton/Ha
			'- Ubi Jalar	7.5 Ton/Ha	7.8 Ton/Ha	8 Ton/Ha	8.2 Ton/Ha	8.4 Ton/Ha
			'- Sorghum	1.03 Ton/Ha	1.06 Ton/Ha	1.09 Ton/Ha	1.12 Ton/Ha	1.15 Ton/Ha

			Dokumen data produksi tanaman pangan dan hortikultura	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok
			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pasca panen	3 Klpk	5 Klpk	5 Klpk	5 Klpk	5 Klpk
			Dokumen data potensi pertanian dan peternakan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Luas lahan intensifikasi tanaman padi sawah	30 Ha	40 Ha	50 Ha	60 Ha	60 Ha
			Luas lahan pengembangan tanaman pangan (non padi):					
			a. Jagung Hibrida	244 Ha	125 Ha	125 Ha	125 Ha	125 Ha
			b. Jagung Komposit		125 Ha	125 Ha	125 Ha	125 Ha
			c. Jagung Kedelai		40 Ha	40 Ha	40 Ha	40 Ha
			d. Jagung Kacang Tanah		40 Ha	40 Ha	40 Ha	40 Ha
			e. Jagung Kacang Hijau		100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha
			f. Jagung Sorghum dan Jelai		5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha
			Luas lahan pengembangan perbenihan:					
			a. Padi	70 Ha	70 Ha	70 Ha	80 Ha	90 Ha
			b. Jagung	30 Ha	40 Ha	40 Ha	50 Ha	50 Ha

			Prosentase lahan terserang organisme pengganggu tanaman yang ditangani	90%	90%	90%	90%	90%
			Dokumen RDKK :	100%	100%	100%	100%	100%
			Pembangunan Damparit dan salurannya, PID serta JITUT	40 Unit	35 Unit	35 Unit	35 Unit	35 Unit
			Pembangunan Jalan Usaha Tani	3 Km	3 Km	3 Km	3 Km	3 Km
			Lahan sawah baru yang tercetak		50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha
			Petugas Pengamat Hama Pertanian/POPT yang mengikuti pelatihan	40 Org	45 Org	45 Org	45 Org	45 Org
			Jumlah Alsintan yang diserahkan ke masyarakat	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
			Jumlah Kelompok tani penerima bantuan APBN dan APBD I bidang sarana dan prasarana yang dibina	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit
			Rumah potong hewan yang dibangun				1 Unit	
			Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
			Populasi ternak :					
			a. Sapi	15.963	17.559	17.719	17.735	17.736

			b. Kerbau	12.233	12.845	12.875	12.877	12.877
			c. Kambing	31.167	34284	34595	34627	34630
			d. Babi	63.995	70394	71034	71098	71105
			Distribusi bibit ternak kepada masyarakat:					
			a. Sapi	165	165	165	165	165
			b. Kerbau	11	11	22	22	22
			c. Kuda			20	20	
			d. Kambing	463	500	500	500	500
			e. Babi	500	500	500	500	500
			Pengembangan UPT Golo Mongkok :					
			a. Luas areal HMT Golo Mongkok yang digarap.	2 Ha		2 Ha		2 Ha
			b. Pengembangan ternak di Golo Mongkok :					
			'- Sapi Penggemukan : 50 Ekor	10 Ekor	10 Ekor	10 Ekor	10 Ekor	10 Ekor
			'- Babi pejantan : 6 Ekor	2 Ekor		2 Ekor		2 Ekor
			'- Kambing Bibit : 10 Ekor				10 Ekor	
			Jumlah Kelompok tani penerima bantuan APBN dan APBD I bidang peternakan yang	2 Klpk	2 Klpk	2 Klpk	2 Klpk	2 Klpk

			dibina				
			Petugas yang mengikuti pelatihan	-	2 Orang	2 Orang	2 Orang
			Peternak yang mengikuti pelatihan	-	82 Orang	82 Orang	82 Orang
			Cakupan Vaksinasi Anthrax (% dari Populasi)	30%	40%	50%	60%
			Cakupan Vaksinasi SE (% dari Populasi)	30%	40%	50%	60%
			Persentase HPR yang divaksin (dari total populasi)	80%	80%	80%	80%
			Jumlah petugas keswan yang mengikuti pelatihan	-	15 Org	15 Org	15 Org
			Pengawasan perdagangan ternak antar pulau	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
			Pembangunan laboratorium keswan	-	-	-	1 Unit
			Luas Lahan Pengembangan buah-buahan	160 Ha	165 Ha	180 Ha	195 Ha
			Luas Lahan Pengembangan sayuran dan biofarmaka :				
			1. Luas lahan pengembangan	8	8	10	10

			jahe					
			2. Luas Lahan pengembangan sayur-sayuran :	22	22	22	22	22
			Prosentase kelulusan di SMK-PP Negeri I Poco Ranaka	100%	100%	100%	100%	100%
			Peningkatan ketrampilan siswa					
			SMK-PP Negeri I Poco Ranaka :					
			'- PKU	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
			'- Praktek Rutin	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
			'- Ujian Nasional	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
			'- Ujian Semester	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali
			'- Unit Produksi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
		2.Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	RPH Yang Dibangun				1 Unit	
		3.Meningkatkan ketahanan pangan	Regulasi Ketahanan Pangan	0 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok
			Ketersediaan Pangan Utama	30%	40%	50%	60%	75%

		4.Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	1 kali	1 kali	0	1 kali
			Sarana Penyelenggaraan Seni dan budaya	0	0	1 unit	0	0
			Cakupan Fasilitas Seni	11 Kali	11 Kali	11 Kali	0	11 kali
			Cakupan Gelar Seni	0	1 kali	1 kali	1 kali	0
			Meningkatnya kapasitas SDM Pelaku Wisata	0	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang
			Jumlah Obyek wisata yang ditata	2	2	2	2	2
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pariwisata	1 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen
			Jumlah Promosi Pariwisata Melalui Media cetak (Majalah)	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
			Expo Pariwisata	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
			Jumlah Peserta Sosialisasi Cagar Budaya	180 orang	180 orang	180 orang	180 orang	180 orang
			Kunjungan Wisata	5000	6000	7000	8000	9000
			Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
			Jumlah Leaflet Promosi Pariwisata		1000 Lembar	1000 Lembar	1000 Lembar	1000 Lembar
			Jumlah Upacara Adat Yang Difasilitasi		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
		5. Meningkatnya	Prosentase	88,9%	89,9%	90,7%	91,3%	91,9%

	Daya saing koperasi dan UMKM	Koperasi aktif					
		Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
		Jumlah BPR/LKM	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
		Usaha Mikro kecil dan Menengah	0,15%	0,17%	0,20%	0,22%	0,24%
	6.Meningkatnya usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan produk unggulan daerah dan bahan baku lokal	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	0,74%	0,81%	0,89%	0,06%	1%
		Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	35,48%	39,52%	43,55%	47,58%	51,61%
		Pertumbuhan Industri	32,98%	20,05%	21,54%	23,03%	31,14%
		Cakupan bina kelompok pengrajin	75,02%	79,03%	83,06%	87,10%	100%
	7.Meningkatnya aktifitas Perdagangan Dalam Negeri khususnya di pasar tradisional	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,77%	14,91%	15,05%	15,18%	15,32%
		Ekspor bersih perdagangan	Rp (90.130,24)	Rp (86.026,50)	Rp (87.747,03)	Rp (89.501,97)	Rp (91.292,01)
	8.Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan berinvestasi	Lama Proses Perizinan (Hari)	6,07 hari	6 hari	5,8 hari	5,6 hari	5,4 hari
		Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Jumlah Permohonan Yang Dimasukkan	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Investor berskala nasioanal	-	-	1 Investor	1 Investor	1 Investor

		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	88 M	88,2 M	88,4 M	88,6 M	88,8 M
		Rasio daya serap tenaga kerja	1: 83,8	1:83,8	1: 90	1: 100	1: 150
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar)	35 M	37 M	39 M	41 M	43 M
	9.Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yg ditempatkan	70%	70%	70%	70%	70%
		Cakupan wilayah transmigrasi			1 Unit	1 Unit	1 Unit
		Jumlah sarana dan prasana transmigrasi lokal		10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	50%	50%	50%	50%	50%
		Besaran pencari kerja/buruh yg menjadi peserta JAMSOSTEK	50%	50%	50%	50%	50%
		Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	45%	45%	45%	45%
		Cakupan Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat & kewirausahaan.	0,05%	0,1 %	0,18%	0,2%	0,28%
		10.Meningkatnya pembinaan usaha pertambangan dan pelestarian lingkungan pada	Jumlah data jumlah hasil produksi usaha pertambangan dari 2 IUP	10.000 MT	12.000 MT	14.000 MT	16.000 MT

		daerah tambang	Produksi					
			Jumlah Reklamasi Lahan Bekas Tambang pada 2 IUP produksi	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha
			Jumlah Pengawasan Pengangkutan Hasil Tambang di 2 IUP Produksi dan 17 SIPR					
			Jumlah pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang belum memiliki SIPR sebanyak 17 lokasi	6 kali (IUP) dan 12 kali (17 SIPR)	6 kali (IUP) dan 12 kali (17 SIPR)	6 kali (IUP) dan 12 kali (17 SIPR)	6 kali (IUP) dan 12 kali (17 SIPR)	6 kali (IUP) dan 12 kali (17 SIPR)
			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Akibat Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat	17 SIPR dan 9 IUP	17 SIPR dan 9 IUP	17 SIPR dan 9 IUP	17 SIPR dan 9 IUP	17 SIPR dan 9 IUP

			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Bahan Bakar Minyak (BBM Bersubsidi) untuk 9 kecamatan	2 SPBU	2 SPBU	2 SPBU	2 SPBU	2 SPBU
			Jumlah data potensi air tanah		5 Lokasi 5 Kec	4 Lokasi 4 Kec		
			Jumlah Pembangunan Solar Water Pump				5 Lokasi	4 Lokasi
			Jumlah Septic Tank dan Sumur Resapan	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit
<p>MISI IV : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel yang Berkarakter Melayani</p>	<p>1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan bersih</p>	<p>1. Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terarah</p>	Tersedianya Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA :					
			RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Renstra SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Renja SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			KUA - PPAS	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			RTRW	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			PWTJP	TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA
PWTJM	TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA			

		Frekuensi Penyelenggaraan Forum Perencanaan Interaktif dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat	10	9	9	9	9
		Presentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan (Laki-laki : Perempuan)	40 : 50	45 : 55	50 : 50	50 : 50	50 : 50
		Prosentase Pelaksanaan Program /Kegiatan Yang Tepat Waktu	85%	90%	90%	95%	95%
		Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	80%	85%	85%	90%	95%
		Penjabaran Program dan Kegiatan RKPD Kedalam KUA dan PPAS	80%	85%	85%	90%	95%
		Penjabaran Program dan Kegiatan KUA dan PPAS Kedalam APBD	80%	85%	85%	90%	95%
		Ketersediaan Jenis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Bidang Bappeda)	5	5	5	5	5

		Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan					
		Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		SIPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Penyusunan Buku Potensi Kabupaten	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
		Penyusunan Buku Potensi Kecamatan	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada
		Prosentase Aparatur Perencana Yang Telah Memiliki Kemampuan Teknis Perencana	19,23	38,46	57,69	76,92	96,15
		Prosentase kegiatan pembangunan fisik yang diselesaikan tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase penerapan pengadaan barang dan jasa system elektronik	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase ketepatan waktu rata-rata penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase SKPD yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelaksanaan laporan keuangan daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan SKPD yang menyampaikan surat pertanggungjawaban tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah		WDP	WDP	WTP	WTP
		Persentase Aset yang diinventarisasi secara akurat dan up-to-date	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Sertifikat tanah milik pemerintah dan Masyarakat	20 Bidang	20 Bidang	20 Bidang	20 Bidang	20 Bidang
		Cakupan kecamatan yang batas wilayahnya sesuai Peta Rupa Bumi	0 Kec	0 Kec	1 Kec	1 Kec	1 Kec
		Pemekaran wilayah kecamatan dari 9 Kecamatan tahun 2013 menjadi 12 Kecamatan pada	-	3 Calon Kec. Baru	3 Calon Kec. Baru	3 Kec. Baru	3 Kec. Baru

			tahun 2019					
			Cakupan Persehatian Tapal Batas Wilayah Kecamatan		3 Calon Kec. Baru	3 Calon Kec. Baru	3 Calon Kec. Baru	3 Calon Kec. Baru
			Persentase Data Sarana Ekonomi Daerah Yang Tersedia terhadap 18 unit jenis sarana ekonomi daerah	6 Jenis (28%)	7 Jenis (39%)	8 Jenis (45%)	9 Jenis (50%)	10 Jenis (56%)
			Prosentase Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Data Produksi Daerah Yang Tersedia terhadap 96 Buah Data Produksi Daerah	6 Jenis (7%)	8 Jenis (9%)	9 Jenis (10%)	10 Jenis (11%)	11 Jenis (12%)
			Prosentase partisipasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah melalui APKASI	100%	100%	100%	100%	100%

			Persentase SKPD yang menyampaikan Dokumen LAKIP yang terintegrasi dan tepat waktu	100	100	100	100	100
			Prosentase Pejabat Negara (Pejabat Daerah) yang menyampaikan LHKPN terhadap jumlah pejabat yang diwajibkan	100	100	100	100	100
			Persentase partisipasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah melalui APKASI	100%	100%	100%	100%	100%
			persentase SKPD yang memperoleh penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan pertauran lebih tinggi	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Aparatur Yang Lulus Diklat Penjurangan (Prajabatan dan PIM)	80%	90%	100%	100%	100%
			Prosentase Aparatur Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	100%	100%	100%	100%	100%

		(BUP)					
		Ratio PNSD Terhadap Jumlah Penduduk	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
		Persentase Jabatan Struktural Yang Terisi Sesuai Dengan Persyaratan dan Standar Kebutuhan	89%	99%	100%	100%	100%
		Prosentase Jumlah PNS Yang Ditingkatkan Pendidikan Terakhir (Dari SLTA ke Diploma, dari Diploma ke Sarjana dan Dari Sarjana ke Pasca Sarjana)	59%	59%	60%	60%	60%
		Prosentase PNS Yang Terlayanai Kenaikan Pangkatnya	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan PNS yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang
		Cakupan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	100%	100%	100%	100%	100%

			Persentase aparaturnya yang lulus dan memiliki sertifikat Diklat Teknis dan Fungsional sesuai bidangnya :	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah SKPD yang Arsipnya Didata dan ditata	3	4	4	4	4
			Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	4,84%	11,29%	17,74%	24,19%	30,65%
			Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Arsip	0	5	4	5	4
			Cakupan Pelayanan Kartu Keluarga bagi masyarakat (KK)	8,3	8,3	8,3	8,3	0
			Cakupan akta kematian (Orang)	6	10	20	30	0
			Cakupan Akta Perkawinan (Pasangan)	131	150	150	150	0
			Jumlah kecamatan yang menerapkan pelayanan admin kependudukan terintegrasi online	9	9	9	9	0
			Jumlah Tenaga Aparatur Pengawasan Terlatih					50 Orang
			Jumlah Tenaga Auditor Fungsional Terlatih					22 Orang

		Jumlah Obyek Pemeriksaan Internal Secara Berkala	70 OP	80 OP	90 OP	100 OP	100 OP
		Jumlah Obyek Pemeriksaan Khusus	10 Op	15 OP	20 OP	25 OP	30 Op
		Jumlah Kegiatan Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	6 Keg	6 Keg.	6 Keg	6 Keg	6 Keg
		Jumlah Obyek Pemeriksaan Kasus	10 OP	15 OP	20 OP	25 OP	30 OP
		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Didistribusikan ke OP	70 LHP	80 LHP	90 LHP	100 LHP	110 LHP
		Porsentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	3.Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah	Meningkatnya PAD	17.000.000.000	18.500.000.000	21.000.000.000	24.000.000.000	27.000.000.000
		Meningkatnya Pendapatan Daerah	569.839.485.845	614.487.853.946	665.494.038.972	721.656.027.491	783.237.904.478
		Jumlah Pontensi obyek pajak dan Retribusi :					
		Hotel	3	1	1	1	1
		Restoran	12	3	5	7	10
		Reklame	10	15	20	25	30
		PBB	128.948	1.000	750	500	500
		Retribusi	227	100	150	200	250

			Cakupan Koordinasi dan evaluasi penerimaan daerah dari komponen PAD bersama 15 SKPD pengelola PAD	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
	4. Terbukanya aksesibilitas bagi warga terhadap informasi pembangunan		Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; (Radio)	12	12	12	12	12
			Media baru seperti website (media online);	12	12	12	12	12
			Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	-	10	10	10	10
			Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12	12	12	12	12
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	100	100	100	100
			Jumlah surat kabar nasional/lokal	5	5	5	5	5
			Jumlah penyiaran radio/TV lokal	1	1	1	1	1

		Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada
		Pameran/expo	-	1	1	1	1
		Cakupan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara /Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen Dalam / Luar Negeri.	12 Kali	12 Kali	24 Kali	24 Kali	12 Kali
		Cakupan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali
		Cakupan Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	73 Kali	73 Kali	73 Kali	73 Kali	73 Kali
		Cakupan Pelayanan Keprotokoln Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah	71 Kali	81 Kali	91 Kali	101 Kali	121 Kali
		Cakupan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan media massa	-	1	-		1

			Cakupan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah	6 Eks	7 Eks	8 Eks	9	10 eks
			Prosentase pengelolaan dan penyajian data informasi	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan pelaksanaan Dialog / Audensi dengan Tokoh - tokoh Masyarakat Pimpinan /Anggota Organisasi sosial & Kemasyarakatan	16 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali
2.Meningkatkan Kedadaran masyarakat dan aparat terhadap Hukum dan HAM	5.Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis		Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP :					
			Ormas	5	5	5	5	5
			LSM	12	12	12	12	12
			OKP	0	0	0	0	0
		Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten	880	968	1171	1288	1417	
	6.Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilu		Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali

	7.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Penegakan Perda					15 Perda
		Cakupan Patroli					100 Kali
		Jumlah Anggota per satuan penduduk					76,67
	8.Meningkatnya penataan produk hukum daerah	Prosentase penyelesaian kasus hukum yang melibatkan pemda	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perda dan Perbub yang dihasilkan					
		Peraturan Daerah	15 Perda	15 Perda	15 Perda	15 Perda	15 Perda
		Peraturan Bupati	15 Perbub	15 Perbub	15 Perbub	15 Perbub	15 Perbub
		Cakupan Desa Binaan Sadar HUKum	7 Desa	9 Desa	9 Desa	9 Desa	9 Desa
	9.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan berdemokrasi	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	164	177	178	177	177
		Prosentase Kegiatan DPRD yang dilaksanakan tepat waktu (Pembahasan Perda, Pansus)	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase Jumlah Perda yang dibahas tepat waktu	20%	20%	20%	20%	20%

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi Pembangunan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Secara umum, strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014– 2019, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah:

1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
2. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan;
3. Percepatan pembangunan daerah dengan mengembangkan ekonomi lokal;
4. Tata Kelola Pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur menitik beratkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan diperlukan adanya strategi daerah yang kemudian akan menetapkan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJM Provinsi) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Manggarai Timur periode tahun 2014-2019 adalah :

1. Peningkatkan mutu pendidikan;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Kesempatan Berusaha/iklim usaha;
5. Peningkatan Mutu Infrastruktur dan membuka akses ke daerah yang terisolasi;
6. Penataan Lingkungan; dan
7. Pelayanan Publik.

Tabel VI.1
Strategi, Arah dan Kebijakan

MISI I : Membangun SDM Kabupaten Manggarai Timur Yang Produktif Dan Berdaya Saing

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2014	2015	2016	2017	2018
	Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan pada semua jenjang	Meningkatnya akses pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang merata kepada masyarakat	1. Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan 2. Pelayanan Pendidikan yang merata dan berkeadilan	1. Pendidikan terjangkau bagi anak-anak usia sekolah diseluruh wilayah Manggarai Timur	X	X	X	X	X
2. Penuntasan Buta Aksara				X	X	X	X	X	
3. Pengembangan PAUD				X	X	X	X	X	
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru				X	X	X	X	X	
5. Pembangunan Unit Sekolah Baru				X	X	X	X	X	
6. Pengembangan Standar Pelayanan Pendidikan				X	X	X	X	X	
7. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan				X	X	X	X	X	
		Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan	Mewujudkan Mutu dan Keunggulan	1. Peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar	X	X	X	X	X

			pendidikan	2. Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan sebaran tenaga guru	X	X	X	X	X
				3. Peningkatan jumlah guru berijazah S1 atau D-IV.	X	X	X	X	X
			Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja	Mewujudkan pendidikan kejuruan yang mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja					
			Tata Kelola pendidikan yang baik dan Akuntabel	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan	X	X	X	X	X
				2. Peningkatan partisipasi peran stakeholders dalam fungsi pengawasan	X	X	X	X	X
				3. Meningkatkan mutu dan etos kerja guru	X	X	X	X	X
		Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan perpustakaan	Meningkatkan sarana dan prasarana	Mewujudkan minat baca masyarakat	X	X	X	X	X

			perpustakaan daerah						
	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesempatan pemuda berorganisasi dan berkeasi 2. Pembinaan pemuda 	1. Peningkatan kepemimpinan pemuda selaku kader bangsa	X	X	X	X	X
				2. Penguatan kreatifitas pemuda	X	X	X	X	X
				3. Melindungi pemuda dari penyalahgunaan narkoba	X	X	X	X	X
		Meningkatnya prestasi olah raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan prestasi olahraga usia dini di lingkungan sekolah 2. Meningkatkan pembinaan atlet atlet berprestasi 3. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga 	1. Peningkatan pembinaan atlit pada jenis olahraga berprestasi	X	X	X	X	X
				2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga pada lembaga pendidikan	X	X	X	X	X
				3. Meningkatkan pembinaan pada organisasi olah raga	X	X	X	X	X
	Peningkatan drajad kesehatan masyarakat secara	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Akses Pembiayaan kesehatan bagi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Paramedis pada semua tempat pelayanan kesehatan 2. Pemberian Makanan 	X	X	X	X	X

	berkelanjutan	terjangkau	masyarakat miskin	Tambahan					
				3. Meningkatkan penataan system rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin	X	X	X	X	X
				4. Meningkatkan kepesertaan JKN	X	X	X	X	X
			Pembangunan dan Peningkatan standar mutu	Pembangunan RSUD dan peningkatan sarana dan prasarana	-	X	X	X	X

			elayanan RSUD	serta manajemen RS						
			Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya	1. Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan	X	X	X	X	X	
				2. Peningkatan kapasitas institusi pelayanan kesehatan	X	X	X	X	X	
				3. Pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan	X	X	X	X	X	
		Menurunnya kematian ibu baru melahirkan dan anak baru lahir	Revolusi KIA	Pelayanan khusus kepada Ibu dan Anak	X	X	X	X	X	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Penguatan pemberdayaan masyarakat serta penyehatan lingkungan	1. Meningkatkan jumlah Desa Siaga	X	X	X	X	X	
					2. Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	X	X	X	X	X
					3. Meningkatkan penyuluhan dan promosi sadar hidup sehat	X	X	X	X	X
	Peningka	Terkendalinya	Meningkatkan	1. Meningkatkan	X	X	X	X	X	

	tan Kualitas Hidup Keluarga	Jumlah penduduk	kualitas dan jangkauan pelayanan KB	Kelestarian dan kemandirian peserta KB					
				2. Koordinasi pelayanan KB	X	X	X	X	X
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Pemberian Layanan (konseling) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan	X	X	X	X	X
			Mewujudkan Pengarutamaan Gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender bagi Perempuan	X	X	X	X	X
		Meningkatnya pemahaman anggota keluarga terhadap bahaya narkoba	Melindungi Remaja dan anggota keluarga dari bahaya narkoba	Kampanye dan Penyuluhan Anti Narkoba	X	X	X	X	X
	Meningkatnya perlindungan perilaku	Meningkatnya perlindungan sosial bagi	1. Pengurangan Masalah Sosial dan memberikan pelayanan terhadap	1. Fasilitasi bantuan modal usaha bagi kelompok usaha	X			X	X

	ngan sosial bagi masyarakat miskin	masyarakat miskin	PMKS 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial	2. Pembinaan dan fasilitasi sosial dasar warga KAT dan PMKS		X	X	X	X
				3. Pembinaan dan pelayanan bagi penyandang cacat dan ekstrauma	X	X	X	X	X
	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dan sinergitas program program penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat pedesaan	1. Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi Masyarakat 2. Peningkatan pemberdayaan social, budaya dan ekonomi masyarakat	1. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat	X	X	X	X	X
				2. Penguatan kelembagaan	X	X	X	X	X
		Sinergisnya program program penanggulangan kemiskinan	Menurunkan jumlah penduduk miskin	1. Terpantainya jumlah masyarakat miskin secara akurat	X	X	X	X	X
				2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya	X	X	X	X	X

				penanggulangan kemiskinan					
	Pelestarian seni budaya Manggarai	Meningkatnya pelestarian seni budaya	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Manggarai	1. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya	X	X	X	X	X
2. Pengembangan kemitraan pengelolaan budaya daerah				X	X	X	X	X	
3. Pembinaan sanggar budaya				X	X	X	X	X	

MISI II : Membuka Isolasi Daerah dan Membangun Infrastruktur Secara Merata

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2014	2015	2016	2017	2108
	Meningkatkan Infrastruktur secara merata dan membuka keterisolasian daerah terpencil, berbasis tata ruang dan lingkungan hidup	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Infrastruktur Jaringan Jalan yang nyaman, berkualitas dan merata	1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan	X	X	X	X	X
				2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan			X	X	X

				3. Pembangunan Jalan dan Jembatan menuju fasilitas pelayanan umum (sekolahn, kesehatan dan pasar).	-	X	X	X	X
		Meningkatnya kualitas peralatan kebina margaan	Pemeliharaan peralatan kebina,margaan	Pemeliharaan peralatan kebina,margaan	X	X	X	X	X
		Terwujudnya infrastruktur air bersih, drainase dan sanitasi yang berkualitas dan merata	1. Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rang peningkatan cakupan dan kontinuitas	1. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum	X	X	X	X	X

			<p>layanan air bersih</p> <p>2. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana system drainase</p>	<p>2. Pembangunan jaringan air bersih pada fasilitas pelayanan umum (pendidikan, kesehatan dan pasar).</p>	-	X	X	X	X
				<p>3. Pembangunan saluran / drainase</p>	X	X	X	X	X
		Terwujudnya pengelolaan irigasi yang optimal	Meningkatkan kinerja pengelolaan system jaringan irigasi untuk peningkatan produktifitas	<p>1. Pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi</p>	X	-	X	X	X
				<p>2. Pembinaan kelembagaan petani pemakai air</p>	X	X	X	X	X
		Pengembangan Wilayah Strategis	Percepatan penyiapan	<p>1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan</p>		X	X	X	X

		dan Cepat Tumbuh	infrastruktur pada kawasan strategis dan cepat tumbuh	2. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur	X	X	X	X	X
				3. Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman	X	X	X	X	X
		Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi publik yang nyaman dan lancar	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	1. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan	X	X	X	X	X
				2. Menyediakan fasilitas terminal yang layak		X	X	X	X
				3. Pengembangan dan Penyediaan sarana dan prasarana angkutan		X	X	X	X
			Meningkatkan keselamatan berlalu lintas	1. Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (rambu, marka jalan dll)	X	X		X	X

				2. Pengendalian Disiplin berkendara	X	X	X	X	X
				3. Uji Kelayakan kendaraan	X	X	X	X	X
		Meningkatnya infrastruktur energy dan ketersediaan energi	1. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan energi listrik 2. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan pasokan listrik pedesaan	1.Pengembangan dan peningkatan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang potensial sebagai sumber energi listrik	X	X	X	X	X
				2.Pengembangan dan peningkatan pembangunan jaringan, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN	X	X	X	X	X

	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal	Manggarai Timur menjadi Kabupaten yang hijau yang bersih, sehat dan ramah lingkungan	Mendorong pengelolaan sampah perkotaan secara berkelanjutan melalui peningkatan pelayanan	1. Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan sampah perkotaan	X	X	X	X	X
				2. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	X	X	X	X	X
			Pengendalian pencemaran lingkungan sejak dini	1. Koordinasi Pengendalian Dokumen AMDAL	X	X	X	X	X
				2. Pemantauan Kualitas lingkungan	X	X	X	X	X
			Konservasi dan Pengendalian kerusakan sumber daya air	Perlindungan Sumber Daya Air	X	X	X	X	X
			Peningkatan ruang terbuka hijau publik	Menambah luasan dan memelihara RTH yang sudah ada	X	X	X	X	X
		Tertanggulangnya bencana secara dini dan	Mewujudkan ketahanan terhadap	1. Pemulihan daerah pasca Bencana			X	X	X

		konferhensif	bencana	2. Penanganan Darurat korban bencana	X	X			X
				3. Peningkatan deteksi dini daerah rawan bencana	X		X	X	X
	Mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Penyusunan Rencana Tata Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	X	X		X	X

Misi III : Menumbuhkembangkan Ekonomi Rakyat Melalui Optimalisasi Keunggulan Lokal

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
	Menumbuhkembangkan ekonomi daerah	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan	X		X	X	X
2. Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian tanaman pangan				X	X		X	X	
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi tanaman hortikultura dan buah buahan.				X	X	X		X	

			1. Mengembangkan komoditi perkebunan sebagai produk unggulan daerah	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi tanaman perkebunan	X	X	X	X	X
			2. Mengembangkan jenis dan luas areal tanaman perkebunan	2. Pengembangan bibit unggul tanaman perkebunan yang memiliki produksi tinggi	X	X	X	X	X
				3. Pengembangan pusat perbenihan tanaman kopi dan kakao	X	X	X	X	X
			Meningkatkan jenis dan populasi ternak pada tiap rumah tangga	1. Pengembangan pembibitan ternak	X	X	X	X	X
				2. Pencegahan penyakit ternah secara terpadu	X	X	X	X	X
			Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan	1. Meningkatkan fasilitas sarana prasarana perikanan	X	X	X	X	X

			budidaya dan tangkap serta kelautan	2. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan;					
				3. Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan	X	X	X	X	X
			1. Meningkatkan SDM Pertanian yang handal 2. Pengembangan akses dan penguatan kelembagaan petani	1. Meningkatkan pengetahuan petani melalui pelatihan dan penyuluhan	X	X	X	X	X
				2. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan PPL	X	X	X	X	X
				3. Mengembangkan jejaring/kemitraan akses dan pemasaran			X	X	X

				4. Pengembangan kelembagaan kelompok tani	X	X	X	X	X
				5. Pengembangan pendidikan formal bidang pertanian	X	X	X	X	X
		Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil pertanian	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agroindustri	X	X	X	X	
		Meningkatkan ketahanan pangan	1. Meningkatkan stok pangan masyarakat 2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi	1. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	X	X	X	X	X

			pangan 3. Meningkatkan penanganan keamanan pangan	2. Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan local	X	X	X	X	X
				3. Pengembangan pengawasan keamanan pangan	X	X	X	X	
				4. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat	X	X	X	X	X
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan	Rehabilitasi hutan lahan	X	X	X	X	X
		Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan hutan	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan	Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan	X	X	X	X	X

		Review Kawasan Hutan	Review tapal batas kawasan hutan dan pengembangan hutan adat masyarakat	Percepatan review kawasan hutan	X	X	X	X	X
		Peningkatan produksi hasil hutan	Optimalisasi hasil hutan bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah	Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan sekitar hutan, Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	X	X	X	X	X
		Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata	1. Meningkatkan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik.	1. Kerjasama Promosi Pariwisata antar daerah se daratan Flores	X	X	X	X	X
			2. Meningkatkan aksesibilitas menuju obyek wisata	2. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata	X	X	X	X	X

			<p>3. Menjalin kerjasama antar daerah dan dengan pelaku bisnis pariwisata</p> <p>4. Memberi kemudahan berinvestasi bagi investor pariwisata</p>	<p>3. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan</p>	X	X	X	X	X
		Meningkatnya Daya saing koperasi dan UMKM	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	<p>1. Meningkatkan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota</p>	X	X	X	X	X
				<p>2. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM</p>	X	X	X	X	X

		Meningkatnya usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan produk unggulan daerah dan bahan baku local	Meningkatkan industri kecil berbasis produk unggulan daerah	1. Mengembangkan industri pengolahan berbahan baku produk unggulan daerah dan produk local	X	X	X	X	X
				2. Meningkatkan pengolahan hasil dengan menggunakan teknologi sederhana untuk menghasilkan produk bermutu	X	X	X	X	X
				3. Peningkatan kemitraan antar pelaku industry dan dengan koperasi/lembaga pemasaran	X	X	X	X	X
		Meningkatnya aktifitas Perdagangan Dalam Negeri khususnya di	1. Meningkatkan sistem dan jaringan	1. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang	X	X	X	X	X

		pasar tradisional	distribusi barang	strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien;					
			2. Pengembangan pasar dalam negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional	2. Peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional	X	X	X	X	X
		Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan berinvestasi	Meningkatkan pelayanan perijinan	Optimalisasi system dan prosedur pelayanan perizinan investasi	X	X	X	X	X
			1. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif dalam sektor ekonomi unggulan 2. Penyiapan data tentang potensi investasi sektoral daerah	Meningkatkan minat investasi melalui promosi	X	X	X		

		Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	1. Peningkatan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja	X	X	X	X	X
				2. Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta	X	X	X	X	X
			Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	1. Perlindungan tenaga kerja dan keserasian hubungan	X	X	X	X	X
				2. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja	x	X	X	X	X
		Meningkatnya pembinaan usaha pertambangan dan pelestarian lingkungan pada daerah tambang	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan para pelaku tambang	1. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan	X	X	X	X	X

				2. peran serta masyarakat	X	X	X	X	X
				3. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan	X	X	X	X	X

Misi IV : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel yang Berkarakter Melayani

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan bersih	Meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang sinergis dan	Mewujudkan perencanaan berkualitas yang dan akuntabel	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	X	X	X	X	X
				2. Peningkatan pengendalian	X	X	X	X	X

		terarah		dan evaluasi pembangunan					
				3. Pengelolaan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan	X	X	X	X	X
				4. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan.	X	X	X	X	X
				5. Meningkatkan fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	X	X	X	X	X
		Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan asset daerah	1. Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan keuangan daerah	X	X	X	X	X
				2. Mewujudkan Opini BPK menjadi WTP	X	X	X	X	X
				3. Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah	X	X	X	X	X
				4. Mewujudkan tertib adminitrasi tanah milik	X	X	X	X	X

				pemda					
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas	X	X	X	X	X
				2. Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah	X	X	X	X	X
			Mewujudkan kelembagaan yang efektif	Penataan struktur organisasi yang profesional					
			Mewujudkan aparatur yang professional dan handal	1. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta diklat teknis, fungsional dan berjenjang	X	X	X	X	X
				2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang	X	X	X	X	X
				3. Peningkatan kesejahteraan aparatur	X	X	X	X	X
			Mewujudkan pengelolaan tata kersipan	Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah	X	X	X	X	X
			Mewujudkan	Melaksanakan					

			system adminitrasi kependudukan	adminitrasi kependudukan yang berkualitas					
			Meningkatkan Kinerja Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Menerapkan SPIP di SKPD	X	X	X	X	X
		Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah	Meningkatkan pendapatan daerah	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber sumber penerimaan daerah	X	X	X	X	X
				2. Optimalisasi aset daerah sebagai sumber PAD	X	X	X	X	X
		Terbukanya aksesibilitas bagi warga terhadap informasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk desiminasi program pembangunan dan pelayanan publik	Menyediakan media komunikasi elektronik yang dapat menjangkau seluruh masyarakat di wilayah Manggarai Timur	X	X	X	X	X
				1. Pelaksanaan komunikasi Kepala Daerah dengan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	X	X	X	X	X

				2. Penyediaan media cetak untuk informasi pembangunan daerah	X	X	X	X	X
Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis		1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang toleransi antar umat beragama	X	X	X	X	X
				2. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	X	X	X	X	X
				3. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan Negara	X	X	X	X	X
		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu	X	X	X	X	X
		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga	1. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan mengoptimalkan fungsi lembaga adat	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan peraturan perundang-undangan dan HAM	X	X	X	X	X

		situasi ketentraman dan ketertiban umum	dan lembaga agama 2. Peningkatan koordinasi dengan penegak hukum 3. Peningkatan ketrampilan tenaga keamanan lingkungan	2. Melibatkan dan memberdaya lembaga adat dan agama 3. Meningkatkan koordinasi dengan penegak hukum 4. Meningkatkan ketrampilan tenaga keamanan lingkungan	X	X	X	X	X
		Terwujudnya ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta peningkatan koordinasi fasilitasi kewaspadaan nasional	Pembinaan dan pengembangan kerukunan hidup dan kerja sama antar umat beragama	Peningkatan kerukunan antar umat beragama	X	X	X	X	X

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

7.1. Kebijakan Umum

Perumusan kebijakan umum pembangunan jangka menengah daerah bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan yang berda yang kit dalam menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Program-program pembangunan tersebut menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Penetapan program pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan memuat seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam rangkapencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program pembangunan merupakan bentuk instrument kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Setiap program pemerintahan daerah tidak dapat dianggarkan dalam APBD jika tidak disusun dan ditetapkan dalam RKPD. Sementara itu, RKPD disusun berpedoman kepada RPJMD sehingga dengan demikian program pemerintahan daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indicator kinerja outcome dan SKPD penanggung jawab yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang RPJMD.

Untuk memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Manggarai Timur tahap kedua RPJPD perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam rangka implementasi Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, serta Inpres no 3 tahun 2010 sebagai bagian dari program dunia untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. RPJMD 2014-2019 dalam RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh, sebagai persiapan untuk mencapai kemandirian masyarakat Manggarai Timur dalam segala bidang. Bidang bidang unggulan yang melatarbelakangi kebijakan umum RPJMD 2014-2019 merupakan upaya untuk mewujudkan Manggarai Timu rsebagai Daerah Otonomi Baru yang termaju di Provinsi NTT.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kabupaten Manggarai Timur mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Timur 2014-2019, sebagai berikut :

1. Peningkatkan mutu pendidikan dengan fokus :
 - a) Meningkatkan mutu dan etos kerja guru.
 - b) Meningkatkan jumlah SMK berkualitas serta sekolah berstandar nasional dan bertaraf internasional.
 - c) Meningkatkan prestasi dan daya saing iptek, Olahraga dan seni budaya.
2. Pengentasan kemiskinan dengan fokus :
 - a) Meningkatkan partisipasi pendidikan bagi masyarakat miskin
 - b) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
 - c) Pengendalian jumlah penduduk
 - d) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat miskin
 - e) Mencetak tenaga kerja terampil
 - f) Meningkatkan permodalan dan pendampingan bagi UKM
 - g) Revitalisasi kawasan kumuh
3. Pelayanan Kesehatan dengan fokus :
 - a) Menambah jumlah dokter spesialis
 - b) Membangun RSUD
 - c) Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya
4. Peningkatan Kesempatan Berusaha/iklim usaha dengan fokus :
 - a) Memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan lahan
 - b) Menciptakan produk unggulan di setiap kecamatan
 - c) Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk unggulan
5. Peningkatan Mutu Infrastruktur dan membukaketerisolasian Daerah Terpencil :
 - a) Meningkatkan mutu jalan dan drainase
 - b) Meningkatkan ketersediaan air bersih
 - c) Normalisasi sungai, jaringan irigrasi dan reklamasi lahan kritis
 - d) Memperlancar akses lalu lintas ke setiap kawasan
6. Penataan Lingkungan dengan fokus :
 - a) Menetapkan dan menerapkan Tata ruang secara konsisten
 - b) Mewujudkan penataan pertamanan yang indah di setiap kawasan
 - c) Pengelolaan sampah dan limbah secara lestari
 - d) Meningkatkan sanitasi lingkungan
7. Pelayanan Publik dengan fokus :
 - a) Sinkronisasi data dan program antar SKPD
 - b) Mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan efisien
 - c) Menerapkan pelayanan terintegrasi secara online sampai ke kecamatan
 - d) Mewujudkan pelayanan perizinan prima
 - e) Membangun profesionalisme dan etos kerja melayani

7.1.1. Kebijakan Kewilayahan

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Manggarai Timur adalah:

1. Pemerataan pembangunan antar wilayah dengan memperkecil dikotomi antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan serta keseimbangan pengembangan seluruh wilayah Manggarai Timur dengan tetap didasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki.
2. Peningkatan pembangunan kewilayahan melalui pembangunan infrastruktur yang saling terkait sehingga memberikan hasil dan nilai yang lebih besar terutama pada wilayah yang relative tertinggal dalam rangka memacu pertumbuhan wilayah dan menyeimbangkan pengembangan ekonomi wilayah.
3. Peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan energy pada wilayah-wilayah terpencil dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

4. Peningkatan fungsi kawasan lindung, kelestarian sumber daya alam dan optimasi fungsi kawasan budidaya sebagai upaya dalam perlindungan lingkungan sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya dalam rangka pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi fungsi perlindungan dan pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
6. Pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam rangka meningkatkan penanggulangan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, mempercepat perkembangan wilayah dan kemajuan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antar kawasan.
7. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam pengembangan wilayah, agar terjadi keselarasan di dalam pembangunan kawasan perbatasan antar kecamatan dan antar desa/kelurahan sesuai dengan potensi daerah.

Beberapa upaya pembangunan periode 2014-2019 yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kewilayahan, diarahkan pada perluasan lapangan kerja, dan memberdayakan perekonomian rakyat, terutama yang berbasis pertanian; meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu; meningkatkan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas; meningkatkan pembangunan infrastruktur; serta meningkatkan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, dan pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan.

7.1.3 Penetapan Wilayah Pembangunan Berdasarkan RTRW

Penentuan Wilayah Pembangunan (WP) ini dilakukan dengan mempertimbangkan pola keterkaitan dan kesamaan (homogenitas) setiap kawasan. Pembagian WP dalam kerangka pengembangan wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Pembangunan Selatan (I)

Pusat pengembangan dan pelayanan WP selatan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah di Kecamatan Borong dengan daerah pelayanannya meliputi wilayah Kecamatan Rana Mese Kecamatan dan sebagian Kecamatan Kota Komba. WP selatan mempunyai sektor prioritas di bidang sektor listrik, gas dan air bersih, sektor angkutan/komunikasi dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor penggalian, sektor industri dan sektor perdagangan.

• Wilayah Pembangunan Tengah-Barat (II)

Pusat pengembangan dan pelayanan WP Barat di wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah di Mano dengan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Poco Ranaka dan Kecamatan Poco Ranaka Timur dan beberapa desa di Kecamatan Lambaleda. WP Barat mempunyai sektor prioritas di bidang penggalian, sektor industri dan sektor perdagangan. Sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor angkutan/komunikasi.

• Wilayah Pembangunan Tengah-Timur (III)

Pusat pengembangan dan pelayanan WP Timur di wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah di Langko Elar dengan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Elar Selatan dan sebagian desa di Kecamatan Sambi rampas. WP Timur mempunyai sektor prioritas di bidang penggalian dan sektor perdagangan. Sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor industri, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor angkutan/komunikasi.

- **Wilayah Pembangunan Utara (IV)**

Pusat pengembangan dan pelayanan WP Utara di wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah di Pota dengan daerah pelayanannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Lambaleda. WP Utara mempunyai sektor prioritas di bidang pertanian, sektor penggalian, sektor industri dan sektor perdagangan. Sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor angkutan/komunikasi.

Pembagian wilayah pengembangan tersebut bertujuan agar mampu mempengaruhi perkembangan daerah disekitarnya baik perkembangan secara ekonomi, sosial maupun budaya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan berupa penambahan akses maupun fasilitas-fasilitas pendukung sehingga dalam kedudukannya sebagai ibu kota kabupaten Manggarai Timur yaitu Kecamatan Borong mampu melayani kebutuhan masyarakat dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya di wilayah itu sendiri maupun wilayah disekitarnya.

7.2. Program Pembangunan

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Adapun penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Peningkatkan mutu pendidikan;
 - a. Urusan Wajib Pendidikan, melalui program :
 - (1) Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan
 - (2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - (3) Program Pendidikan menengah
 - (4) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
 - b. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga
 - (1) Program peningkatan peran serta kepemudaan
 - (2) Program Pengembangan Keragaman Budaya
 - c. Urusan Wajib perpustakaan dan arsip
 - (1) Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
 - (2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen atau arsip
 - (3) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
2. Pengentasan kemiskinan;
 - a. Urusan Wajib Pendidikan, melalui program :
 - (1) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
 - b. Urusan Wajib Kesehatan, melalui program :
 - (1) Program upaya kesehatan masyarakat
 - (2) Program Pelayanan Kesehatan penduduk Miskin
 - (3) Program Perbaikan gizi masyarakat
 - c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum melalui program :
 - (1) Program pengembangan perumahan
 - (2) Program lingkungan hidup sehat perumahan
 - (3) Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - (4) Pembangunan jalan dan jembatan
 - d. Urusan Wajib Keluarga Berencana
 - (1) Program KB
 - e. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
 - (1) Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - f. Urusan Wajib Tenaga Kerja

- (1) Program peningkatan kesempatan kerja
- g. Urusan Wajib Sosial
 - (1) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas padat terpencil dan PMKS lainnya
- h. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
 - (1) Program Program penciptaan iklim usaha mikro kecil dan menengah yang kondusif
 - (2) Program penciptaan iklim usaha mikro kecil dan menengah yang kondusif
 - (3) Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah
 - (4) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- i. Urusan Pilihan Pertanian
 - (1) Program peningkatan kesejahteraan petani
 - (2) Peningkatan Ketahanan pangan
- j. Urusan Pilihan Industri
 - (1) Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)
- 3. Pelayanan Kesehatan;
 - a. Urusan Wajib Kesehatan
 - (1) Program Peningkatan sumber daya masyarakat
 - (2) Program Pengadaan, peningkatan sarpras RSUD
 - (3) Program Pemeliharaan sarpras RSUD
 - (4) Program Peningkatan Manajemen RSUD
 - (5) Program Upaya kesehatan masyarakat
 - (6) Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - (7) Program Pelayanan kesehatan ibu dan anak
 - (8) Program Obat dan perbekalan kesehatan
 - (9) Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
 - (10) Program Standarisasi pelayanan kesehatan
 - (11) Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras pukesmas/pustu dan jaringannya
 - (12) Program Kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan
 - b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
 - (1) Program Pembangunan Fasilitas Umum
- 4. Peningkatan Kesempatan Berusaha/iklim usaha;
 - a. Urusan Wajib Pertanian
 - (1) Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - b. Urusan Pilihan Perindustrian
 - (1) Program pengembangan industri IKM
 - c. Urusan Pilihan Pertanian
 - (1) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - (2) Program pengembangan budidaya perikanan
 - (3) Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - (4) program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan
 - (5) Program pengembangan konservasi wilayah pesisir
 - (6) Program pemberdayaan penyuluhan pertanian Lapangan/pengamat hama pertanian
 - (7) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian
 - (8) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
 - (9) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
 - (10) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

- (11) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik (SPP Mano)
- (12) Program pendidikan menengah (SPP Mano)
- d. Urusan Pilihan Perdagangan
 - (1) Program peningkatan dan pengembangan ekspor
 - (2) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- 5. Peningkatan Mutu Infrastruktur Sebagai Kota Jasa;
 - a. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
 - (1) Program pembangunan jalan dan jembatan
 - (2) Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - (3) Rehabilitas/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - (4) Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - (5) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - (6) Program Pengendalian banjir
 - b. Urusan Lingkungan Hidup
 - (1) Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
 - c. Urusan Pilihan Kehutanan
 - (1) Program rehabilitasi hutan dan lahan
- 6. Penataan Lingkungan
 - a. UrusanWajib Tata Ruang
 - (1) Program Perencanaan tata ruang
 - (2) Program Pemanfaatan ruang
 - b. Urusan Wajib Lingkungan
 - (1) Program Program Peningkatan pelayanan dan pengelolaan kebersihan.
 - (2) Program Pengembang kinerja pengelolaan persampahan
 - (3) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau.
 - (4) Program Pembangunan/pemeliharaan taman
 - (5) Program Penataan areal pemakaman.
 - (6) Program Kualitas kebersihan lingkungan.
 - (7) Program Penataan dan pemeliharaan PJU.
 - (8) Program Pengendalian, pencemaran Lingkungan Hidup
 - c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
 - (1) Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - (2) Program pengembangan fasilitas umum
 - d. Urusan Wajib Kesehatan
 - (1) Program Lingkungan sehat
- 7. Pelayanan Publik.
 - a. UrusanPerencanaan
 - (1) Program pengembangan data dan informasi
 - b. Urusan Pemerintahan Umum
 - (1) Program Penataan Kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan
 - (2) Program Peningkatan penataan organisasi pemerintah daerah
 - (3) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah
 - (4) Peningkatan pelayanan dan kapasitas pemerintah kecamatan
 - (5) Program Peningkatan pelayanan prima terpadu
 - c. Urusan Komunikasi dan Informasi
 - (1) Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
 - d. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
 - (1) Program penataan administrasi kependudukan
 - e. Urusan Kepegawaian

- (1) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- (2) Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
- (3) Program Peningkatan informasi dan kedudukan hukum pegawai

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun, berbagai kemungkinan dapat saja terjadi yang akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung baik sebagai faktor pendorong maupun penghambat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Penyusunan indikasi Program prioritas didasarkan pada visi, misi dan program kerja Kepala Daerah serta amanat RPJP provinsi Kabupaten Manggarai Timur tahap kedua. Sedangkan untuk kebutuhan pendanaan didasarkan pada hasil evaluasi dan prediksi kondisi atas potensi dan kebutuhan pembangunan tahunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Tabel VIII.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Manggarai Timur

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2011/13)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)												SKPD Penanggung Jawab
			TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Urusan Wajib															
Pendidikan															
Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik														Dinas Pendidikan
	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%														
	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris														
	Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik														
	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif														
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Data SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK teremajakan dalam aplikasi PADATIWEB														Dinas Pendidikan

	% siswa memiliki kartu NISN														
	% guru memiliki kartu NUPTK														
	Angka kredit guru dan pengawas sekolah														
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan														Dinas Pendidikan
	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I - II : 18 jam per minggu b) Kelas III : 24 jam per minggu c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu														
	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku														
	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya														
	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar														
	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester														
	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik														
	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)														

Perencanaan Pembangunan															
Program Pengembangan Data/Informasi	Buku "Daerah dalam angka"														
	Buku "PDRB kota														
	Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan terhadap dokumen perencanaan yang diwajibkan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA, PPAS)	100%													
	Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu (KUA, RKPD, PPAS)	3 dokumen													
	Persentase kegiatan yang dianggarkan dibandingkan dokumen perencanaan (PPAS)	100%													
Perhubungan															
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	terpeliharanya Traffic light														
	terpeliharanya Warning light														
	terpeliharanya Halte/Shelte														
	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ serta rambu-rambu														
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio ijin trayek yang dikeluarkan perjumlah penduduk														
	Presentase jumlah angkutan darat perjumlah penumpang angkutan darat														
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan															
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan														
	Jumlah pemasangan fasilitas lalu lintas														
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum														
	Jumlah kepemilikan kendaraan wajib uji														

	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)																	
	a.																	
Lingkungan Hidup																		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	persentase penanganan sampah																	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ratio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah	34,92 %																
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kelurahan dengan kawasan permukiman yang bebas sampah berserakan.	9 desa/kel																
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mata air	250 ha																
	Penurunan luas lahan kritis terhadap luas wilayah kabupaten	19.595 ha																
	Jumlah Sumber Air Yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	12 sbr air																
	Persentase desa yang bebas pencemaran lingkungan	9 desa/kel																
Pertanahan																		
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	persentase antar wilayah yang memiliki pilar batas yang jelas																	
Kependudukan dan Catatan Sipil																		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	100%																
	Rasio bayi berakta kelahiran	100%																
	Rasio Pasangan berakta nikah	100%																
	Ketersediaan Data Base Kependudukan																	

	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang menerima RASKIN tepat waktu dan tepat sasaran	32807 RTS													
Tenaga Kerja															
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan														
	Jumlah Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan	80 kali													
	Persentase jumlah Pekerja / Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek Aktif	46,67%													
	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan terhadap total pencari kerja setiap tahun	4,71%													
	Angka partisipasi angkatan kerja	85,23 %													
	Ratio penduduk yang bekerja	96,02													
	Tingkat penganggur terbuka	1,90%													
Koperasi dan UKM															
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif	Jumlah sarjana yang menjadi wirausaha baru														
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM														
	Jumlah BPR/LKM aktif														
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Kelompok IKM yang statusnya meningkat dan memiliki ijin usaha	700 klpk													
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan dana bergulir	20 klpk													
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	persentase koperasi aktif	41 koperasi													

Koperasi															
Kebudayaan															
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan pemberian bantuan kepada sanggar seni	20 sanggar seni													
	Jumlah Situs budaya yang diidentifikasi	4 cagar budaya													
Pemuda dan Olahraga	Olah Raga Berprestasi	4 cabang													
	Penjaringan Atlit Olah Raga Secara Berjenjang	3 cabang													
	Meningkatkan Kualitas Olah Raga Berprestasi	2 cabang													
	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional (Bola Voley, Badminton, Basket)	2 lokasi													
	Penyelenggaraan Kompetisi olahraga	1 kompetisi													
Pemerintahan Umum															
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	persentase Dokumen LAKIP yang terintegrasi dan tepat waktu														
Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	persentase SKPD yang memperoleh penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien														
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan														
	persentase penyelesaian pengaduan masyarakat														
Program Peningkatan pelayanan prima terpadu	jumlah perizinan yang mendukung investasi														

	Penerbitan Izin sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditetapkan dalam SOP														
	waktu proses perizinan														
	index kepuasan masyarakat														
Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	persentase pembuatan KTP online														
	persentase laporan keuangan terintegrasi online														
	persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya														
Kepegawaian															
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya														
Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan :														
	- Kompetensi aparatur dibidang keuangan, pemerintahan dan kepegawaian														
	- Kualitas SDM aparatur melalui peningkatan jenjang pendidikan														
	- Pengadaan Pegawai														
	- Mutasi PNS														
	- Data informasi promosi pegawai														
Program Pendidikan Kedinasan	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya :														
	- PNS yang memiliki kemampuan teknis fungsional														
	- Penjenjangan struktural yang akan menduduki jabatan sudah Diklatpim yang dipersyaratkan														
Program Peningkatan	Persentase aparatur yang memiliki														

Informasi Kedudukan Hukum Pegawai	pembinaan dan memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan :																	
	- Menurunnya Jumlah kasus pelanggaran disiplin																	
	- Tersediannya data informasi pegawai																	
	Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan mental spiritual																	
Komunikasi dan Informasi																		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Durasi penyiaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat	7.500 jam																
Urusan Pilihan																		
Pertanian																		
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB																	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rasio Ketersediaan Pangan (Energi)	1.941 Gram/Kapita / Hari																
	Skor Ketersediaan protein per kapita	49,5 Skor Ketersediaan protein per kapita																
	Koefisien keragaman Stabilisasi harga dan pasokan pangan	Rp 9.000																
	Penguatan cadangan pangan	50%																
	Skor pola pangan harapan (PPH)	89,1 Pph																
	Pengawasan dan Pembinaan Pangan	85 sampel																
	Jumlah Desa Yang mendapat program DMP	7 desa																
	Jumlah Lumbung Pangan Daerah	11 unit																
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB																	
	Luas Areal Tanaman Perkebunan yang dikembangkan :																	

	1. Kopi	64 ha																	
	2.cengkeh	50 ha																	
	3.Kakao	50 ha																	
	4.kelapa	20 ha																	
	5.Mente	20 ha																	
	Nilai tukar petani																		
	Produktivitas Padi	420 ha																	
	Produktivitas Jagung	23.823 ton																	
	Produktivitas Kedele	33 ton																	
	Produktivitas kacang Tanah	116 ton																	
	Produktivitas kacang hijau	2.563 ton																	
	Produktivitas ubi kayu	13.852,4 ton 0																	
	Produktivitas ubi jalar	4608 ton																	
	Produktivitas sorghum	48,75 ton																	
	Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Petani	7 klpk																	
	Peningkatan Jumlah Petani yang dilatih	1.568 org																	
	Rasio PPL yang mengikuti Diklat	103 org																	
	Kelompok tani aktif	1.112 klpk																	
	Rasio Jumlah Kelas Kemampuan Kelompok Tani sesuai tingkatannya :																		
	Jumlah Kelompok Tani Kelas Utama	3 klpk																	
	Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya	21 klpk																	
	Jumlah Kelompok Tani Kelas Lanjut	75 klpk																	
	Jumlah Kelompok Tani Kelas Pemula	90 klpk																	
	Rasio PPL terhadap jumlah desa	120/176 orang/desa																	
Program Peningkatan produksi hasil peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak:																		
	1. sapi	9.914 ekor																	
	2.Kerbau	9.451 ekor																	
	3.kambing	31.475 ekor																	
	4.babi	49.969 ekor																	
Kehutanan																			

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Penurunan luas lahan kritis terhadap luas wilayah kabupaten	19.595 ha																
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB																	
	Cakupan pengembangan kawasan hutan :																	
	1. Luas kawasan hutan konservasi RTK 118 yang dikelola	32.249 Ha																
	2. Luas kawasan hutan lindung yang dikelola	23.985,29 ha																
	3. Luas kawasan hutan konversi yang dikelola	5.705 ha																
	4. Luas kawasan adat yang dikelola	20 ha																
Kelautan Perikanan																		
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan																	
	Persentase Nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap	597 nelayan																
	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PAD	Rp 550.000.000																
	Jumlah PPI (Pelabuhan pendaratan Ikan) di Kabupaten Manggarai Timur	1 unit																
	Jumlah PPI (Pelabuhan pendaratan Ikan) di Kabupaten Manggarai Timur	1 unit																
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	cakupan bina kelompok petani ikan (pokdakan)																	
	Cakupan bina kelompok tani																	
	konsumsi ikan																	
	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB																	
Perdagangan																		
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10 unit																
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terselenggaranya Registrasi Perusahaan Industri dan Perdagangan	450 unit																
	Meningkatnya Jumlah Pasar bagi	22.unit																

	pemasaran produk dan sembako														
	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Umum (Ruko / Kios Permanen / Tempat Asongan)	3 unit													
	Meningkatnya Jumlah Tempat Usaha Yang dilakukan Pengawasan Peredaran Barang	460 unit													
	Peningkatan Presentase akurasi alat ukur / timbang / takar yang ditera ulang terhadap jumlah alat ukur	96,22 %													
Perindustrian															
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Kelompok IKM yang statusnya meningkat dan memiliki ijin usaha	700 klpk													
	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan dana bergulir	20 klpk													
Energi dan Sumber Daya Mineral															
	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	5.222 RT													
	Energi listrik yang dimanfaatkan berdasarkan jenis dan sumber energi pembangkit listrik:														
	1. PLN	1100KWH													
	2. PLTMH	275 KWH													
	Prosentase sarana ekonomi yang memiliki sarana listrik dari 7 unit pasar yang ada	57,14 %													
Pariwisata															
	Jumlah obyek wisata budaya yang diidentifikasi	4 situs													
	Jumlah kawasan wisata Pantai Yang Ditata	11 kwsn													
	Jumlah Kawasan Wisata Bahari Yang Ditata	1 kwsn													
	Jumlah Kawasan Wisata Alam Yang Ditata	4 kwsn													
	Jumlah hotel yang diklasifikasi	9 hotel													
Transmigrasi	Cakupan wilayah transmigrasi	2 unit													

	Jumlah sarana dan prasana transmigrasi lokal	2 paket													

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2014-2019 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, RPJM Nasional, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan tahun 2013, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2019.

Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur dapat di lihat pada Tabel 9.1.

9.1. Target Agregatif Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur 2014 – 2019

Dari uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama periode 2014 - 2019, ditetapkan *target agregat* untuk beberapa indikator utama pembangunan dan disusun pertahapan sebagai sasaran - sasaran antara yang ingin dicapai.

Target Agregatif ditetapkan beberapa indikator utama meliputi Indeks Pembangunan Manusia, (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi. IPM Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2012

yang nilainya sebesar 67,06 ditargetkan menjadi 69,86 pada tahun 2018. Penetapan target ini berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang pendidikan, kesehatan data lima tahun terakhir dimana IPM Kabupaten Manggarai Timur selalu mengalami kenaikan. Namun demikian, diakui upaya peningkatan IPM sebesar sekitar 2,80 bukanlah upaya yang mudah. Harus dilakukan berbagai langkah strategis, yang tidak sekedar membutuhkan kecepatan, namun dengan percepatan penanganan lintas sektor secara integrative. Adapun target capaian beberapa indikator utama yang ditetapkan selama kurun waktu 2014 - 2019 adalah sebagaimana terpampang dibawah ini :

Tabel 9.1
Target Capaian Indikator Ipm Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014 – 2019

TAHUN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	USIA HARAPAN HIDUP (TAHUN)	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	ANGKAMELEK HURUF (%)	PARITAS DAYA BELI
2014	68,27	68,62	6,66	96,15	2.386.685
2015	68,75	68,87	6,73	96,37	2.555.901
2016	69,19	69,12	6,80	96,59	2.737.115
2017	69,51	69,37	6,86	96,81	2.931.176
2018	69,86	69,62	6,93	97,03	3.138.997
2019	70,21	69,87	7,00	97,25	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2014

Tabel 9.2
Target Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2014 – 2019

NO	TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	TINGKAT INFLASI (%)
1	2014	5,49	7 – 8
2	2015	5,54	6 – 7
3	2016	5,59	6 – 7
4	2017	5,64	5 – 6
5	2018	5,69	5 – 6
6	2019	5,74	5 – 6

Sumber : Data Hasil Analisis Tahun 2014

9.2. Penetapan Indikator Kinerja.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang ada, indikator kinerja dari masing-masing sasaran program pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 - 2018 yang ditetapkan dalam matrik dibawah ini.

9.2. Penetapan Indikator Kinerja.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang ada, indikator kinerja dari masing-masing sasaran program pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 - 2018 yang ditetapkan dalam matrik dibawah ini.

Tabel.9.3. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR							
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pertumbuhan PDRB (%)	3,53%	4,1%	4,3%	4,4%	4,5%	4,6%	
1.2	PDRB per kapita	2.795.746	3.015.020	3.251.492	3.506.511	3.781.532	4.088.119	
1.3	Persentase penurunan Rumah tangga miskin	64,04	60,00	55,00	45,00	40,00	35,00	
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1	Pendidikan							
1.1	Angka melek huruf (%)	97.58%	98.83%	99,40%	99,80%	99,99 %	99,99 %	99,99 %
1.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)							
	SD/MI	6,29 tahun	6 tahun	6 tahun	6 tahun	6 tahun	6 tahun	6 tahun
	SMP/MTs	3,02 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun
	SMA/SMK/MA	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun
1.3	Angka partisipasi kasar tingkat semua tingkat							
	Angka partisipasi kasar tingkat SD/MI (%)		87.07%	86.72%	86.72%	86.75%	86.79%	86.79%
	Angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTs (%)		74.20%	81.68%	81.70%	81.72%	81.74%	81.74%
	Angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK/MA (%)		34.68%	45.17%	56.78%	56.99%	57.21%	57.21%
1.4	Angka pendidikan yang ditamatkan (%):							
	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI (%)		5723	6000	6200	6500	6700	31123

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

2014-2019

	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs (%)		2615	3000	3200	3500	3700	16015
	Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA (%)		326 org	1442 Org	1473 org	1502 Org	1545 org	
1.5	Angka Partisipasi Murni (%):							
1.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	94.65%	79.67%	82.34%	82.38%	82.42%	42.45%	42.45%
1.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	82.20%	67.76%	74.59%	74.64%	74.68%	74.71%	74.71%
1.5.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)		33.08%	33.88%	42.59%	42.75%	42.91%	42.91%
2	Kesehatan							
2.1	Angka kelangsungan hidup bayi /1000							
2.2	Angka usia harapan hidup (tahun)							
2.3	Persentase balita gizi buruk (%)							
Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1	Kebudayaan							
1.1	Cakupan sanggar seni	-	-	12 sngr	12 sngr	16 sngr	20 sngr	20 sngr
1.2	Benda situs dan kawasan caga budaya yang dilestarikan					1 situs	2 situs	2 situs
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1	Pendidikan							
1.1	Pendidikan dasar:							
1.1.1	rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah : SD/MI SMP/MTs	55,14% 32,51%	55,14% 32,51%	62,41% 37,36%	61,18% 51,17%	59,98% 50,16%	58,80% 51,76%	58,80% 51,76%
1.1.2	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.3	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.4	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1		29 orang	34 orang	40 orang	60 orang	80 orang	243 orang

	(satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris							
1.1.5	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan	90%	90%	95%	100%	100%	100%	100%
1.1.6	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I - II : 18 jam per minggu b) Kelas III : 24 jam per minggu c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu d) Kelas VII-IX: 27 jam per minggu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.7	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Pendidikan menengah:							
1.2.1	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah		11.63%	14.66%	21.55%	23.47%	27.61%	27.61%
1.2.2	angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA		31.87%	99%	99%	99%	100%	100%
	angka rata-rata lama sekolah		3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun
	angka partisipasi kasar		34.68%	45.17%	56.78%	56.99%	57.21%	57.21%
	angka pendidikan yang ditamatkan		326 org	1442 Org	1473 org	1502 Org	1545 org	1545 org
	angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/paket C		33.08%	33.88%	42.59%	42.75%	42.91%	42.91%
	Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains		18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang
	Jumlah event iptek berskala regional dan nasional di Kabupaten Manggarai Timur		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
1.3	Fasilitas Pendidikan:							
2.1	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	65%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2.2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

	(satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis							
2.3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	6%	6%	8%	10%	13%	16%	16%
1.4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
1.4.1	Persentase peningkatan APK PAUD	37.49%	3.39%	3.52%	3.66%	3.81%	3.96%	3.96%
1.4.2	Angka Pendidikan yang ditamatkan TK	2.98%	720	763	809	858	910	4060
2	Kesehatan							
	Rasio posyandu per satuan balita							
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk							
	Rasio dokter per satuan penduduk							
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk							
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)							
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)							
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)							
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)							
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)							
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)							
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)							
	Cakupan kunjungan bayi (%)							
	Cakupan puskesmas (%)							
	Cakupan pembantu puskesmas (%)							
3	Pekerjaan Umum							
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	1.1144,12 km	1.235,53 km (7,99%)	1.470.3 km (20,52%)	1.687.96 km (19,02%)	1.881,29 km (16,90)	2.134,55 km (22,14%)	3.094,07 km (83,87%)
	- Peningkatan jalan	56,7 km	56,7 km	69,9 km	1.344,9 km	1.364,9 km	2.939,9 km	2.939,9 km

	- Pembangunan jalan baru							
3.2	Rasio Jaringan Irigasi	215.298,00 m	234.038,00 m	248.271,82	265.753,59 m	303.765,54 m	382.204,54 m	382.204,54 m
3.3.	Tersedianya sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun			2.825	5.359	5.359	5.359	5.359
3.4	Jumlah rumah tangga yang memiliki system air limbah yang memadai	70	70	70	140	140	140	140
3.5	Jumlah rumah tangga yang memiliki system air limbah skala komunitas/kawasan/kota	43	43	43	86	86	86	86
3.6	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang amam melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipahanan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	17.860		20.814	25.053	29.892	37.465	37.465
	Rumah tangga pengguna listrik (%)	68	68	68	68	68	68	68
4	Perumahan							
4.1	Persentase antar wilayah yang memiliki pilar batas yang jelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perencanaan Pembangunan							
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	-	-	-	100 Buku	-	100 Buku
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	100	-	-	100	-	100
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
6	Perhubungan							
6.1	Rasio ijin trayek	-	-	93/253.419	158/253.749	158/253.749	158/253.749	158/253.749
6.2	Jumlah uji kir angkutan umum							
6.3	Kepemilikan KIR angkutan umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.4	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (hari)	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan
6.5	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.6	Pemasangan Rambu-rambu	-	-	57 buah	57 buah	57 buah	120 buah	120 buah
7	Lingkungan Hidup							
7.1	Persentase penanganan sampah	-	-	1 TPA, & TPS, 1 tong	80 unit tong	1 TPA, 120 unit	150 unit tong	1 TPA,542 unit

7.2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	-	-	15%	15%	15%	15%	15%
7.3	Cakupan Penghijauan Wiayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	-	-	10 ha	110 ha	210 ha	310ha	310ha
7.4	Konservasi daerah lahan kritis	-	-	7500 koker	7500 koker	7500 koker	7500 koker	7500 koker
8	Kependudukan dan Catatan Sipil							
8.1	Penerbitan KTP		5.847	5.261	7.879	5.000	5.000	28987
8.2	Penerbitan kartu keluarga		608	3.886	4.831	3000	3000	15325
8.3	Penerbitan Akta kelahiran		7.006	5.584	10.097	5000	4500	32187
8.4	Rasio bayi berakte kelahiran (%)		107	190	152	100	100	649
8.5	Penerbitan Akta Kematian		4	4	10	20	30	30
8.6	Rasio Pasangan berakte nikah		0,20%	0,33%	0,36%	20%	40%	40%
8.7	Presentase akta kelahiran per 1000 penduduk		3%	2%	4%	20%	40%	40%
8.8	Ketersediaan database skala kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		-	-	100%	100%	100%	100%
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
9.1	Persentase perempuan yang mendapatkann pendidikan praktis	-	-	-	100 % (60 orang)	100 % (60 orang)	100 % (60 orang)	100 % (60 orang)
9.2	Jumlah perempuan yang memperoleh kesetaraan gender	-	-	-	30 orang	50 orang	50 orang	130 orang
9.3	Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu PKK dan Kelompok Masyarakat lainnya		60 orang	120 orang	120 orang	120 orang	180 orang	180 orang
10	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
10.1	Rasio akseptor KB		6 klpk	12 klpk	128klpk	24 klpk	36 klpk	96 klpk
10.2	Cakupan peserta KB aktif							
10.3	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)		5908	6000 orang	6000 orang	6500 orang	6600 orang	31008 orang
11	Sosial							
11.1	Persentase PMKS (fakir miskin) skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan social	-	-	-	39 % (150 Org)	28,6% (1100 org)	7,79% (300 org)	40,3% (1550 org)
11.2	Persentase PMKS (keluarga berumah tidak layak huni) skala kab/kota yang menerima program pemberberdayaan social		0,83% (50org)	2% (120 Org)	2,8% (170 org)	1,99% (120%)	1,5% (90 org)	9,14% (550 org)
11.3	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat			50 Org	40 Org	100 org	110 org	300 Org

11.4	Persentase penyandang cacat yang menerima program pemberdayaan social			0,5% (15 org)		1,5% (40%)	1,6 % (45 org)	4%(100 org)
11.5	Persentase PMKS (Anak terlantar) skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan social		1,79% (30 org)				2.09% (35 org)	2.09% (35 org)
12	Ketenagakerjaan							
12.1	Angka partisipasi angkatan kerja (%)		83,9%	76,3%	77 %	80%	85%	85%
12.2	Tingkat penganggur terbuka	1,75%	3,98%	3,00%	2,50%	2,50%	1,00%	1,00%
12.3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan kewirausahaan			18,2 %(30 org)		18,2 %(30 org)	24,2 %(40 org)	100 org
12.4	Ratio penduduk yang bekerja		99,5%	96,0%	96,0%	96,0%	96,0%	96,0%
13	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
13.1	Persentase koperasi aktif		11 kop	12 Kop	31 kop	41 kop	51 kop	51 kop
13.2	Jumlah UKM aktif		6 UKM	74 UKM	320 UKM	890 UKM	512 UKM	1802 UKM
14	Penanaman Modal							
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)							
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)							
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)							
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
15	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP							
	Kegiatan pembinaan politik daerah (Paket							
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
18	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per jumlah penduduk							
18.1	Cakupan petugas Limnas		19/24	25/25	23/25	43/25	43/25	43/25
18.2	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	32.657.838.083	229.207.466.252	356.799.632.796	410.628.685.145	540.500.000.000	550.000.000.000	555.000.000.000
18.3	Persentase keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
18.4	Persentase Kecamatan yang aman dan nyaman		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
18.5	Ketahanan Pangan		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
19	Ketersedian energi dan protein per kapita							

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

2014-2019

19.1	Ketersediaan pangan utama (%)	-	-	-	-	50 %	60 %	60 %
19.2	Stabilisasi harga dan pasokan pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19.3	Penguatan cadangan pangan	-	-	-	-	50 %	60%	60%
19.4	Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	-	-	-	-	40 %	50%	50%
19.5	Skor pola pangan harapan (PPH)	-	-	-	-	50%	60%	60%
19.6	Penanganan daerah rawan pangan	-	-	-	-	50%	60%	60%
19.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	30%	40%	40%
20	Pemeliharaan Pasca Pemberdayaan							
20.1	Swadaya Masyarakat terhadap program Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.2	Statistik							
21	Buku "Daerah Dalam Angka"	-	50 Buku	50 Buku	100 Buku	100 Buku	100 Buku	100 Buku
	Buku "PDRB kabupaten	-	50 Buku	50 Buku	100 Buku	100 Buku	100 Buku	100 Buku
	Komunikasi dan Informatika							
22	Jaringan komunikasi	-	1 paket	2 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket
22.1	Website/internet milik pemerintah	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
23.	Perpustakaan							
23.1	Jumlah perpustakaan desa						1 unit	1 unit
23.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun							
23.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah			500	1000	2000	5000	8500
23.4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		1500	2000	2500	3000	4000	13000
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1	Pertanian							
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%) :							
1.1	Produktivitas Padi							
1.1.1	Produktivitas Jagung	3.5%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%
1.1.2	Produktivitas Kedele	3.5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
1.1.3	Produktivitas kacang Tanah	1.05%	1.055%	1.055%	1.055%	1.055%	1.166%	1.166%
1.1.4	Produktivitas kacang hijau	1.08%	1.08%	1.08%	1.08%	1.08%	1.08%	1.08%
1.1.5	Produktivitas ubi kayu	0.324%	0.324%	0.324%	0.324%	0.326%	0.326%	0.326%
1.1.6	Produktivitas ubi jalar	10.73%	10.73%	10.73%	10.73%	10.76%	10.81%	10.81%
1.1.7	Produktivitas sorghum	0.52%	0.52%	0.52%	0.65%	0.68 %	0.8 %	0.8 %
1.1.8	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%);							
	- Kopi	0.5%	0.5%	0.5%	0.2%	0.59%	0.8%	0.8%
	- Kakao	0.33%	0.33%	0.33%	0.67%	0.75%	0.75%	0.75%
	- Cengkeh	0.55%	0.55%	0.55%	0.09%	0.25%	0.28%	0.28%

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

2014-2019

	- Jambu Mente - Kelapa	0.09% 0.28%	0.09% 0.28%	0.09% 0.28%	0.35% 0.61%	0.37% 0.76%	0.38% 0.82%	0.38% 0.82%
1.2	Persentase sentra produksi(sawah, ladang/tegalan dan pekarangan yang memiliki jalan usaha tani dan produksi	0.33%	0.33%	0.33%	0.326%	0.33%	0.327%	0.327%
2	Kelautan dan Perikanan	-	-	6 km	6 km	16 km	25 km	25 km
2	Jumlah UPR		2 unit	4 unit	8 unit	10 unit	12 unit	14 unit
2.1	Jumlah BBI					1 unit	1 unit	1 unit
2.2	Volume area rumput laut		7,2 ha	7,2 ha	13,2 ha	13,8 ha	14,4 ha	14.4 ha
2.3	Volume saluran tambak					700 m	700 m	1400 m
2.4	Cakupan bina Kelompok ikan					4 klpk	8 klpk	8 klpk
2.5	Jumlah armada dan alat tangkap		30 unit	52 unit	58 unit	90 unit	120 unit	120 unit
3	Kehutanan							
	rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
3.1	Produktivitas hasil produk perikanan	80% (830 ha)		75% (160 ha)	72% (160 ha)	60% (280 ha)	30% (160 ha)	30% (160 ha)
3.2	Persentase perlindungan Sumber daya alam	95%		65%	20 %)	22,50%	22,50%	22,50%
3.3	Persentase perlindungan Sumber daya hutan			70%	80%	90%	100%	100%
3.4	Persentase pelayanan yang memenuhi pelayanan standart prima	70%				80%	100%	100%
3.5	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB			97%	97%	97%	97%	97%
3.6	Produktivitas Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					22,5%	22,5%	22,5%
3.7	Cakupan pengembangan kawasan hutan		25%	30%	20%	20%	5%	5%
4	Energi dan Sumber Daya Mineral				1 kwsn	2 kwsn	4 kwsn	4 kwsn
4.1	Pertambangan tanpa izin		68	68	68	60	52	50
4.2	Persentase rumah tangga pengguna listrik		4 %	5%	6%	7%	8%	9%
4.3	Kontribusi Pertambangan terhadap PDRB		21	25	27	26	25	24
4.3	Pariwisata							
5	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD			100 jt	100 jt	100 jt	100 jt	400 jt
5.1	Perdagangan							
6	Cakupan bina kelompok pengrajin		9 klpk	34 klpk	22 klpk	27 klpk	30 klpk	122 klpk
6.1	Perindustrian							
7	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha		24,51% (151	27,27 (168 pdg)	54,44(360 pdg)	54,44(360 pdg)	54,44(360	54,44(360

	informal		pdg)				pdg)	pdg)
7.1	Ketransmigrasian							
8	Cakupan wilayah transmigrasi			1 kwsn	1 kwsn	1 kwsn	1 kwsn	1 kwsn
7.1	Jumlah sarana dan prasana transmigrasi lokal			28 unit	25 unit		90 unit	143 unit
7.2								
Fokus Daya Saing Daerah								
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1	Perhubungan							
1.1	Terminal yang direhabilitasi							
1.2	Jumlah pelabuhan udara/terminal bis/tambatan perahu	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
1.3	Jumlah traffic light		1 unit	1 unit	3 unit	5unit	6 unit	6 unit
2	Penataan Ruang							
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	-	-	-	2 buah	2 buah

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati - Wakil Bupati yang memuat Kebijakan Umum Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum Keuangan Daerah, Strategi dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ini disusun dengan berpedoman kepada RPJPD kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 dan RTRW kabupaten Manggarai Timur serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJM Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018 harus memuat kaidah pelaksanaan. Di samping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018 harus mencakup pedoman transisi.

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati Manggarai Timur untuk masa bakti 2014-2019, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.
- 4) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 – 2024, maka penyusunan RKPD tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Manggarai Timur dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.

BAB XI P E N U T U P

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019, merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 – 2029, RTRW Kabupaten Manggarai Timur, dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJM Nasional. Selain itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini juga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Lembaga DPRD

Untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan bersama dalam RPJM Daerah ini, diharapkan semua pihak yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara bersama sama diharapkan dapat terlibat aktif dalam melakukan control dan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

Semoga dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014 – 2019, dapat dimanfaatkan sebagai dokumen perencanaan dalam pengalokasian anggaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai skala prioritas pembangunan daerah lima tahun kedepan.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban melaksanakan RPJMD
2. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019 kepada masyarakat.
3. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD.
4. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
6. Seluruh SKPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya;
7. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
8. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2014-2019 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Manggarai Timur yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
9. Penyusunan RKPD Kabupaten Manggarai Timur dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa / Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten
10. RKPD Kabupaten Manggarai Timur menjadi acuan bagi setiap SKPD/unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan pendekatan pencapaian hasil (*outcomes*)
11. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Manggarai Timur merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
12. Renja-SKPD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan menjadi kontrak kinerja Kepala SKPD/Unit kerja RPJMD Kabupaten Manggarai Timur
13. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019, Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil RPJMD serta melaporkan hasilnya kepada Bupati
14. Jika pada saat pelaksanaan terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan pada saat penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (KUA – PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun anggaran.

15. Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Perubahan yang mendasar tersebut, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

16. Dalam hal saat pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah